

# STATISTIK SEKTORAL

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
TAHUN 2025

# 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA





## **LAMBANG KABUPATEN JAYAWIJAYA**



# **VISI DAN MISI KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025-2030**


**Visi :**

***“Jayawijaya Maju, Mandiri, dan Bermartabat  
Berbasis Kearifan Lokal”***

Penjelasan Visi :

**Jayawijaya Maju** berarti komitmen pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan di semua bidang secara adil dan menyeluruh yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan global, serta layanan kesehatan yang merata dan berbasis masyarakat. Di bidang ekonomi, kemajuan terlihat dari tumbuhnya usaha-usaha kreatif dan terbukanya akses pasar bagi produk lokal.

**Jayawijaya Mandiri** berarti membangun kekuatan dari dalam daerah. Pemerintah berkomitmen memperkuat sumber daya manusia, lembaga lokal, dan ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada pihak luar. Kemandirian ini diwujudkan lewat pengelolaan sumber daya alam yang bijak, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan. Jayawijaya Mandiri adalah cita-cita untuk



menjadi daerah yang kuat dengan potensi sendiri, namun tetap terbuka untuk kerja sama yang bermanfaat.

**Bermartabat** menandakan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat. Martabat juga berarti menghormati hak-hak masyarakat, menjaga integritas pelayanan publik, dan menciptakan ruang partisipasi yang adil bagi semua kelompok. Jayawijaya Bermartabat adalah wujud dari pemerintahan yang tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga secara moral dan sosial.

**Jayawijaya Berbasis Kearifan Lokal** berarti pembangunan dijalankan dengan menghargai budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat pegunungan tengah Papua. Pemerintah daerah menjadikan kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan arah kebijakan. Setiap program dirancang agar sesuai dengan struktur sosial, cara hidup, dan pengetahuan tradisional masyarakat. Pendekatan ini memperkuat identitas daerah, menjaga warisan budaya, dan memastikan pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

## **Misi :**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menetapkan enam misi strategis yang menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan:

### **❖ Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas**

Pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. Pendidikan diarahkan agar relevan dengan kebutuhan lokal dan mampu membentuk generasi yang cerdas dan berdaya saing. Layanan kesehatan difokuskan pada pemerataan, pencegahan, dan pendekatan berbasis komunitas, dengan dukungan tenaga dan fasilitas yang memadai.

### **❖ Membangun Perekonomian yang Kreatif, Inovatif, dan Maju Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam Lokal dan Agribisnis secara Berkelanjutan**

Pembangunan ekonomi difokuskan pada penguatan sektor produktif yang berbasis potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan. Pemerintah mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

❖ **Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Adaptif, Responsif, dan Partisipatif**

Ketahanan sosial dan budaya dibangun melalui pelestarian nilai-nilai lokal, penguatan solidaritas antarwarga, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah mendorong masyarakat agar tetap tangguh menghadapi perubahan, namun tetap menjaga identitas dan tradisi yang hidup.


❖ **Meningkatkan Kondusifitas Daerah yang Aman dan Tentram bagi Terselenggaranya Pemerintahan dan Aktivitas Masyarakat**

Stabilitas keamanan menjadi landasan bagi kelancaran pemerintahan dan kehidupan sosial. Pemerintah bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban, mencegah konflik, dan menciptakan suasana yang mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.

❖ **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Adaptif**

Pemerintahan diarahkan agar terbuka, bertanggung jawab, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Sistem birokrasi diperbaiki agar efisien dan melayani, dengan pemanfaatan teknologi, pengawasan publik, dan peningkatan kapasitas aparatur.

❖ **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Lingkungan yang Berkelanjutan**



Pembangunan infrastruktur difokuskan pada akses jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. Pemerintah juga menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan pembangunan yang ramah alam dan berorientasi jangka panjang.



## BUPATI



**ATENIUS MURIP, SH.,MH**



## **WAKIL BUPATI**



**RONNY ELOPERE, S.IP.,M.KP**

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**ARKLAUS WINDESI, S.Sos.,M.Si**

# Sambutan

## Bupati Jayawijaya

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buku Publikasi Statistik Sektoral Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025. Publikasi ini merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data, terukur, dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan data yang akurat, relevan, dan dapat diverifikasi. Statistik sektoral bukan sekadar angka, melainkan representasi nyata dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus dibaca secara cermat dan dijadikan dasar dalam menetapkan arah kebijakan. Tanpa data, pembangunan kehilangan arah. Dengan data, kebijakan menjadi tajam, terarah, dan berdampak.

Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan visi “*Jayawijaya Maju, Mandiri, dan Bermartabat Berbasis Kearifan Lokal*” sebagai arah pembangunan jangka menengah. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan sinergi antara perencanaan strategis dan pemanfaatan data sektoral yang komprehensif. Publikasi ini hadir sebagai instrumen pendukung dalam memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan alokasi sumber daya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan wilayah. Seluruh perangkat daerah, mitra pembangunan,

dan pemangku kepentingan dihimbau agar menjadikan publikasi ini sebagai referensi utama dalam menyusun rencana kerja, menetapkan indikator kinerja, dan mengevaluasi capaian pembangunan.

Partisipasi publik dalam pembangunan perlu diperkuat melalui peningkatan literasi statistik. Masyarakat yang memahami data akan lebih siap terlibat secara aktif, kritis, dan konstruktif dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah terbuka terhadap masukan, koreksi, dan kolaborasi, selama semuanya berlandaskan fakta dan kepentingan bersama. Penghargaan disampaikan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini menjadi pijakan bersama dalam membangun Jayawijaya yang lebih terarah, tangguh, dan bermartabat.

Wamena, 13 Oktober 2025

**BUPATI JAYAWIJAYA**

**CAP/TTD**

**ATENIUS MURIP, SH.,MH**



## **Sambutan**

# **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

Buku Publikasi Statistik Sektor Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat sistem informasi pembangunan daerah yang berbasis data, terbuka, dan terintegrasi. Kehadiran publikasi ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan lintas sektor terhadap data yang akurat, relevan, dan mudah diakses, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi data antar perangkat daerah, dengan pendekatan yang mengutamakan validitas, konsistensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan perencanaan. Setiap angka yang tercantum bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di Jayawijaya. Data yang tersaji dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas, dan mengevaluasi capaian pembangunan secara objektif.

Publikasi ini juga dimaksudkan untuk mendorong budaya kerja berbasis bukti di lingkungan birokrasi, serta memperkuat literasi data di kalangan masyarakat. Pemanfaatan data yang tepat akan menghasilkan

kebijakan yang lebih tajam, program yang lebih efektif, dan partisipasi publik yang lebih konstruktif. Dalam konteks ini, statistik sektoral bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen demokrasi informasi yang mendukung keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan.

Penghargaan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah, mitra kerja, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya atas kontribusi dan kolaborasi dalam proses penyusunan. Semoga publikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan, dan menjadi bagian dari praktik baik dalam membangun Jayawijaya yang lebih maju, mandiri, dan bermartabat.

Wamena, 13 Oktober 2025

**Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika  
Kabupaten Jayawijaya,**



**Arklus Windesi, S.Sos., M. Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 197108061997121001**

## **Ringkasan Eksekutif**


Buku Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025 merupakan publikasi yang disusun sebagai upaya penyediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Publikasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang berbasis data serta implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Statistik sektoral ini memuat berbagai indikator yang mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai yang tersaji pada kepmendagri dan data dalam modul E-Walidata. Data yang disajikan bersumber dari hasil kompilasi dan koordinasi dengan perangkat daerah.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan capaian kinerja perangkat daerah di Kabupaten Jayawijaya, sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah dan dasar perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Diharapkan publikasi Statistik Sektoral Tahun 2025 dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik untuk mewujudkan Satu Data Daerah serta dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat sebagai






referensi resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Publikasi ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayawijaya. Tujuan utama penyusunan adalah menyediakan data sektoral yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan cakupan yang luas, buku ini menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Data yang dihimpun mencakup 14 bab utama yang meliputi aspek pemerintahan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kepemudaan, tenaga kerja, perdagangan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, penanggulangan bencana, serta pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan. Struktur ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi objektif Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2023, sekaligus menjadi landasan untuk merumuskan strategi pembangunan menghadapi tantangan tahun 2025.


Temuan utama menunjukkan bahwa struktur kelembagaan pemerintahan telah berjalan, namun koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat. Layanan pencatatan sipil semakin tertata, tetapi distribusi layanan masih terkendala kondisi geografis. Pendidikan dan kesehatan menunjukkan capaian yang cukup baik, namun



kualitas tenaga pendidik dan tenaga medis perlu ditingkatkan. UMKM dan koperasi menjadi motor ekonomi lokal, tetapi akses pasar dan permodalan masih terbatas. Perikanan air tawar memiliki potensi besar, namun kelembagaan dan teknologi budidaya perlu penguatan. Pengendalian izin usaha dan pelestarian lingkungan hidup menjadi tantangan utama. Infrastruktur dan transportasi masih menghadapi keterbatasan akses antar distrik yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Perpustakaan umum memiliki koleksi besar, tetapi distribusi koleksi dan tenaga pustakawan belum merata.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia. Diskominfo berperan sentral dalam membangun sistem informasi yang terintegrasi antar-OPD, sehingga koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif. Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, akan memperkuat kemampuan birokrasi dalam mengelola data sektoral. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbasis pada intuisi, tetapi pada data yang valid dan dapat diverifikasi.

Kedua, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan harus ditopang oleh sistem informasi yang mampu menjangkau wilayah terpencil. Diskominfo dapat membangun infrastruktur digital yang memungkinkan sekolah dan fasilitas kesehatan di kampung-kampung terhubung dengan pusat data kabupaten. Dengan adanya jaringan komunikasi yang lebih baik, distribusi tenaga




pendidik dan tenaga medis dapat dipantau secara real-time, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ketiga, pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM dan koperasi memerlukan dukungan teknologi digital. Diskominfo dapat memfasilitasi platform daring yang menghubungkan pelaku usaha kecil dengan pasar yang lebih luas, sekaligus menyediakan akses informasi mengenai permodalan dan pelatihan vokasi. Dengan digitalisasi rantai pasok, UMKM Jayawijaya tidak hanya bergantung pada pasar lokal, tetapi dapat memperluas jangkauan hingga ke luar daerah. Hal ini akan memperkuat daya saing ekonomi masyarakat pegunungan.

Keempat, ketahanan pangan berbasis perikanan air tawar harus diperkuat dengan dukungan data yang akurat mengenai produksi, distribusi, dan nilai tukar pembudidaya. Diskominfo dapat mengembangkan sistem monitoring digital yang mencatat aktivitas budidaya, sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran menyeluruh tentang kondisi pangan. Dengan teknologi ini, kebijakan intervensi seperti bantuan sarana produksi atau pelatihan teknis dapat diarahkan secara lebih tepat kepada kelompok pembudidaya yang membutuhkan.

Kelima, pengendalian lingkungan hidup menuntut adanya sistem informasi yang transparan mengenai izin usaha dan kondisi ekosistem. Diskominfo dapat membangun portal data lingkungan yang memuat informasi izin, luasan lahan, serta indikator kinerja



pengelolaan lingkungan. Dengan keterbukaan data, masyarakat dapat ikut mengawasi aktivitas usaha, sementara pemerintah daerah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menegakkan regulasi berbasis keberlanjutan.

Keenam, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar distrik harus disertai dengan penguatan jaringan komunikasi digital. Diskominfo berperan dalam memperluas akses internet dan layanan telekomunikasi, sehingga mobilitas masyarakat tidak hanya bergantung pada transportasi fisik, tetapi juga pada konektivitas digital. Dengan adanya jaringan yang lebih merata, distribusi barang dan layanan publik dapat dipercepat, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan daring.

Ketujuh, literasi dan pengelolaan arsip digital menjadi fondasi penting bagi pembangunan berbasis pengetahuan. Diskominfo perlu mempercepat digitalisasi arsip pemerintahan dan koleksi perpustakaan, serta memperluas layanan berbasis inklusi sosial. Dengan sistem perpustakaan digital, masyarakat Jayawijaya dapat mengakses bahan bacaan tanpa batas geografis, sementara arsip pemerintahan yang terdigitalisasi akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi.

Publikasi ini menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Jayawijaya harus berbasis pada data yang valid dan terpercaya. Dengan analisis sektoral yang komprehensif, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan

inklusif. Tantangan 2025 menuntut strategi yang terintegrasi antara penguatan kelembagaan, pemerataan layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, pembangunan infrastruktur, serta transformasi digital. Buku ini diharapkan menjadi referensi utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya Jayawijaya yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Wamena, 13 Oktober 2025

**Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika  
Kabupaten Jayawijaya,**



**Arklaus Windesi, S.Sos., M. Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 197108061997121001**

# Daftar Isi

Sampul Depan .....	i
LAMBANG KABUPATEN JAYAWIJAYA .....	ii
VISI DAN MISI KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025-2030 .....	iii
BUPATI.....	viii
WAKIL BUPATI.....	ix
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	x
Sambutan Bupati Jayawijaya .....	xi
Sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ..	xiii
Ringkasan Eksekutif .....	xv
Daftar Isi .....	xxi
Daftar Tabel .....	xxvii
Daftar Gambar .....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN .....	34
1.1. Latar belakang .....	34
1.2. Tujuan Publikasi .....	36
1.3. Dasar hukum dan kebijakan statistik sektoral .	38
1.4. Peran Diskominfo dalam pengelolaan data sektoral .....	40
1.5. Metodologi pengumpulan dan pengolahan data .....	42
BAB II PROFIL WILAYAH .....	45
2.1. Sejarah Kabupaten Jayawijaya.....	45

2.2. Letak geografis dan batas wilayah.....	48
2.3. Topografi .....	49
2.4. Jumlah distrik dan kampung .....	52
2.5. Kondisi iklim dan lingkungan.....	54
<b>BAB III PEMERINTAHAN.....</b>	<b>56</b>
3.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya .....	56
3.2. Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya .....	78
3.3. Inspektorat Kabupaten Jayawijaya .....	91
3.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ..	98
3.5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	108
3.6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	118
3.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	125
<b>BAB IV KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....</b>	<b>136</b>
4.1. Dokumen Data Kependudukan.....	137
4.2. Kerja Sama dan Supervisi Administrasi Kependudukan .....	139
4.3. Pengelolaan Dokumen dan Blangko.....	141
4.4. Dokumen Tata Cara Adminduk.....	143
4.5. Laporan Komunikasi, Sosialisasi dan Edukasi .....	144



4.6. Laporan Bimbingan Teknis dan Fasilitas .....	146
4.7. Laporan Koordinasi Antar Lembaga .....	148
4.8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelayanan ...	149
4.9. Laporan Pencatatan dan Penyajian Data .....	151
4.10. Layanan Pencatatan Sipil .....	152
4.11. Data Pemangku Kepentingan dan Fasilitas	154
4.12. Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan .....	156
<b>BAB V PENDIDIKAN.....</b>	<b>159</b>
5.1. Jumlah sekolah, Guru, dan Murid (SD, SMP, SMA/SMK) .....	159
5.2. Capaian Program Pendidikan dan Pelestarian Bahasan Daerah.....	162
<b>BAB VI KESEHATAN .....</b>	<b>166</b>
6.1. Fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, posyandu) .....	166
6.2. Tenaga medis dan paramedis .....	169
6.3. Peralatan Kesehatan .....	172
6.4. Ruang Kesehatan .....	175
6.5. Tenaga Kesehatan .....	180
6.6. Kesehatan Masyarakat .....	185
6.7. Rumah Sakit Umum Daerah .....	197
<b>BAB VII SOSIAL, BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN .....</b>	<b>209</b>

7.1. Dinas Sosial.....	209
7.2. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA..	222
BAB VIII KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA .....	238
8.1. Organisasi dan Sentra Pemuda Kabupaten Jayawijaya .....	240
8.2. Kegiatan Kepramukaan, Pemuda Berprestasi dan Atlit.....	242
8.3. Klub Olahraga.....	244
8.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Olah Raga ...	246
BAB IX TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .....	250
9.1. Profil Tenaga Kerja dan Mobilitas .....	250
9.2. Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan .....	253
9.3. Regulasi dan Dokumen Ketenaga Kerjaan ...	255
9.4. Profil Perusahaan dan Kepatuhan .....	257
9.5. Pelatihan dan Vokasi .....	259
9.6. Perkoperasian.....	262
9.7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	265
9.8. Perdagangan dan Dsitribusi .....	273
9.9. Sarana Perdagangan, Industri, Tenaga Kerja, dan Pelatihan.....	283
BAB X KETAHANAN PANGAN.....	291
10.1. Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya.....	291

10.2. Informasi Sarana Perikanan .....	294
10.3. Pengeluaran Pembudidayaan.....	296
10.4. Nilai Tukar Pembudidayaan Air Tawar .....	297
10.5. Kelembagaan dan Produksi Perikanan Air Tawar Kabupaten Jayawijaya .....	299
<b>BAB XI LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>307</b>
11.1. Laporan Dinas Lingkungan Hidup.....	307
11.2. Luasan Lingkungan .....	311
11.3. Jumlah Izin Usaha .....	314
11.4. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup .....	316
11.5. Nilai Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya .....	318
<b>BAB XII INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI</b>	<b>321</b>
12.1. Dinas Perhubungan .....	321
<b>BAB XIII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN .....</b>	<b>326</b>
13.1. Aparat Pamong Praja dan Pemadam .....	326
13.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	329
13.3. Penguatan Kolaborasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jayawijaya .....	332
13.4. Evaluasi Sarana dan Prasarana Satpol PP	336
13.5. Kasus dan Korban Bencana .....	339

13.6. Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Kasus .....	342
13.7. Laporan Satpol PP .....	345
<b>BAB XIV PENGELOLAAN ARSIP DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH .....</b>	<b>349</b>
14.1. Jumlah Perpustakaan .....	350
14.2. Kapasitas SDM Perpustakaan dan Kelembagaan Literasi Daerah .....	352
14.3. Jumlah Koleksi Arsip Perpustakaan .....	354
14.4. Partisipasi Pemustaka dan Distribusi Koleksi .....	356
<b>BAB XV PENUTUP .....</b>	<b>359</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Distrik dan Kampung .....	53
Tabel 2. Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya .....	58
Tabel 3. Komisi B DPRD Kabupaten Jayawijaya .....	60
Tabel 4. Komisi C DPRD Kabupaten Jayawijaya .....	62
Tabel 5. Badan Musyawarah DPRD .....	64
Tabel 6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD .....	67
Tabel 7. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jayawijaya .....	69
Tabel 8. Capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya dalam Publikasi, Kerja Sama, dan Konsultasi Publik Tahun 2024 .....	103
Tabel 9. Penyaringan Usulan Pembangunan Tahun 2024 .....	107
Tabel 10. Jumlah BLUD .....	116
Tabel 11. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2024 .....	117
Tabel 12. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid 2025 .....	162
Tabel 13. Capaian Program Pendidikan dan Pelestarian Bahasan Daerah .....	163
Tabel 14. Jumlah Fasilitas Kesehatan .....	168
Tabel 15. Sarana Perdagangan, Industri, Tenaga Kerja, dan Pelatihan .....	284

## Daftar Gambar

Gambar 1. Capaian DPRD dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan Tahun 2024.....	71
Gambar 2. Capaian DPRD dalam Fungsi Pengawasan dan Kunjungan Kerja Tahun 2024 .....	74
Gambar 3. Capaian DPRD dalam Fungsi Sosialisasi dan Dukungan Keahlian Tahun 2024 .....	76
Gambar 4. Penataan Kelembagaan dan Administrasi ..	78
Gambar 5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.....	80
Gambar 6. Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah .....	82
Gambar 7. Pengelolaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Masyarakat .....	84
Gambar 8. Produk Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum .....	86
Gambar 9. Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.	88
Gambar 10. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90
Gambar 11. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	92
Gambar 12. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	93
Gambar 13. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 .....	95
Gambar 14. Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024 .....	96
Gambar 15. Perencanaan, Evaluasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2024 .....	99
Gambar 16. Forum Perencanaan dan Konsultasi Publik Tahun 2024.....	101
Gambar 17. Capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya dalam Asistensi, Monitoring, dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024.....	105

Gambar 18. Capaian BPKAD Kabupaten Jayawijaya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 ... 109

Gambar 19. Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024..... 112

Gambar 20. Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui Program Pembinaan Tahun 2024.... 115

Gambar 21. Capaian Pengelolaan Kebijakan dan Administrasi Kepegawaian Tahun 2024..... 119

Gambar 22. Capaian Evaluasi dan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024 ..... 121

Gambar 23. Capaian Penguatan Kapasitas ASN ..... 123

Gambar 24. Capaian Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024–2025 ..... 126

Gambar 25. Capaian Program Strategis Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi dan Kepemudaan Tahun 2024–2025..... 128

Gambar 26. Jumlah Sarana dan Kelengkapan Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024-2025..... 130

Gambar 27. Jumlah Dokumen dan Laporan Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024–2025..... 133

Gambar 28. Capaian Administrasi Kependudukan ..... 138

Gambar 29. Capaian Kerjasama dan Supervisi..... 140

Gambar 30. Capaian Pengelolaan Dokumen dan Blangko..... 141

Gambar 31. Jumlah Dokumen Tata Cara Adminduk .. 143

Gambar 32. Jumlah Laporan Komunikasi, Sosialisasi dan Edukasi..... 145



Gambar 33. Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Fasilitas.....	147
Gambar 34. Jumlah Laporan Koordinasi Antar Lembaga .....	148
Gambar 35. Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pelayanan .....	150
Gambar 36. Jumlah laporan Pencatatan dan Penyajian Data .....	152
Gambar 37. Data Pemangku Kepentingan dan Fasilitas .....	154
Gambar 38. Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan .....	157
Gambar 39. Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis....	169
Gambar 40. Data Jumlah Peralatan Kesehatan .....	172
Gambar 41. Jumlah Ruang Kesehatan.....	177
Gambar 42. Data Jumlah Tenaga Kesehatan.....	182
Gambar 43. Pelayanan dan Perawatan Bayi .....	186
Gambar 44. Jumlah Angka Kematian Ibu .....	187
Gambar 45. Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB).....	189
Gambar 46. Angka Kelahiran Bayi Menurut Puskesmas .....	190
Gambar 47. Jumlah Balita Ditimbang Menurut Puskesmas .....	192
Gambar 48. Jumlah Pelayanan Bayi/Balita dan Penanganan Stunting .....	194
Gambar 49. Jumlah Pelayanan Bayi/Balita dan Penanganan Stunting Menurut Puskesmas.....	196
Gambar 50. SDM Kesehatan Tenaga Administrasi ....	201
Gambar 51. SDM Tenaga IT.....	203

Gambar 52. SDM Tenaga Kebidanan/Perawat..... 204

Gambar 53. SDM Tenaga Medis Dokter..... 207

Gambar 54. Kelompok Rentan ..... 210

Gambar 55. Sebaran Keluarga KAT dan Lokasi  
Pembinaan Sosial di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024  
..... 213

Gambar 56. Capaian Program Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga  
Berencana ..... 215

Gambar 57. Capaian Kegiatan Strategis Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan  
Keluarga Berencana Tahun 2024 ..... 218

Gambar 58. Capaian Program Pengasuhan Anak dan  
Pelatihan Kader Perlindungan Tahun 2024 ..... 220

Gambar 59. Proporsi Destinasi dan Kawasan Pariwisata  
Kabupaten Jayawijaya yang Menerapkan Prinsip  
Pariwisata Berkelanjutan ..... 224

Gambar 60. Capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
..... 226

Gambar 61. Jumlah Lembaga Budaya dan Pariwisata  
yang Dibina dan Ditingkatkan di Kabupaten Jayawijaya  
Tahun 2024..... 229

Gambar 62. Distribusi Objek Budaya dan Pariwisata yang  
Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan di  
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 ..... 231

Gambar 63. Distribusi Sumber Daya Budaya dan  
Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024  
Berdasarkan Penghargaan, Pelatihan, dan  
Pemberdayaan ..... 234

Gambar 64. Sarana dan Prasarana Pariwisata .....	235
Gambar 65. Jumlah Organisasi dan Sentra Pemuda .	240
Gambar 66. Kepramukaan, Pemuda berprestasi dan Atlit .....	242
Gambar 67. Jumlah Klum Olah Raga .....	244
Gambar 68. Kondisi Sarana Olahraga .....	247
Gambar 69. Jumlah Tenaga Kerja dan Mobilitasnya ..	250
Gambar 70. Hubungan Indistrial dan Penyelesaian Perselisihan .....	253
Gambar 71. Regulasi dan Kepatuhan Perusahaan ....	256
Gambar 72. Profil Perusahaan dan Kepatuhan .....	258
Gambar 73. Pelatihan dan Vokasi .....	260
Gambar 74. Koperasi.....	262
Gambar 75. Jumlah UMKM dan Legalitasnya .....	265
Gambar 76. Transformasi Usaha Mikro ke Usaha Kecil .....	267
Gambar 77. Jumlah Fasilitas dan Penguatan Kapasitas Usaha Mikro.....	269
Gambar 78. Aksesibilitas dan Produktifitas Usaha Mikro .....	271
Gambar 79. Infrastruktur dan Sarana Distribusi.....	273
Gambar 80. Ritel Modern dan Perizinan OSS .....	275
Gambar 81. Pelaku dan Pengelola Distribusi .....	278
Gambar 82. Ekspor dan Pembinaan Pelaku Usaha ...	280
Gambar 83. Perizinan dan Verifikasi Industri.....	282
Gambar 84. Dokumen Dinas Perikanan .....	291
Gambar 85. Informasi Sarana Perikanan.....	294
Gambar 86. Jumlah Pengeluaran Pembudidayaan ....	296
Gambar 87. Nilai Tukar Pembudidayaan Air Tawar....	299

Gambar 88. Balai Benih Ikan .....	300
Gambar 89. Pembenihan Ikan Rakyat .....	301
Gambar 90. Budidaya Air Tawar .....	303
Gambar 91. Penangkapan Ikan Perairan Umum .....	305
Gambar 920. Jumlah Laporan Dinas Lingkungan Hidup .....	309
Gambar 931. Luasan Lingkungan .....	312
Gambar 942. Jumlah dokumen Izin Usaha .....	314
Gambar 953. Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup .....	316
Gambar 964. Nilai Indikator Dinas Lingkungan Hidup	318
Gambar 975. Data Sarana Perhubungan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 .....	322
Gambar 98. Jumlah Aparat Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .....	326
Gambar 99. Kepemilikan Sertifikat Aparatur Pemadam Kebakaran .....	330
Gambar 100. Dokumen Kerjasama Penanggulangan Bencana .....	333
Gambar 101. Sarana dan Prasarana Satpol-PP .....	336
Gambar 102. Kasus dan Korban Bencana .....	339
Gambar 103. Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Kasus .....	342
Gambar 104. Jumlah Laporan Satpol PP .....	345
Gambar 105. Jumlah Perpustakaan .....	350
Gambar 106. Jumlah Pustakawan .....	352
Gambar 107. Jumlah Koleksi Arsip Perpustakaan .....	354
Gambar 108. Daftar Kunjungan Perpustakaan .....	356

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**



*Ilustrasi Generatif*

Pembangunan daerah merupakan proses yang menuntut ketepatan arah, kejelasan prioritas, dan konsistensi pelaksanaan. Dalam konteks otonomi daerah, setiap kebijakan publik harus dirancang berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap kondisi objektif wilayah. Pemahaman tersebut tidak dapat dibangun di atas persepsi atau intuisi semata, melainkan harus ditopang oleh data yang sah, terstruktur, dan dapat diverifikasi. Kabupaten Jayawijaya memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang khas. Topografi pegunungan, keberagaman etnis, serta dinamika sosial yang terus berkembang menghadirkan tantangan tersendiri dalam perumusan kebijakan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan pembangunan yang bersifat generik berisiko mengabaikan konteks lokal.



Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi statistik yang mampu menangkap realitas daerah secara menyeluruh dan menyajikannya dalam bentuk yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketersediaan data sektoral yang terintegrasi menjadi bagian penting dari arsitektur tata kelola pembangunan. Data yang akurat memungkinkan perumusan program yang lebih tepat sasaran, alokasi sumber daya yang lebih efisien, serta evaluasi kinerja yang lebih objektif. Tanpa dukungan data yang memadai, proses perencanaan berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat atau tidak sejalan dengan kapasitas wilayah.


Dalam kerangka regulasi nasional, penyelenggaraan data pemerintah telah diarahkan untuk memenuhi prinsip interoperabilitas, standar metadata, dan keterpaduan antarinstitusi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan bahwa pengelolaan data bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas publik. Dengan demikian, publikasi statistik sektoral tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap data tidak terbatas pada lingkup pemerintahan. Akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum memerlukan akses terhadap informasi yang kredibel untuk mendukung riset, advokasi, investasi, dan pengawasan publik. Ketika data tersedia secara terbuka dan dapat dipercaya, ruang partisipasi publik dalam pembangunan menjadi lebih luas dan bermakna.

Penyusunan Buku Publikasi Statistik Sektorial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem data daerah yang kokoh dan berkelanjutan. Publikasi ini disusun untuk menghadirkan gambaran menyeluruh tentang kondisi sektoral di Jayawijaya, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga infrastruktur dan lingkungan. Setiap data yang disajikan mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat dan menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih kontekstual, terukur, dan berorientasi pada hasil.

## **1.2. Tujuan Publikasi**

Penyusunan Buku Publikasi Statistik Sektorial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025 dilandasi oleh kebutuhan untuk menghadirkan




sistem informasi pembangunan daerah yang mampu menjawab tantangan perencanaan berbasis bukti secara menyeluruh. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel, kehadiran data sektoral yang terstruktur menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan intervensi pembangunan dirancang secara rasional, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan utama dari penyusunan publikasi ini mencakup hal-hal berikut :


- (1) Penyediaan informasi statistik sektoral yang sahih dan terverifikasi, guna mendukung proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi pembangunan daerah secara sistematis.
- (2) Penguatan sistem informasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah, melalui konsolidasi data yang konsisten, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Peningkatan akses terhadap data publik yang kredibel, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi informasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.



- 
- (4) Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan data sektoral, melalui penerapan standar teknis dan metodologis yang mendukung interoperabilitas dan efisiensi pengolahan data.
  - (5) Penyediaan referensi teknis untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RPJMD, Renstra, RKPD, dan dokumen kebijakan sektoral lainnya.
  - (6) Penyelarasan arah pembangunan dengan kondisi objektif wilayah, melalui pemanfaatan data yang relevan terhadap isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, sosial budaya, dan infrastruktur.

### **1.3. Dasar hukum dan kebijakan statistik sektoral**

- (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
  - (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
  - (7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
  - (8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - (9) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - (10) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
  - (11) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah.
  - (12) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
  - (13) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- (15) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya.
- (16) Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- (17) Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 49 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Jayawijaya.

#### 1.4. Peran Diskominfo dalam pengelolaan data sektoral



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya memiliki mandat strategis dalam membangun ekosistem data daerah yang terintegrasi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penyelenggaraan

pemerintahan berbasis bukti, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai simpul koordinasi, fasilitator teknis, dan pengendali mutu terhadap proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sektoral lintas perangkat daerah.

Sebagai pengampu urusan statistik sektoral dan pengelolaan sistem informasi daerah, Diskominfo menjalankan fungsi penguatan tata kelola data melalui beberapa aspek kunci :

- a. Koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka memastikan konsistensi metadata, klasifikasi variabel, dan kesesuaian format pelaporan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- b. Penyusunan standar teknis dan prosedur operasional untuk menjamin interoperabilitas data sektoral, baik dalam bentuk numerik, spasial, maupun naratif.
- c. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi sektoral yang mendukung integrasi data lintas bidang, serta memfasilitasi akses publik terhadap informasi pembangunan daerah.
- d. Validasi dan verifikasi data sektoral sebelum dipublikasikan, guna memastikan akurasi, kelengkapan, dan kesesuaian dengan kebutuhan perencanaan dan evaluasi kebijakan.
- e. Penyusunan publikasi statistik sektoral tahunan sebagai bentuk dokumentasi resmi dan referensi

teknis bagi pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

- f. Fasilitasi literasi data dan peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah, melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengelolaan data yang baik.

Dalam menjalankan peran tersebut, Diskominfo tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mendorong terwujudnya budaya kerja berbasis data di lingkungan birokrasi. Pengelolaan data sektoral diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan pendekatan yang sistematis dan adaptif, Diskominfo berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi Kabupaten Jayawijaya sebagai wilayah yang maju, mandiri, dan bermartabat berbasis kearifan lokal, melalui pengelolaan data yang kredibel, relevan, dan berkelanjutan.

## **1.5. Metodologi pengumpulan dan pengolahan data**

### **❖ Metode Penelitian dan Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Publikasi Statistik Sektorial Kabupaten Jayawijaya 2025 adalah metode kompilatif-kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui kombinasi survei primer, kompilasi produk administrasi, serta pemanfaatan sumber data alternatif. Survei primer dilakukan untuk indikator yang belum tercakup dalam sistem administrasi, menggunakan instrumen berupa kuesioner, formulir, dan aplikasi digital yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Kompilasi produk administrasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi, laporan tahunan, dan sistem informasi perangkat daerah. Sumber data alternatif seperti citra satelit dan sensor digunakan untuk melengkapi indikator spasial dan geografis.

#### ❖ **Metode Perencanaan Statistik Sektorial**

Tahap perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan data berdasarkan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), indikator kinerja utama perangkat daerah, serta indikator nasional seperti SDGs. Prioritas pengumpulan data ditetapkan berdasarkan urgensi, ketersediaan sumber daya, dan dampak terhadap pengambilan keputusan. Rencana kerja tahunan disusun secara formal, memuat jadwal, metode, instrumen, target capaian, dan pembagian peran

antar pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan antara Sekretaris SDI,

Walidata, Produsen Data, dan Pembina Data, termasuk konsultasi teknis dengan BPS untuk memastikan kesesuaian dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

### ❖ **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan budaya Jayawijaya. Survei statistik dilakukan melalui wawancara langsung, observasi, atau pengisian kuesioner. Kompilasi produk administrasi dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dari perangkat daerah dan instansi lain. Untuk wilayah sulit akses, digunakan enumerator lokal dan moda transportasi alternatif. Pengendalian mutu lapangan dilakukan melalui supervisi, pemeriksaan harian, dan dokumentasi proses sebagai bagian dari *audit trail*.

### ❖ **Metode Pemeriksaan, Verifikasi, dan Validasi Data**

Tahap pemeriksaan dilakukan oleh produsen data untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi format. Verifikasi dilakukan oleh walidata dengan membandingkan data terhadap sumber asli

dan dokumen pendukung. Validasi dilakukan oleh walidata dengan pembinaan teknis dari BPS, mencakup uji konsistensi internal dan eksternal, serta pemenuhan dimensi kualitas: akurasi, relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan, dan koherensi. Dokumentasi proses dilakukan untuk mencatat temuan, langkah perbaikan, dan hasil akhir validasi. Data yang telah lolos pemeriksaan, verifikasi, dan validasi kemudian disahkan oleh pejabat berwenang sebagai data resmi Kabupaten Jayawijaya.

#### ❖ **Metode Pengolahan dan Diseminasi Data**

Data yang telah disahkan diolah menggunakan perangkat lunak statistik dan spreadsheet terstandar. Hasil pengolahan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi analitis, serta peta tematik untuk indikator spasial. Diseminasi dilakukan melalui publikasi cetak dan digital, dengan tujuan mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

## **BAB II**

### **PROFIL WILAYAH**

#### **2.1. Sejarah Kabupaten Jayawijaya**






Sejarah terbentuknya Kabupaten Jayawijaya memiliki keterkaitan erat dengan proses masuknya ajaran Kristen di wilayah pegunungan tengah Papua. Sebelum dekade 1950-an, kawasan ini berada dalam kondisi terisolasi dari dunia luar. Perubahan signifikan mulai terjadi setelah

ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh Richard Archbold dari American Museum of Natural History mengamati keberadaan sebuah lembah hijau luas dari udara pada tanggal 23 Juni 1938. Pengamatan tersebut menjadi titik awal terbukanya akses menuju Lembah Baliem.

Langkah eksplorasi berlanjut melalui tim ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Teerink dan Letnan Van Areken, yang mendarat di Danau Habema dan melakukan perjalanan darat menuju Lembah Baliem melalui jalur Lembah Ibele. Di lokasi tersebut, tim mendirikan basecamp sebagai pusat kegiatan eksplorasi lanjutan.



Pada tanggal 20 April 1954, rombongan misionaris asal Amerika Serikat, termasuk Dr. Myron Bromley, tiba di Lembah Baliem menggunakan pesawat kecil yang mendarat di Sungai Baliem, tepatnya di wilayah Desa Minimo. Tujuan utama kedatangan mereka adalah memperkenalkan ajaran Kristen kepada masyarakat suku Dani. Lokasi pertama pelayanan misionaris ditetapkan di Hitigima, yang kemudian menjadi titik awal pembangunan landasan udara. Dalam kurun waktu tujuh bulan, landasan pertama berhasil dibangun. Selanjutnya, ditemukan lokasi yang lebih strategis di perbatasan wilayah Suku Mukoko, yang kemudian dikembangkan menjadi landasan udara Wamena.

Pada tahun 1958, Pemerintah Belanda mulai membangun struktur administrasi di sekitar landasan tersebut sebagai bagian dari perluasan kekuasaan kolonial. Namun, keberadaan pemerintahan Belanda tidak berlangsung lama. Melalui proses politik yang panjang, termasuk pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, wilayah Irian Barat resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan Belanda menghentikan aktivitasnya di wilayah tersebut.

Pembentukan Kabupaten Jayawijaya secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten di dalamnya. Perkembangan terbaru terjadi setelah pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, yang menetapkan Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari provinsi baru tersebut sekaligus sebagai pusat pemerintahan provinsi.

## 2.2. Letak geografis dan batas wilayah



Berdasarkan pada Undang-undang tersebut, Kabupaten Jayawijaya terletak pada garis meridian 137°12'-141°00' Bujur Timur dan 3°2'-5°12' Lintang Selatan yang memiliki daratan seluas 52.916 km<sup>2</sup>, merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Irian Barat (pada saat itu) yang wilayahnya tidak bersentuhan dengan bibir pantai.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Jayawijaya berbatasan dengan :


- (1) Sebelah Utara : Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Tolikara.
- (2) Sebelah Selatan : Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo.
- (3) Sebelah Barat : Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya.
- (4) Sebelah Timur : Kabupaten Yalimo

### 2.3. Topografi



Kabupaten Jayawijaya, yang secara geografis berada di kawasan Lembah Baliem, terletak di jantung Pegunungan Jayawijaya—salah satu gugusan pegunungan paling menonjol di wilayah tropis Asia-Pasifik. Kawasan ini dikenal luas karena keberadaan puncak-


puncak tinggi yang diselimuti salju abadi, meskipun berada di lintang rendah. Beberapa puncak yang paling menonjol antara lain Puncak Trikora dengan ketinggian sekitar 4.750 meter, Puncak Mandala sekitar 4.700 meter, dan Puncak Yamin yang



mencapai 4.595 meter di atas permukaan laut. Fenomena salju tropis ini telah lama menjadi objek perhatian bagi kalangan ilmuwan geografi, klimatologi, dan ekologi, serta menarik minat wisatawan yang mencari lanskap ekstrem dan unik.

Topografi wilayah ini ditandai oleh lereng-lereng pegunungan yang curam dan lembah-lembah sungai yang sempit, membentuk konfigurasi geomorfologi yang kompleks dan menantang. Cekungan lembah yang relatif luas hanya ditemukan di dua wilayah utama, yaitu Lembah Baliem bagian barat dan Lembah Baliem bagian timur, yang kini menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi di Wamena. Keberadaan cekungan ini memungkinkan terbentuknya permukiman dan pengembangan wilayah yang lebih intensif dibandingkan dengan zona-zona pegunungan di sekitarnya.

Dari sisi ekologi, wilayah dataran rendah di Jayawijaya didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang lebat dan kaya keanekaragaman hayati. Kondisi iklim yang lembap dan curah hujan tinggi mendukung pertumbuhan vegetasi primer yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem regional. Di zona elevasi menengah, antara 2.000 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut, berkembang ekosistem hutan pegunungan yang memiliki karakteristik berbeda, termasuk dominasi flora



beradaptasi terhadap suhu rendah dan kelembapan tinggi. Transisi vegetasi dari hutan tropis basah ke hutan iklim sedang menunjukkan gradien ekologis yang penting untuk studi konservasi dan perubahan iklim.

Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini juga menjadi laboratorium alami bagi penelitian biodiversitas, adaptasi ekosistem, dan interaksi manusia-lingkungan. Keunikan bentang alam dan kekayaan ekologis Jayawijaya memberikan kontribusi penting dalam pemetaan potensi kawasan konservasi, pengembangan ekowisata, serta perencanaan tata ruang berbasis lanskap.

## 2.4. Jumlah distrik dan kampung



Kabupaten Jayawijaya merupakan wilayah administratif yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan dengan pusat pemerintahan di Wamena. Berdasarkan data tahun 2025, konfigurasi wilayah ini terdiri atas 40 distrik, 328 kampung, dan 4 kelurahan, yang tersebar di kawasan

pegunungan tengah Papua. Luas wilayah mencapai 8.495,85 km<sup>2</sup>, mencerminkan tantangan geografis yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Distrik berfungsi sebagai unit koordinatif antara pemerintah kabupaten dan kampung-kampung yang berada di bawahnya. Setiap distrik memiliki karakteristik topografis dan sosial yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Jumlah kampung yang tinggi menunjukkan tingkat fragmentasi wilayah yang memerlukan sistem informasi dan tata kelola yang adaptif terhadap sebaran penduduk dan aksesibilitas geografis.

Keberadaan kelurahan di wilayah perkotaan menandai adanya konsentrasi aktivitas ekonomi dan administrasi yang lebih intensif, khususnya di sekitar Wamena. Struktur ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan penyusunan kebijakan sektoral yang berbasis wilayah.

**Tabel 1. Jumlah Distrik dan Kampung**

<i><b>Kategori</b></i>	<i><b>Jumlah</b></i>	<i><b>Keterangan</b></i>
<i><b>Distrik</b></i>	40	Unit pemerintahan setingkat kecamatan
<i><b>Kampung</b></i>	328	Wilayah administratif setingkat desa
<i><b>Kelurahan</b></i>	4	Hanya terdapat di wilayah perkotaan tertentu, seperti Wamena
<i><b>Luas Wilayah</b></i>	8.495,85 km <sup>2</sup>	Berdasarkan publikasi BPS Jayawijaya Tahun 2025
<i><b>Ibu Kota Kabupaten</b></i>	Wamena	Sekaligus menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan




## 2.5. Kondisi iklim dan lingkungan



Kabupaten Jayawijaya memiliki karakter iklim pegunungan tropis yang lembap dan kompleks, dipengaruhi oleh elevasi ekstrem, tutupan vegetasi, dan pola angin lokal. Suhu harian di wilayah lembah berkisar antara 14°C hingga 24°C, sementara di zona

ketinggian dapat turun drastis hingga mendekati titik beku. Curah hujan tahunan umumnya melebihi 2.000 mm, dengan kelembapan udara relatif tinggi yang sering mencapai di atas 80%. Fenomena kabut pagi dan siklus angin lokal memengaruhi visibilitas dan aktivitas transportasi udara, terutama di sekitar Wamena dan Lembah Baliem. Variasi topografi dan orientasi lereng menciptakan zona mikroklimat yang menghasilkan perbedaan suhu dan kelembapan antar wilayah yang berdekatan.



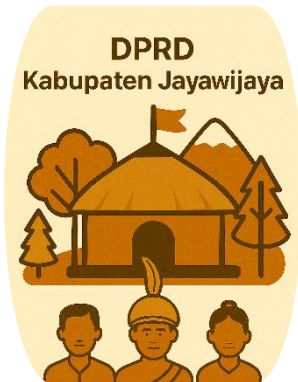
Lingkungan alam Jayawijaya didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis di dataran rendah dan hutan pegunungan di elevasi 2.000–2.500 meter. Sistem vegetasi ini berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan penyimpan karbon, serta menjadi habitat bagi spesies endemik dan langka. Daerah aliran sungai seperti Sungai Baliem dan Tariratu menopang kehidupan masyarakat dan pertanian lokal. Tekanan terhadap lingkungan mulai teridentifikasi, terutama terkait perubahan pola hujan, degradasi lahan, dan ancaman terhadap biodiversitas. Potensi ekowisata dan konservasi tinggi, khususnya di kawasan hutan primer dan zona transisi vegetasi yang memiliki nilai ekologis dan ilmiah penting. Kondisi iklim dan lingkungan Jayawijaya menjadi faktor penentu dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

## **BAB III**

### **PEMERINTAHAN**

#### **3.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya**

##### **3.1.1. Pimpinan DPRD Kabupaten Jayawijaya**



DPRD Kabupaten Jayawijaya merupakan lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi representasi masyarakat di tingkat kabupaten. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan publik, menetapkan peraturan daerah, menyusun anggaran, serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah. DPRD menjadi mitra kerja utama pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola yang baik.

Pada periode 2025–2030, DPRD Jayawijaya tetap beranggotakan 30 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Para anggota berasal dari berbagai latar belakang politik dan sosial, mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat Jayawijaya. Komposisi fraksi di DPRD menunjukkan dinamika politik lokal yang aktif,

dengan distribusi kursi yang mencerminkan hasil pemilu legislatif terakhir.

DPRD Jayawijaya menjalankan tiga fungsi utama:

- ❖ Legislasi : Menyusun dan menetapkan peraturan daerah bersama pemerintah kabupaten, termasuk regulasi yang mengatur sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan.
- ❖ Anggaran : Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengawasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- ❖ Pengawasan : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah, termasuk evaluasi program kerja OPD dan capaian indikator pembangunan.

Struktur pimpinan DPRD periode 2025–2030 telah ditetapkan melalui rapat paripurna dan berdasarkan perolehan suara partai politik. Pimpinan DPRD terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua, yang bertugas mengarahkan jalannya sidang, memimpin koordinasi antarfraksi, serta menjaga hubungan kelembagaan dengan eksekutif.

Pimpinan DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 2025–2030 adalah sebagai berikut:

- ❖ Ketua : Luki Wuka, S.Pi., M.Si
- ❖ Wakil Ketua II : Yulius Hubi

❖ Wakil Ketua II : Sem Hilapok, S.Sos., M.Si

Ketua DPRD memegang peran utama dalam memimpin lembaga, sementara dua Wakil Ketua II mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan dan menjaga dinamika politik internal. Struktur ini mencerminkan semangat kolaboratif antarfraksi dan komitmen untuk memperkuat tata kelola legislatif di Jayawijaya.

### 3.1.2. Susunan Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya

**Tabel 2. Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya**

No	Nama	Asal Fraksi (Partai)	Jabatan
1	Yusuf Huby, S.Hut., M.Si	GERINDRA	Ketua
2	Maximus Itlay	PERINDO	Wakil Ketua
3	Yonathan Tabuni	JAYAWIJAYA	Sekretaris
4	Agus Elopore, S.SIO	PERINDO	Anggota
5	Tab Tabuni, S.IP	PDIP	Anggota
6	Dinus Kenelak, S.AB, M.Si	DEMOKRAT	Anggota
7	Antonius Wetipo, S.IP	GARUDA	Anggota
8	Iberahim Elepore	BALIEM	Anggota
9	Agus Himan, S.Sos	JAYAWIJAYA	Anggota

Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya memiliki lingkup kerja yang berfokus pada bidang pemerintahan, hukum, dan aparatur. Komisi ini bertugas melakukan pembahasan, pengawasan, dan koordinasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah,

kelembagaan publik, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Tugas utama Komisi A meliputi :

❖ Pembahasan Kebijakan Pemerintahan

Komisi A membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan struktur pemerintahan, kelembagaan, dan tata kelola administrasi. Termasuk di dalamnya penguatan birokrasi, reformasi pelayanan publik, dan pengaturan hubungan antar lembaga daerah.

❖ Pengawasan terhadap Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan

Komisi A melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang pemerintahan umum, kependudukan, catatan sipil, dan aparatur sipil negara. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, dan evaluasi laporan kinerja.

❖ Koordinasi dengan Mitra Kerja Pemerintahan

Komisi A menjalin koordinasi dengan instansi vertikal, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar. Komisi ini juga menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

❖ Evaluasi Kinerja dan Regulasi Kelembagaan

Komisi A mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah ditetapkan, termasuk dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar revisi peraturan daerah atau penyusunan kebijakan baru.

Dengan komposisi anggota dari berbagai fraksi, Komisi A DPRD Jayawijaya diharapkan mampu menjalankan fungsi legislatif secara objektif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan daerah. Peran strategis komisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas tata kelola di Kabupaten Jayawijaya.

### 3.1.3. Susunan Komisi B DPRD Kabupaten Jayawijaya

**Tabel 3. Komisi B DPRD Kabupaten Jayawijaya**

No	Nama	Asal Fraksi (Partai)	Jabatan
1	Yosep Lokobal, SE	PDIP	Ketua
2	Yunus Kenelak, SH	BALIEM	Wakil Ketua
3	Tadius Mabel, S.Si	PERINDO	Sekretaris
4	Yatinus Yikwa	PERINDO	Anggota
5	Cornelius Kogoya, S.AP	PDIP	Anggota
6	Yomi Kogoya, S.IP	DEMOKRAT	Anggota
7	Arip Gombo, A.Md.Tek	GERINDRA	Anggota
8	Agustinus Mabel, A.Md.Par	GARUDA	Anggota
9	Aplin Komba	JAYAWIJAYA	Anggota

Komisi B DPRD Kabupaten Jayawijaya berfokus pada bidang perekonomian, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan daerah. Komisi ini menjadi wadah pembahasan dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta pengembangan sektor produktif di daerah.

Tugas pokok Komisi B meliputi :

❖ Pembahasan kebijakan ekonomi daerah

Membahas rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, dan pembangunan ekonomi lokal.

❖ Pengawasan pelaksanaan program ekonomi

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di sektor perdagangan, industri, koperasi, dan UMKM, agar sesuai dengan rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

❖ Koordinasi dengan mitra kerja

Menjalin koordinasi dengan dinas teknis, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi kebijakan serta memastikan iklim usaha yang kondusif.

❖ Evaluasi pembangunan ekonomi

Mengevaluasi efektivitas program pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan pasar, sarana perdagangan, dan infrastruktur pendukung industri.



❖ Pengawasan anggaran sektor ekonomi

Mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk sektor ekonomi dan perdagangan, memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan komposisi anggota dari berbagai fraksi, Komisi B diharapkan mampu menjalankan fungsi legislatif secara objektif dan akuntabel. Peran strategis komisi ini mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat iklim investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jayawijaya.

### 3.1.4. Susunan Komisi C DPRD Kabupaten Jayawijaya

**Tabel 4. Komisi C DPRD Kabupaten Jayawijaya**

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Asal Fraksi (Partai)</i>	<i>Jabatan</i>
1	Agus Logo	BALIEM	Ketua
2	Roby Lokobal, S.IP	PDIP	Wakil Ketua
3	Yosia Ebe Lengka, S.AP	PERINDO	Sekretaris
4	Abner Asso	PERINDO	Anggota
5	Gerson Wenda, S.Th., M.M	DEMOKRAT	Anggota
6	Herman Hisage	GERINDRA	Anggota
7	Martinus Itlay	GARUDA	Anggota
8	Charles Ricardo Huby	BALIEM	Anggota
9	Welemese Hilapok	JAYAWIJAYA	Anggota

Komisi C DPRD Kabupaten Jayawijaya berfokus pada bidang pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Komisi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tugas pokok Komisi C meliputi :

❖ Pembahasan kebijakan pembangunan daerah

Membahas rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, tata ruang, perumahan, dan infrastruktur publik.

❖ Pengawasan pelaksanaan pembangunan

Melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sarana perumahan.

❖ Koordinasi dengan mitra kerja teknis

Menjalin koordinasi dengan dinas pekerjaan umum, perumahan, dan tata ruang, serta pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan daerah.

❖ Evaluasi efektivitas pembangunan

Mengevaluasi hasil pembangunan untuk memastikan kualitas, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

❖ Pengawasan anggaran pembangunan

Mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan

infrastruktur, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Dengan komposisi anggota dari berbagai fraksi, Komisi C diharapkan mampu menjalankan fungsi legislatif secara objektif dan konsisten. Peran strategis komisi ini mendukung terciptanya pembangunan yang merata, memperkuat infrastruktur daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jayawijaya.

### 3.1.5. Susunan dan Komposisi Badan Musyarawah DPRD

**Tabel 5. Badan Musyawarah DPRD**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Asal Fraksi (Partai)</b>	<b>Jabatan</b>
1	Luki Wuka, S.Pi., M.Si	PERINDO	Ketua
2	Yulius Huby	PDIP	Wakil Ketua I
3	Sem Hilapok, S.Sos., M.Si	DEMOKRAT	Wakil Ketua II
4	Agus Elopere, S.IP	PERINDO	Anggota
5	Yatinus Yikwa	PERINDO	Anggota
6	Roby Lokobal, S.IP	PDIP	Anggota
7	Tab Tabuni, S.IP	PDIP	Anggota
8	Dinus Kenelak, S.AB, M.Si	DEMOKRAT	Anggota
9	Arip Gombo, A.Md.Tek	GERINDRA	Anggota
10	Martinus Itlay	GARUDA	Anggota
11	Iberahim Elopere	BALIEM	Anggota
12	Yunus Kenelak, SH	BALIEM	Anggota
13	Yonatan Tabuni	JAYAWIJAYA	Anggota
14	Welemese Hilapok	JAYAWIJAYA	Anggota

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah alat kelengkapan dewan yang memiliki peran strategis dalam mengatur jalannya kegiatan legislatif. Bamus berfungsi sebagai pengendali agenda, pengatur ritme kerja, serta penjaga keseimbangan antara kepentingan fraksi dan kebutuhan masyarakat.

Uraian tugas Badan Musyawarah :

❖ Mengatur Agenda Sidang dan Rapat DPRD

Bamus menyusun jadwal rapat paripurna, rapat komisi, serta rapat-rapat lainnya agar pelaksanaan fungsi legislatif berjalan teratur dan efisien.


❖ Menentukan Prioritas Pembahasan

Bamus menetapkan urutan prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda), laporan pertanggungjawaban kepala daerah, serta isu-isu strategis yang perlu segera dibahas.

❖ Koordinasi Antar Fraksi dan Komisi

Bamus menjadi forum koordinasi antar fraksi dan komisi, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi kolektif dan menjaga keseimbangan politik di DPRD.

❖ Penghubung dengan Pemerintah Daerah



Bamus berperan sebagai penghubung antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun agenda bersama, khususnya terkait pembahasan kebijakan strategis dan penganggaran.

❖ Evaluasi Pelaksanaan Agenda DPRD

Bamus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kerja DPRD.

Dengan komposisi pimpinan yang terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua, serta anggota dari berbagai fraksi, Badan Musyawarah DPRD Jayawijaya menjadi pusat koordinasi yang memastikan seluruh kegiatan legislatif berjalan sesuai aturan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### 3.1.6. Susunan dan Komposisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jayawijaya

**Tabel 6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
DPRD**

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Asal Fraksi (Partai)</i>	<i>Jabatan</i>
1	Agustinus Mabel, A.Md.Par	GARUDA	Ketua
2	Roby Lokobal, S.IP	PDIP	Wakil Ketua
3	Maximus Itlay	PERINDO	Anggota
4	Agus Elopere, S.IP	PERINDO	Anggota
5	Tab Tabuni, S.IP	PDIP	Anggota
6	Yomi Kogoya, S.IP	DEMOKRAT	Anggota
7	Arip Gombo, A.Md.Tek	GERINDRA	Anggota
8	Agus Logo	BALIAM	Anggota
9	Aplin Komba	JAYAWIJAYA	Anggota

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah alat kelengkapan dewan yang memiliki peran sentral dalam proses legislasi daerah. Lembaga ini menjadi motor penggerak penyusunan regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap peraturan daerah disusun secara sistematis, sesuai kebutuhan, dan berlandaskan hukum.

Uraian tugas Bapemperda :

❖ Menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Bapemperda bertugas menyusun daftar prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas dalam satu periode, dengan

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

❖ Mengkoordinasikan Penyusunan Ranperda

Bapemperda mengkoordinasikan proses penyusunan Ranperda baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun dari pemerintah daerah, sehingga setiap rancangan memiliki landasan akademik dan aspirasi masyarakat.

❖ Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi

Bapemperda memastikan setiap Ranperda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kebijakan nasional.

❖ Memberikan Pertimbangan dan Rekomendasi

Bapemperda memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi terhadap Ranperda yang diajukan, termasuk aspek substansi, teknis, dan legal drafting.

❖ Mengawasi Proses Legislasi

Bapemperda mengawasi jalannya pembahasan Ranperda di komisi maupun panitia khusus, agar sesuai dengan prosedur dan menghasilkan regulasi yang berkualitas.

Dengan komposisi pimpinan yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, serta anggota dari berbagai fraksi, Bapemperda DPRD Jayawijaya menjadi garda depan dalam memastikan regulasi

daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

### **3.1.7. Susunan dan Komposisi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jayawijaya**

**Tabel 7. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jayawijaya**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Asal Fraksi (Partai)</b>	<b>Jabatan</b>
1	Abner Asso	Perindo	Ketua
2	Gerson Wenda, S.Th., M.M	Demokrat	Wakil Ketua
3	Yosep Lokobal, SE	PDIP	Anggota

Badan Kehormatan DPRD dibentuk sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas menjaga martabat, kehormatan, serta etika anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. Struktur kepemimpinan badan ini terdiri dari perwakilan beberapa fraksi, sehingga mencerminkan keberagaman politik di lembaga legislatif.

Pada periode ini, posisi Ketua diamanahkan kepada Abner Asso dari Fraksi Perindo, yang bertanggung jawab memimpin jalannya kegiatan dan memastikan setiap keputusan dijalankan sesuai



aturan. Jabatan Wakil Ketua dipegang oleh Gerson Wenda, S.Th., M.M dari Fraksi Demokrat, yang berperan mendampingi ketua serta menggantikan tugas kepemimpinan bila diperlukan. Sementara itu, Yosep Lokobal, SE dari Fraksi PDIP dipercaya sebagai Anggota, yang turut serta dalam pengawasan, pembahasan, dan pengambilan keputusan di Badan Kehormatan.

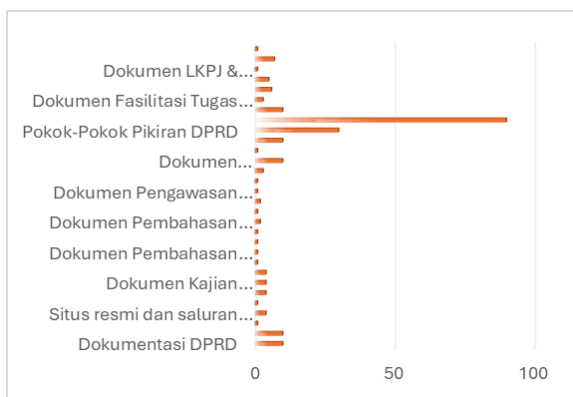
Kehadiran tiga tokoh dari fraksi berbeda ini menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan komitmen lintas partai untuk menjaga integritas DPRD. Dengan komposisi tersebut, Badan Kehormatan diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan internal secara adil, transparan, dan berwibawa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

### **3.1.8. Capaian DPRD dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan Tahun 2024**

Kinerja DPRD sepanjang tahun 2024 memperlihatkan fokus yang kuat pada fungsi representasi dan komunikasi politik. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah dokumen pelaksanaan reses sebanyak 90 serta pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 30, yang menunjukkan intensitas penyerapan aspirasi masyarakat dan pengolahan gagasan untuk dijadikan bahan kebijakan. Aktivitas ini menegaskan peran DPRD sebagai lembaga yang

aktif menjalin interaksi langsung dengan konstituen dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat ke dalam agenda pemerintahan daerah.

Fungsi dokumentasi dan publikasi juga menempati porsi penting, dengan 10 dokumen dokumentasi DPRD, 10 dokumen publikasi, serta 10 dokumen hubungan masyarakat. Ditambah dengan 10 dokumen bahan komunikasi dan publikasi serta 4 saluran resmi publikasi DPRD, capaian ini memperlihatkan komitmen DPRD dalam membangun transparansi dan keterbukaan informasi publik. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus meningkatkan akuntabilitas di mata masyarakat.



**Gambar 1. Capaian DPRD dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan Tahun 2024**

Pada fungsi legislasi, DPRD menghasilkan 7 dokumen pembahasan rancangan perda, 4 dokumen kajian perundang-undangan, 4 dokumen penjelasan atau naskah akademik yang difasilitasi, serta 1 dokumen sosialisasi rancangan perda. Meskipun jumlahnya belum besar, capaian ini menunjukkan bahwa proses legislasi tetap berjalan dengan dukungan kajian akademik dan fasilitasi kelembagaan. Namun, rendahnya angka pada dokumen penyusunan program pembentukan perda mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan legislasi agar lebih terarah dan berdampak.

Fungsi anggaran tercermin melalui dokumen pembahasan KUA dan PPAS, perubahan KUA dan PPAS, pembahasan APBD, perubahan APBD, laporan realisasi APBD per semester, serta pertanggungjawaban APBD. Jumlah yang relatif kecil memperlihatkan bahwa pembahasan anggaran berjalan sesuai siklus, tetapi belum menunjukkan intensitas yang mendalam. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tercatat melalui dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan dokumen pengawasan penggunaan anggaran, yang menjadi bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif.

Fasilitasi kelembagaan juga terlihat melalui dokumen tugas pimpinan DPRD, tugas badan musyawarah, pendalaman tugas DPRD, serta dialog dan koordinasi dengan pejabat maupun tokoh

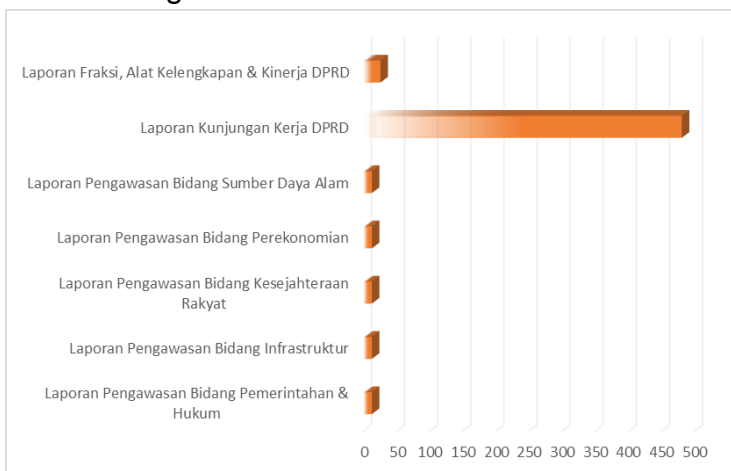
masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa DPRD menjalankan fungsi internal dan eksternal secara simultan, meskipun masih terbatas dari sisi volume.

Secara keseluruhan, capaian DPRD tahun 2024 menegaskan bahwa fungsi representasi dan komunikasi menjadi prioritas utama, diikuti oleh dokumentasi dan fasilitasi kelembagaan. Fungsi legislasi dan anggaran tetap berjalan, namun intensitasnya masih perlu diperkuat agar seimbang dengan fungsi representasi. Evaluasi terhadap distribusi kegiatan ini penting untuk memastikan DPRD mampu menjalankan peran kelembagaan secara utuh, dengan keseimbangan antara aspirasi masyarakat, legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

### **3.1.9. Capaian DPRD dalam Fungsi Pengawasan dan Kunjungan Kerja Tahun 2024**


Data pengawasan DPRD Tahun 2024 menunjukkan distribusi yang merata pada lima bidang utama, masing-masing menghasilkan 12 laporan. Bidang pemerintahan dan hukum, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, perekonomian, serta sumber daya alam memperoleh porsi yang sama, menandakan bahwa DPRD berupaya menjaga keseimbangan fungsi pengawasan di seluruh sektor strategis. Kesetaraan jumlah laporan

ini memperlihatkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan fungsi kontrol, meskipun belum mencerminkan kedalaman analisis yang berbeda antar bidang.



**Gambar 2. Capaian DPRD dalam Fungsi Pengawasan dan Kunjungan Kerja Tahun 2024**

Selain pengawasan sektoral, DPRD juga mencatat 480 laporan kunjungan kerja, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan laporan pengawasan formal. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kunjungan kerja menjadi instrumen utama dalam menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat dan mitra kerja, sekaligus memperkuat legitimasi politik DPRD di lapangan. Namun, dominasi kunjungan kerja dibandingkan laporan pengawasan formal menimbulkan catatan bahwa fungsi kontrol kelembagaan masih lebih banyak

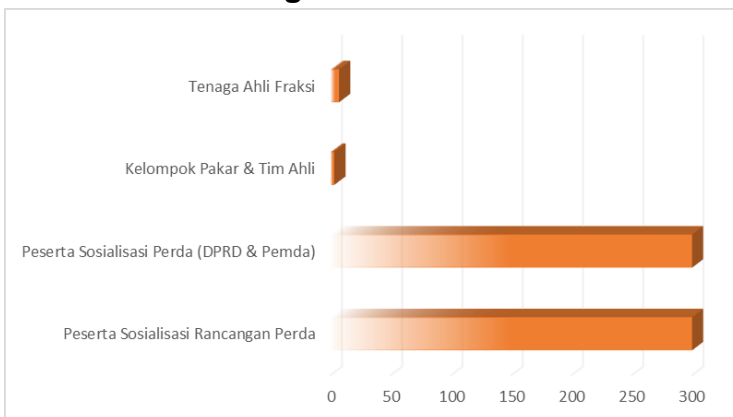


dijalankan melalui pendekatan representasi ketimbang analisis kebijakan yang mendalam.

Kinerja kelembagaan juga tercermin dalam 25 laporan fraksi, alat kelengkapan, dan kinerja DPRD. Angka ini memperlihatkan bahwa fungsi internal DPRD tetap berjalan, dengan adanya dokumentasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Meski jumlahnya tidak sebesar laporan kunjungan kerja, keberadaan laporan fraksi dan alat kelengkapan menjadi penting untuk memastikan bahwa fungsi representasi politik di dalam DPRD tetap terjaga.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa DPRD Jayawijaya telah menjalankan fungsi pengawasan secara merata di berbagai bidang, namun masih menempatkan kunjungan kerja sebagai aktivitas dominan. Evaluasi terhadap keseimbangan antara pengawasan formal dan kunjungan kerja perlu dilakukan agar fungsi kelembagaan DPRD dapat lebih efektif dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak.

### 3.1.10. Capaian DPRD dalam Fungsi Sosialisasi dan Dukungan Keahlian Tahun 2024



**Gambar 3. Capaian DPRD dalam Fungsi Sosialisasi dan Dukungan Keahlian Tahun 2024**

Kegiatan DPRD Tahun 2024 menunjukkan perhatian besar pada aspek sosialisasi regulasi. Tercatat 300 peserta sosialisasi rancangan perda dan 300 peserta sosialisasi perda yang melibatkan DPRD bersama pemerintah daerah. Angka ini memperlihatkan bahwa proses legislasi tidak hanya berhenti pada pembahasan internal, tetapi juga diikuti dengan upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sosialisasi yang melibatkan jumlah peserta cukup besar menjadi indikator bahwa DPRD berkomitmen membangun pemahaman publik terhadap regulasi yang sedang maupun telah ditetapkan.

Selain kegiatan sosialisasi, dukungan keahlian juga menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi kelembagaan DPRD. Tercatat 3 kelompok pakar dan tim ahli serta 7 tenaga ahli fraksi yang terlibat dalam mendukung proses legislasi dan pengawasan. Kehadiran tenaga ahli ini memperlihatkan bahwa DPRD berupaya meningkatkan kualitas analisis dan argumentasi dalam setiap pembahasan, sehingga produk kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis pada kajian akademik dan pertimbangan teknis.

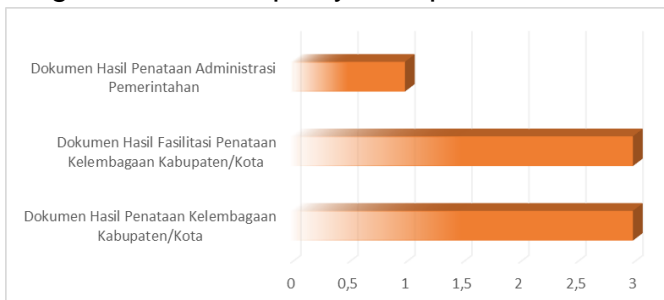
Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan keseimbangan antara fungsi sosialisasi dan dukungan keahlian. Sosialisasi perda memperkuat legitimasi dan pemahaman publik, sementara dukungan pakar dan tenaga ahli memperkuat kualitas substansi kebijakan. Evaluasi terhadap kedua aspek ini penting agar DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara lebih efektif, dengan dukungan partisipasi masyarakat dan analisis akademik yang memadai.



## 3.2. Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya

### 3.2.1. Capaian Sekretariat Daerah dalam Penataan Kelembagaan dan Administrasi Tahun 2024

Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan penataan kelembagaan. Sepanjang tahun 2024, tercatat 3 dokumen hasil penataan kelembagaan kabupaten/kota serta 3 dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota. Capaian ini menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah, baik melalui penataan langsung maupun fasilitasi lintas unit. Penataan kelembagaan menjadi penting karena berfungsi sebagai dasar bagi efektivitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



**Gambar 4. Penataan Kelembagaan dan Administrasi**

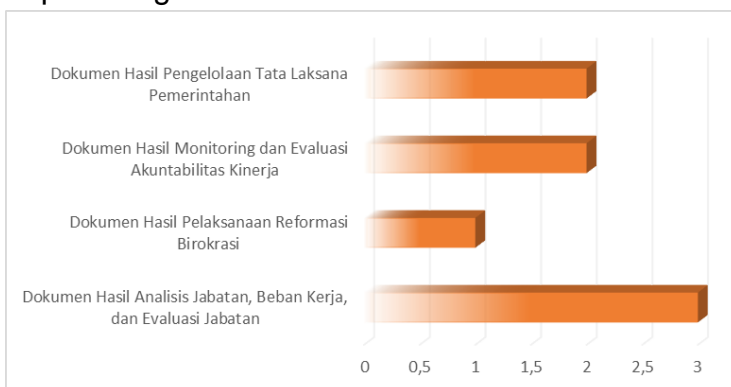
Selain itu, Sekretariat Daerah juga menghasilkan 1 dokumen penataan administrasi pemerintahan yang menegaskan perhatian terhadap aspek tata kelola administratif. Meski jumlahnya terbatas, dokumen ini memiliki nilai strategis karena administrasi pemerintahan merupakan fondasi bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan daerah. Dengan adanya dokumen tersebut, Sekretariat Daerah menunjukkan komitmen untuk memperkuat sistem administrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian Sekretariat Daerah tahun 2024 memperlihatkan peran kelembagaan yang aktif dalam mendukung penataan organisasi dan administrasi pemerintahan. Evaluasi terhadap hasil penataan ini menjadi penting agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota.

### **3.2.2. Capaian Sekretariat Daerah dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2024**

Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan sejumlah dokumen strategis yang mencerminkan komitmen terhadap penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Tercatat 3


dokumen hasil analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan yang menjadi dasar penting dalam penataan struktur organisasi dan distribusi tugas aparatur. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara kapasitas pegawai dengan kebutuhan kelembagaan, sehingga efektivitas kerja dapat ditingkatkan.



**Gambar 5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Selain itu, terdapat 1 dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang menandai langkah konkret dalam mendorong perubahan sistem kerja menuju birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Meski jumlahnya terbatas, dokumen ini memiliki nilai strategis karena menjadi indikator komitmen daerah dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.

Pada aspek akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah menghasilkan 2 dokumen



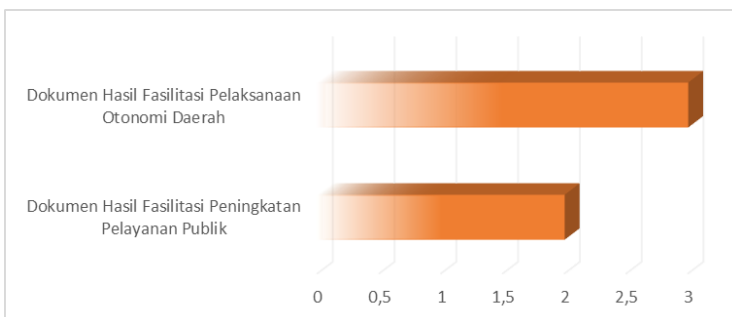
monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Capaian ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pengukuran capaian program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana target pembangunan daerah telah tercapai. Evaluasi akuntabilitas kinerja menjadi penting agar setiap unit kerja dapat mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai secara terukur.

Selain itu, terdapat 2 dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan yang memperlihatkan upaya memperkuat sistem prosedur dan mekanisme kerja. Tata laksana yang tertib dan terstandar menjadi fondasi bagi kelancaran administrasi pemerintahan, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, capaian Sekretariat Daerah tahun 2024 memperlihatkan langkah nyata dalam memperkuat birokrasi melalui analisis jabatan, reformasi, akuntabilitas kinerja, dan tata laksana pemerintahan. Evaluasi terhadap dokumen-dokumen ini penting agar hasil yang dicapai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 3.2.3. Capaian Sekretariat Daerah dalam Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah Tahun 2024

Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan 2 dokumen fasilitasi peningkatan pelayanan publik. Capaian ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, meskipun jumlah dokumen masih terbatas. Upaya fasilitasi tersebut penting karena pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dokumen yang dihasilkan menjadi instrumen untuk memperkuat standar pelayanan, memperbaiki mekanisme kerja, serta mendorong terciptanya sistem pelayanan yang lebih responsif dan akuntabel.



**Gambar 6. Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah**

Selain itu, terdapat 3 dokumen fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang menandakan

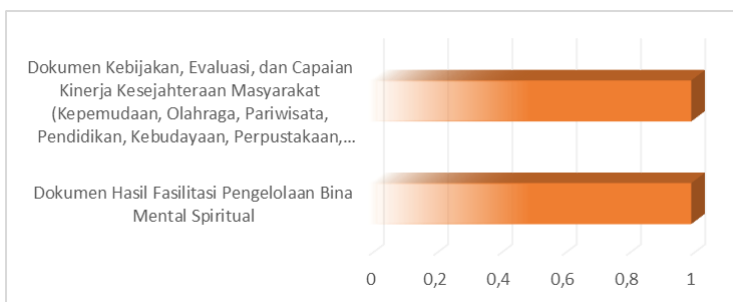
komitmen Sekretariat Daerah dalam mendukung kemandirian pemerintah kabupaten/kota. Fasilitas ini berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip otonomi daerah berjalan sesuai dengan regulasi, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengelola kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya dokumen tersebut, Sekretariat Daerah berperan sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, sehingga pelaksanaan otonomi dapat lebih terarah dan efektif.

Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan bahwa Sekretariat Daerah telah menjalankan fungsi strategis dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah. Evaluasi terhadap hasil fasilitas menjadi penting agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan dan kemandirian pemerintahan daerah.

#### **3.2.4. Capaian Sekretariat Daerah dalam Pengelolaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024**

Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan 1 dokumen fasilitas pengelolaan bina mental spiritual. Capaian ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek

pembinaan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual masyarakat. Meski jumlah dokumen masih terbatas, keberadaannya memiliki arti penting karena pengelolaan mental spiritual berfungsi sebagai landasan dalam membangun karakter masyarakat yang berintegritas, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial di daerah.



**Gambar 7. Pengelolaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Masyarakat**

Selain itu, Sekretariat Daerah juga menghasilkan 1 dokumen kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, serta ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum Linmas). Dokumen ini bersifat strategis karena mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menilai dan memperkuat berbagai sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun jumlahnya hanya satu, dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk

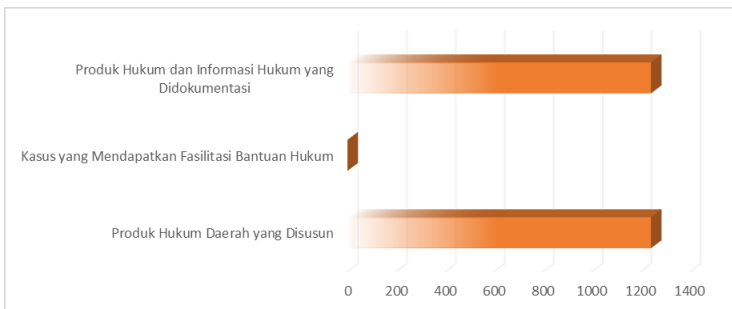
mengukur capaian pembangunan sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian Sekretariat Daerah tahun 2024 dalam bidang mental spiritual dan kesejahteraan masyarakat masih terbatas dari sisi kuantitas, namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Evaluasi terhadap hasil fasilitasi dan kebijakan ini diperlukan agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga mampu memberikan arah kebijakan yang lebih konkret dalam memperkuat kualitas kehidupan masyarakat di berbagai sektor.

### **3.2.5. Capaian Sekretariat Daerah dalam Produk Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, Sekretariat Daerah mencatat capaian yang sangat signifikan dalam bidang hukum, khususnya terkait penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah. Tercatat 1.241 produk hukum daerah yang disusun, jumlah yang menunjukkan intensitas tinggi dalam proses legislasi dan regulasi di tingkat daerah. Angka ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan perangkat hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.





**Gambar 8. Produk Hukum dan Fasilitas Bantuan Hukum**

Selain penyusunan, terdapat pula 1.241 produk hukum dan informasi hukum yang didokumentasi. Dokumentasi ini menjadi bagian penting dari tata kelola hukum, karena memastikan setiap produk hukum dapat diakses, ditelusuri, dan digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan jumlah yang sama antara produk hukum yang disusun dan yang didokumentasi, terlihat adanya konsistensi dalam menjaga keteraturan administrasi hukum daerah.

Di sisi lain, Sekretariat Daerah juga menangani 1 kasus fasilitas bantuan hukum. Meski jumlahnya kecil dibandingkan dengan produk hukum yang dihasilkan, keberadaan kasus ini menunjukkan bahwa fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat atau aparatur tetap dijalankan. Fasilitas bantuan hukum menjadi wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan dukungan

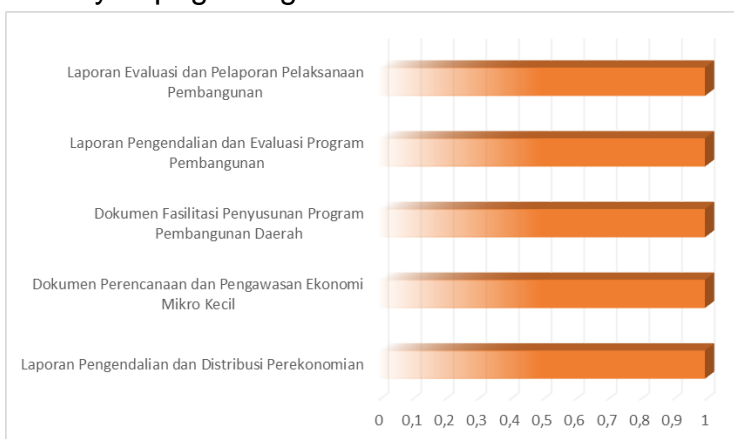
terhadap pihak yang membutuhkan pendampingan dalam proses hukum.

Secara keseluruhan, capaian Sekretariat Daerah tahun 2024 memperlihatkan dominasi pada aspek penyusunan dan dokumentasi produk hukum, dengan jumlah yang sangat besar dan konsisten. Namun, fasilitasi bantuan hukum masih relatif terbatas, sehingga perlu diperkuat agar fungsi perlindungan hukum berjalan lebih optimal. Evaluasi terhadap keseimbangan antara produksi regulasi dan layanan bantuan hukum menjadi penting agar peran Sekretariat Daerah dalam bidang hukum tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam melindungi kepentingan masyarakat.

### **3.2.6. Capaian Sekretariat Daerah dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2024**

Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan sejumlah dokumen yang mencerminkan peran strategis dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tercatat 1 laporan pengendalian dan distribusi perekonomian, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam memastikan distribusi sumber daya berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, terdapat 1 dokumen perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang menandakan komitmen terhadap penguatan sektor usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Dokumen ini penting karena sektor mikro kecil memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan.



**Gambar 9. Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan**

Sekretariat Daerah juga menghasilkan 1 dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai instrumen koordinasi lintas sektor. Dokumen ini menjadi dasar dalam menyusun arah pembangunan yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan prioritas daerah.

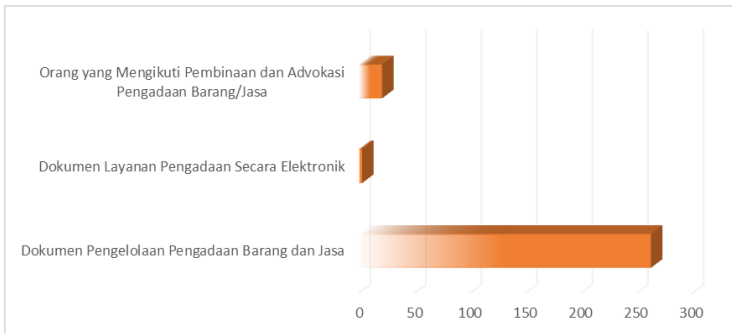
Pada aspek evaluasi, terdapat 1 laporan pengendalian dan evaluasi program pembangunan serta 1 laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Kedua dokumen ini memperlihatkan adanya mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan program, sekaligus menjadi alat ukur untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.

Secara keseluruhan, capaian Sekretariat Daerah tahun 2024 dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan masih terbatas dari sisi jumlah dokumen, namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Dokumen-dokumen tersebut menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan yang lebih terarah, pengendalian ekonomi yang lebih stabil, serta evaluasi kebijakan yang lebih akuntabel.

### **3.2.7. Capaian Sekretariat Daerah dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, Sekretariat Daerah mencatat capaian yang cukup besar dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Tercatat 263 dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa, jumlah yang menunjukkan intensitas tinggi dalam proses administrasi dan manajemen pengadaan. Angka ini mencerminkan bahwa pengadaan menjadi salah satu aktivitas dominan dalam mendukung

kelancaran program pembangunan dan pelayanan publik.



**Gambar 10. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Selain itu, terdapat 3 dokumen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang menandakan adanya upaya digitalisasi dalam sistem pengadaan. Meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan dokumen pengelolaan manual, keberadaan LPSE menjadi langkah penting menuju transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Pada aspek pembinaan, tercatat 21 orang mengikuti kegiatan advokasi dan pembinaan pengadaan barang/jasa. Angka ini menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kapasitas aparatur, meskipun jumlah peserta masih terbatas. Pembinaan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan tidak hanya berjalan sesuai

prosedur, tetapi juga didukung oleh pemahaman teknis dan etika yang memadai.

Secara keseluruhan, capaian Sekretariat Daerah tahun 2024 dalam bidang pengadaan barang dan jasa memperlihatkan dominasi pada aspek dokumentasi, dengan langkah awal menuju digitalisasi melalui LPSE serta peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan agar pengadaan tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi juga mampu memperkuat kualitas layanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.

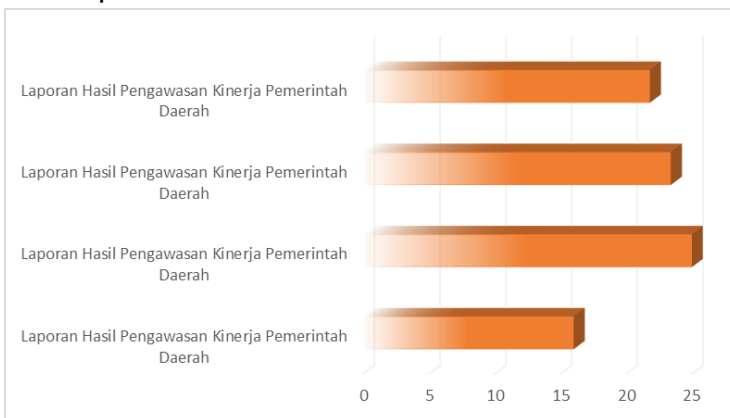
### **3.3. Inspektorat Kabupaten Jayawijaya**

#### **3.3.1. Capaian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024**

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan menghasilkan sejumlah laporan evaluatif. Tercatat 16 laporan, 25 laporan, 23,4 laporan, dan 21,8 laporan yang menggambarkan variasi capaian pengawasan dalam periode yang berbeda. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Inspektorat tidak hanya konsisten dalam menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga berupaya memberikan penilaian

kuantitatif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Distribusi capaian tersebut memperlihatkan adanya dinamika dalam intensitas pengawasan. Jumlah laporan yang relatif tinggi pada beberapa periode menandakan fokus pengawasan yang lebih intensif, sementara angka yang lebih rendah menunjukkan adanya variasi beban kerja atau prioritas pengawasan yang berbeda. Hal ini mencerminkan bahwa Inspektorat menyesuaikan strategi pengawasan dengan kebutuhan dan kondisi aktual pemerintah daerah.

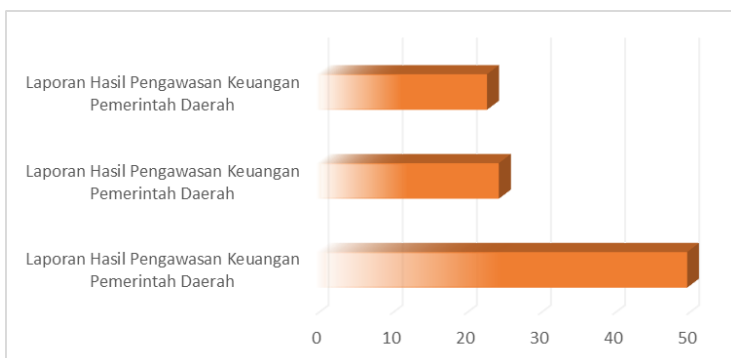


**Gambar 11. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024**

Secara keseluruhan, capaian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja pemerintah

daerah. Evaluasi terhadap hasil pengawasan ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.


### **3.3.2. Capaian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024**



**Gambar 12. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan fungsi pengawasan keuangan pemerintah daerah dengan menghasilkan sejumlah laporan yang mencerminkan intensitas dan variasi capaian. Tercatat 50 laporan hasil pengawasan keuangan, yang menunjukkan fokus kuat pada aspek



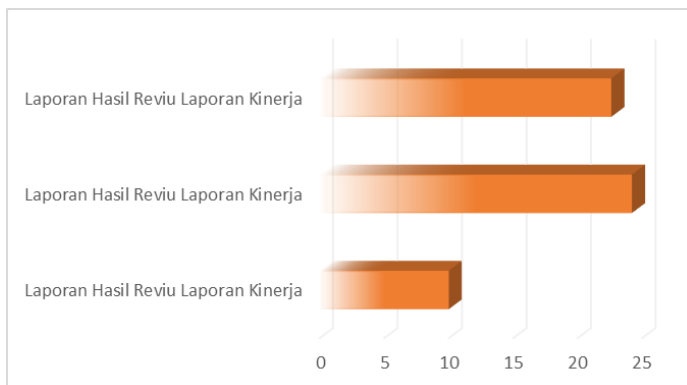


akuntabilitas fiskal dan pengendalian penggunaan anggaran daerah. Angka ini menjadi indikator bahwa pengawasan keuangan menjadi prioritas utama dalam menjaga transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, terdapat capaian lain berupa 24,6 laporan dan 23 laporan hasil pengawasan keuangan. Angka-angka ini memperlihatkan adanya variasi dalam intensitas pengawasan, yang kemungkinan terkait dengan periode pelaksanaan, lingkup pemeriksaan, atau fokus tematik yang berbeda. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan capaian utama, laporan-laporan tersebut tetap penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang berkesinambungan.

Secara keseluruhan, capaian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui pengawasan yang konsisten. Evaluasi terhadap variasi jumlah laporan menjadi penting agar pengawasan tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang berdampak nyata terhadap perbaikan sistem keuangan daerah.

### 3.3.3. Capaian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024



**Gambar 13. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024**

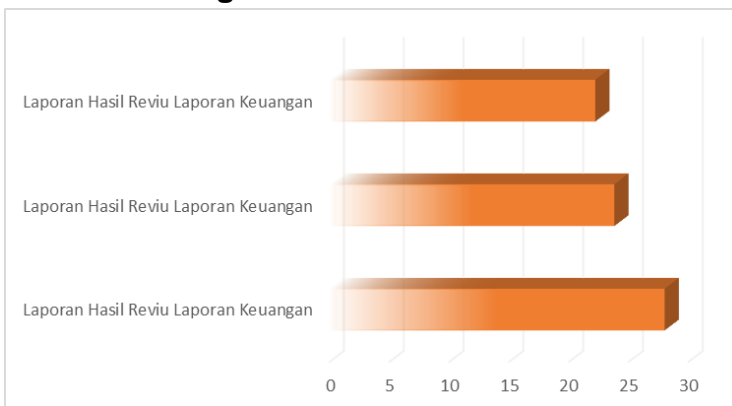
Sepanjang tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan reviu terhadap laporan kinerja pemerintah daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal. Tercatat 10 laporan hasil reviu kinerja, yang menunjukkan adanya kegiatan rutin dalam menilai kesesuaian antara perencanaan dan pencapaian program.

Selain itu, terdapat capaian lain berupa 24,2 laporan dan 22,6 laporan hasil reviu kinerja. Angka-angka ini memperlihatkan adanya variasi dalam intensitas reviu, yang kemungkinan terkait dengan periode pelaksanaan, lingkup unit kerja yang diperiksa, atau metode penghitungan capaian. Meski jumlahnya berbeda, keseluruhan data

menunjukkan bahwa Inspektorat berupaya menjaga konsistensi dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.


Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan bahwa Inspektorat Jayawijaya telah menjalankan fungsi reviu kinerja dengan intensitas yang cukup tinggi. Evaluasi terhadap hasil reviu menjadi penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perbaikan nyata dalam efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah.

#### **3.3.4. Capaian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024**



**Gambar 14. Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan reviu



terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal. Tercatat 28 laporan hasil reviu keuangan, yang menunjukkan intensitas tinggi dalam memastikan akuntabilitas fiskal dan kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku. Angka ini menjadi indikator bahwa pengawasan keuangan menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain capaian utama tersebut, terdapat pula 23,8 laporan dan 22,2 laporan hasil reviu keuangan. Variasi angka ini memperlihatkan adanya perbedaan intensitas pengawasan pada periode tertentu, yang kemungkinan terkait dengan lingkup pemeriksaan, metode penghitungan capaian, atau fokus tematik yang berbeda. Meski jumlahnya lebih kecil dibandingkan capaian utama, laporan-laporan tersebut tetap penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol berkesinambungan terhadap keuangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 dalam reviu laporan keuangan menunjukkan konsistensi dalam menjaga tata kelola fiskal. Evaluasi terhadap variasi jumlah laporan menjadi penting agar hasil reviu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang berdampak nyata

terhadap perbaikan sistem keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.

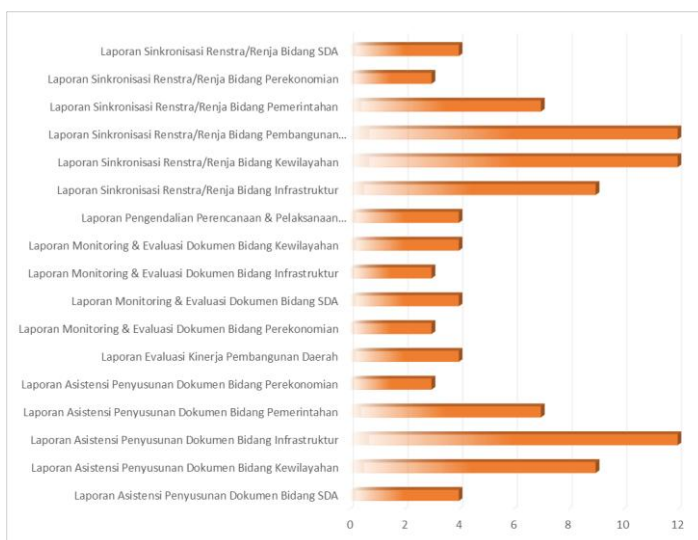
### **3.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **3.4.1. Capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya dalam Perencanaan, Evaluasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, Bappeda Kabupaten Jayawijaya menunjukkan capaian yang cukup komprehensif dalam menjalankan fungsi perencanaan, asistensi, evaluasi, dan sinkronisasi pembangunan daerah. Pada aspek asistensi, tercatat 4 laporan penyusunan dokumen bidang sumber daya alam (SDA), 9 laporan bidang kewilayahan, 12 laporan bidang infrastruktur, 7 laporan bidang pemerintahan, serta 3 laporan bidang perekonomian. Distribusi ini memperlihatkan bahwa Bappeda memberi perhatian lebih besar pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, yang memang menjadi prioritas pembangunan di wilayah pegunungan dengan tantangan geografis yang kompleks.


Selain asistensi, Bappeda juga menghasilkan 4 laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Evaluasi ini penting sebagai instrumen untuk menilai efektivitas program pembangunan dan memastikan kesesuaian antara

perencanaan dengan hasil yang dicapai. Pada aspek monitoring dan evaluasi dokumen, terdapat 3 laporan bidang perekonomian, 4 laporan bidang SDA, 3 laporan bidang infrastruktur, serta 4 laporan bidang kewilayahan. Capaian ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam pengawasan lintas sektor, meskipun intensitasnya masih relatif kecil.



**Gambar 15. Perencanaan, Evaluasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2024**

Fungsi pengendalian juga dijalankan melalui 4 laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang menjadi mekanisme kontrol terhadap implementasi kebijakan pembangunan. Sementara itu, pada

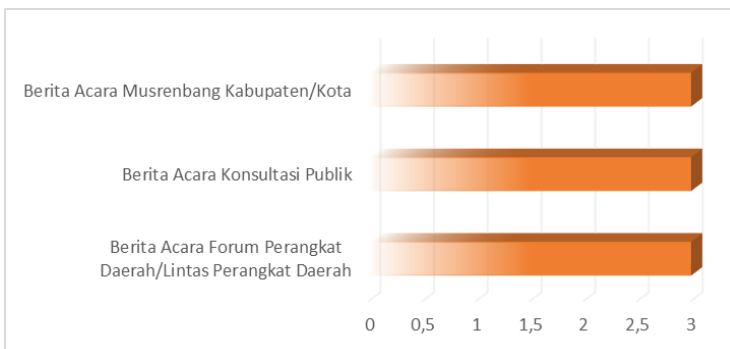


aspek sinkronisasi dokumen perencanaan, Bappeda menghasilkan 9 laporan sinkronisasi Renstra/Renja bidang infrastruktur, 12 laporan bidang kewilayahan, 12 laporan bidang pembangunan manusia, 7 laporan bidang pemerintahan, 3 laporan bidang perekonomian, serta 4 laporan bidang SDA. Angka ini memperlihatkan bahwa sinkronisasi dokumen perencanaan menjadi salah satu fokus utama, dengan perhatian besar pada bidang kewilayahan, infrastruktur, dan pembangunan manusia.

Secara keseluruhan, capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan peran yang aktif dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan terarah, evaluasi dilakukan secara konsisten, dan sinkronisasi dokumen perencanaan lintas sektor terjaga. Namun, distribusi capaian juga menegaskan bahwa bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pembangunan manusia menjadi prioritas utama, sementara bidang perekonomian masih relatif terbatas. Evaluasi lebih lanjut diperlukan agar keseimbangan antar sektor dapat diperkuat, sehingga pembangunan daerah berjalan lebih holistik dan berkelanjutan.

### 3.4.2. Capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya dalam Forum Perencanaan dan Konsultasi Publik Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Bappeda Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Tercatat 3 berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, yang menunjukkan adanya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah dalam menyusun prioritas pembangunan. Forum ini berfungsi sebagai wadah sinkronisasi program lintas sektor, sehingga arah pembangunan lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah.



**Gambar 16. Forum Perencanaan dan Konsultasi Publik Tahun 2024**

Selain itu, terdapat 3 berita acara konsultasi publik yang menandakan keterlibatan masyarakat



dalam proses perencanaan. Konsultasi publik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Bappeda juga menghasilkan 3 berita acara Musrenbang kabupaten/kota, yang merupakan forum formal dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Musrenbang menjadi puncak proses partisipatif, di mana hasil konsultasi publik dan forum perangkat daerah dikonsolidasikan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan bahwa Bappeda Jayawijaya telah menjalankan fungsi koordinasi, partisipasi, dan konsolidasi perencanaan pembangunan secara seimbang. Meski jumlah berita acara masih terbatas, keberadaannya memiliki nilai strategis karena menjadi fondasi bagi penyusunan dokumen perencanaan yang lebih akuntabel dan partisipatif.

### **3.4.3. Capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya dalam Publikasi, Kerja Sama, dan Konsultasi Publik Tahun 2024**


Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa capaian yang menunjukkan dinamika peran Bappeda dalam mendukung pembangunan daerah.

Pada aspek publikasi, buku profil pembangunan daerah belum diterbitkan. Ketiadaan dokumen ini menjadi catatan penting karena buku profil pembangunan berfungsi sebagai media resmi untuk menyajikan gambaran capaian pembangunan, arah kebijakan, serta potensi daerah. Tanpa adanya publikasi tersebut, informasi pembangunan belum terdokumentasi secara komprehensif dan belum dapat dijadikan rujukan bagi pemangku kepentingan.

**Tabel 8. Capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya dalam Publikasi, Kerja Sama, dan Konsultasi Publik Tahun 2024**

<b>Kategori</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2024</b>
<b>Publikasi Pembangunan Daerah</b>	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-
<b>Koordinasi Kerja Sama Daerah</b>	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-
<b>Pelaksanaan Konsultasi Publik</b>	Jumlah Konsultasi Publik yang Dilaksanakan	3

Pada aspek kerja sama, tidak terdapat laporan kerja sama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas daerah atau antar lembaga belum berjalan optimal. Padahal, kerja sama daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi



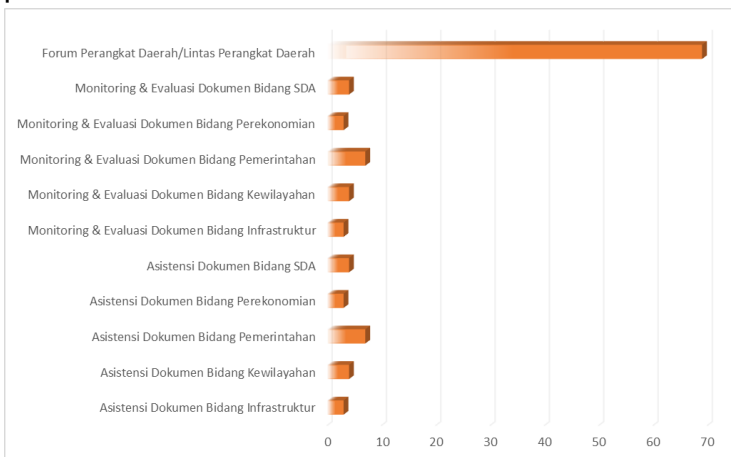
pembangunan, terutama di wilayah pegunungan yang membutuhkan dukungan lintas kabupaten/kota maupun mitra eksternal.

Sementara itu, pada aspek konsultasi publik, tercatat 3 kali pelaksanaan kegiatan konsultasi publik. Angka ini menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Konsultasi publik menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat. Meski jumlahnya masih terbatas, kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat legitimasi perencanaan pembangunan daerah.


Secara keseluruhan, capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan adanya kekosongan pada aspek publikasi dan kerja sama, namun tetap menunjukkan komitmen pada pelibatan masyarakat melalui konsultasi publik. Evaluasi terhadap kondisi ini penting agar ke depan publikasi pembangunan dapat diterbitkan secara rutin, kerja sama daerah lebih terkoordinasi, dan konsultasi publik diperluas untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

#### 3.4.4. Capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya dalam Asistensi, Monitoring, dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Bappeda Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Pada aspek asistensi dokumen, tercatat 3 laporan bidang infrastruktur, 4 laporan bidang kewilayahan, 7 laporan bidang pemerintahan, 3 laporan bidang perekonomian, serta 4 laporan bidang sumber daya alam (SDA). Distribusi ini menunjukkan bahwa perhatian terbesar diberikan pada bidang pemerintahan, sementara bidang perekonomian masih relatif terbatas.



**Gambar 17. Capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya dalam Asistensi, Monitoring, dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024**



Selain asistensi, Bappeda juga menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi dokumen dengan jumlah yang sama pada setiap bidang: 3 laporan bidang infrastruktur, 4 laporan bidang kewilayahan, 7 laporan bidang pemerintahan, 3 laporan bidang perekonomian, dan 4 laporan bidang SDA. Konsistensi antara asistensi dan monitoring memperlihatkan adanya kesinambungan dalam proses perencanaan dan evaluasi, sehingga setiap dokumen yang difasilitasi juga mendapat pengawasan terhadap implementasinya.

Pada aspek koordinasi lintas sektor, Bappeda mencatat capaian yang cukup besar dengan 69 berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Angka ini menegaskan bahwa forum koordinasi menjadi salah satu instrumen utama dalam menyatukan berbagai kepentingan dan memastikan sinkronisasi program pembangunan antar perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian Bappeda Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan keseimbangan antara asistensi, monitoring, dan koordinasi. Bidang pemerintahan mendapat perhatian lebih besar, sementara bidang perekonomian masih relatif kecil. Forum perangkat daerah menjadi kekuatan utama dalam mengintegrasikan perencanaan lintas sektor.

Evaluasi lebih lanjut diperlukan agar distribusi perhatian antar bidang lebih seimbang, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

**3.4.5. Penyaringan Usulan Pembangunan Tahun 2024**

**Tabel 9. Penyaringan Usulan Pembangunan Tahun 2024**

<i>Uraian</i>	<i>Tahun 2024</i>
<i>Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>	40

Sepanjang tahun 2024, Bappeda Kabupaten Jayawijaya mencatat 40 usulan pembangunan yang terverifikasi oleh kecamatan. Proses penyaringan ini menjadi tahap penting dalam memastikan bahwa setiap usulan yang diajukan masyarakat melalui mekanisme perencanaan di tingkat kecamatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal, realistis untuk dilaksanakan, serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Verifikasi oleh kecamatan berfungsi sebagai filter awal yang menentukan kualitas usulan sebelum masuk ke tahap perencanaan di tingkat kabupaten. Dengan adanya 40 usulan yang lolos verifikasi, terlihat bahwa partisipasi masyarakat melalui kecamatan berjalan aktif, sekaligus

menegaskan peran kecamatan sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa penyaringan usulan pembangunan telah dilaksanakan secara konsisten. Namun, evaluasi lebih lanjut diperlukan agar usulan yang terverifikasi tidak hanya berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan diwujudkan dalam program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat Jayawijaya.

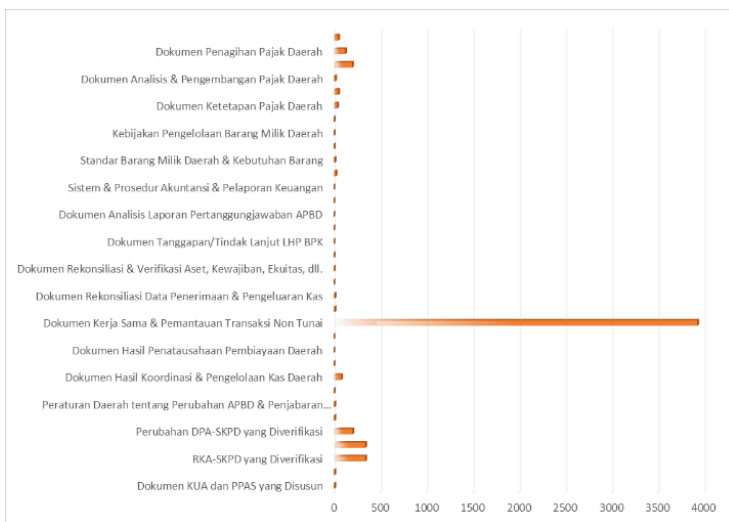
### **3.5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

#### **3.5.1. Capaian BPKAD Kabupaten Jayawijaya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, BPKAD Kabupaten Jayawijaya menunjukkan capaian yang sangat luas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada aspek perencanaan anggaran, tercatat 10 dokumen KUA dan PPAS yang disusun, serta 10 dokumen perubahan KUA dan PPAS. Selain itu, terdapat 342 RKA-SKPD yang diverifikasi dan jumlah yang sama untuk perubahan RKA-SKPD, serta 206 perubahan DPA-SKPD. Angka ini menegaskan intensitas kerja

BPKAD dalam memastikan konsistensi dan akurasi dokumen perencanaan anggaran.

Pada aspek regulasi, BPKAD menghasilkan 10 peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD, serta 10 peraturan daerah tentang perubahan APBD. Disertai dengan 5 dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran, capaian ini memperlihatkan peran BPKAD sebagai pengawal utama tata kelola fiskal daerah.



**Gambar 18. Capaian BPKAD Kabupaten Jayawijaya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024**

Dalam pengelolaan kas, tercatat 83 dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah, 3 dokumen pengendalian dan penerbitan anggaran kas/SPD, serta 1 dokumen



penatausahaan pembiayaan daerah. Selain itu, terdapat 1 dokumen koordinasi dana perimbangan dan transfer lainnya, yang menunjukkan keterlibatan BPKAD dalam menjaga arus kas dan transfer keuangan antar pemerintah.

Capaian yang paling menonjol adalah 3.931 dokumen kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai, yang menegaskan komitmen BPKAD terhadap digitalisasi dan transparansi transaksi keuangan daerah. Di sisi lain, terdapat pula 12 dokumen koordinasi piutang dan utang daerah, 12 dokumen rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas, serta 6 dokumen rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, dan ekuitas.

Pada aspek akuntabilitas, BPKAD menyusun 4 rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD, serta menghasilkan 1 dokumen tanggapan/tindak lanjut LHP BPK, 1 dokumen penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah, dan 1 dokumen analisis laporan pertanggungjawaban APBD. Disertai dengan 1 kebijakan/panduan teknis akuntansi pemerintah daerah dan 1 sistem/prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan, capaian ini memperlihatkan komitmen terhadap akuntabilitas fiskal.

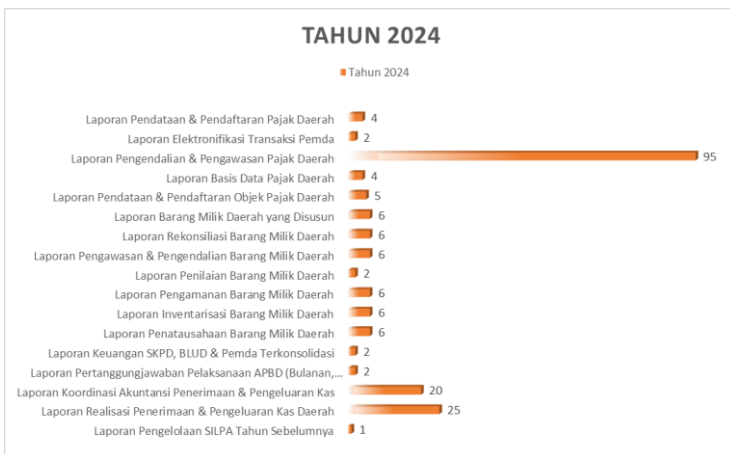
Dalam pengelolaan barang milik daerah, BPKAD menyusun 24 standar harga, 12 standar

barang milik daerah dan kebutuhan barang, 6 rencana kebutuhan barang milik daerah, 4 kebijakan pengelolaan barang milik daerah, serta 6 dokumen optimalisasi penggunaan dan penghapusan barang milik daerah.

Pada aspek perpajakan, tercatat 40 dokumen ketetapan pajak daerah, 50 dokumen verifikasi data pelaporan pajak daerah, 17 dokumen analisis dan pengembangan pajak daerah, 200 data pelaporan pajak daerah yang diverifikasi, 125 dokumen penagihan pajak daerah, serta 50 dokumen pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Angka ini menunjukkan intensitas tinggi dalam pengelolaan pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, capaian BPKAD Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan peran yang sangat dominan dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah: mulai dari perencanaan, regulasi, pengelolaan kas, akuntabilitas, pengelolaan aset, hingga perpajakan. Dominasi dokumen transaksi non tunai dan verifikasi pajak menegaskan arah kebijakan menuju transparansi, digitalisasi, dan peningkatan pendapatan daerah.

### 3.5.2. Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024



**Gambar 19. Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, BPKAD Kabupaten Jayawijaya telah menghasilkan berbagai laporan yang mencerminkan fungsi pengelolaan keuangan, aset, dan pajak daerah. Pada aspek pengelolaan kas, tercatat 1 laporan pengelolaan SILPA tahun sebelumnya, 25 laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, serta 20 laporan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Angka ini menunjukkan intensitas tinggi dalam menjaga arus kas daerah agar tetap terkendali dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal akuntabilitas fiskal, BPKAD menyusun 2 laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (bulanan, triwulan, semester) serta 2 laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Pemda yang terkonsolidasi. Laporan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi dan konsistensi pelaksanaan anggaran daerah.

Pada aspek pengelolaan barang milik daerah, BPKAD menghasilkan 6 laporan penatausahaan, 6 laporan inventarisasi, 6 laporan pengamanan, 2 laporan penilaian, 6 laporan pengawasan dan pengendalian, 6 laporan rekonsiliasi, serta 6 laporan penyusunan barang milik daerah. Konsistensi jumlah laporan memperlihatkan adanya sistematisasi dalam pengelolaan aset, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek penilaian agar nilai aset daerah lebih akurat.

Dalam bidang perpajakan, BPKAD mencatat 5 laporan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, 4 laporan basis data pajak daerah, 95 laporan pengendalian dan pengawasan pajak daerah, serta 4 laporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah. Dominasi laporan pengendalian pajak menunjukkan fokus besar pada pengawasan kepatuhan wajib pajak, meski pengembangan basis data masih relatif terbatas.

Selain itu, terdapat 2 laporan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, yang menandakan langkah awal menuju digitalisasi transaksi

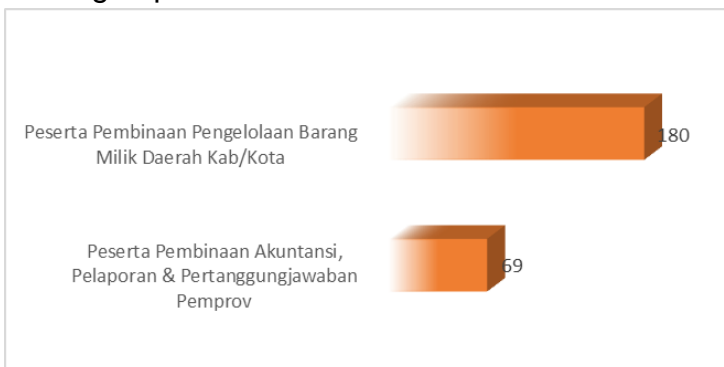
keuangan. Meski jumlahnya kecil, capaian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian BPKAD Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan keseimbangan antara pengelolaan kas, akuntabilitas APBD, pengelolaan aset, dan pengawasan pajak. Namun, distribusi laporan juga menegaskan bahwa pengawasan pajak menjadi prioritas utama, sementara aspek digitalisasi dan penilaian aset masih perlu diperkuat. Evaluasi lebih lanjut diperlukan agar seluruh fungsi BPKAD berjalan seimbang dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

### **3.5.3. Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui Program Pembinaan Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, BPKAD Kabupaten Jayawijaya melaksanakan program pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola keuangan dan aset daerah. Tercatat 69 peserta mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban di tingkat provinsi, yang menjadi sarana penting untuk memperkuat

akuntabilitas fiskal serta konsistensi pelaporan keuangan pemerintah daerah.



**Gambar 20. Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui Program Pembinaan Tahun 2024**

Selain itu, terdapat 180 peserta pembinaan pengelolaan barang milik daerah di tingkat kabupaten/kota. Jumlah yang relatif besar ini menunjukkan perhatian serius terhadap pengelolaan aset, sekaligus menegaskan komitmen untuk meningkatkan keterampilan aparatur dalam menjaga, mengoptimalkan, dan mengadministrasikan barang milik daerah secara profesional.

Capaian pembinaan tersebut memperlihatkan bahwa BPKAD Jayawijaya tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memberi prioritas pada pengelolaan aset daerah. Keseimbangan antara kedua bidang ini penting

untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

**3.5.4. Pembinaan BLUD Provinsi Tahun 2024**

**Tabel 10. Jumlah BLUD**

Lembaga	Tahun 2024
BLUD Provinsi yang Dibina	1

Pada tahun 2024, BPKAD Kabupaten Jayawijaya mencatat adanya 1 BLUD provinsi yang dibina. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah telah berjalan, meskipun masih terbatas pada satu lembaga. Pembinaan BLUD memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola keuangan lembaga layanan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

Keberadaan BLUD yang dibina menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas lembaga layanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, jumlah yang masih terbatas memperlihatkan perlunya perluasan cakupan pembinaan, sehingga lebih banyak BLUD dapat memperoleh pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan.

Secara keseluruhan, capaian ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun tata kelola BLUD yang sehat. Evaluasi lebih lanjut diperlukan agar pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek manajerial, inovasi layanan, dan keberlanjutan keuangan lembaga.

**3.5.5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2024**

**Tabel 11. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2024**

Unit	Tahun 2024
Sarana & Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4

Pada tahun 2024, BPKAD Kabupaten Jayawijaya mencatat adanya 4 unit sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah. Keberadaan sarana dan prasarana ini menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, baik dari sisi administrasi, pelayanan, maupun pengawasan.

Jumlah yang tersedia menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas dasar untuk menunjang proses pemungutan dan pengelolaan pajak. Namun, dengan kompleksitas



pajak daerah yang terus berkembang, jumlah sarana dan prasarana tersebut masih relatif terbatas. Hal ini berpotensi memengaruhi kecepatan pelayanan, akurasi data, serta kemampuan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan adanya komitmen awal dalam menyediakan dukungan infrastruktur bagi pengelolaan pajak daerah. Evaluasi lebih lanjut diperlukan agar sarana dan prasarana yang ada tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mampu mendukung digitalisasi, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan pajak daerah.

### **3.6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### **3.6.1. Pengelolaan Kebijakan dan Administrasi Kepegawaian Tahun 2024**


Sepanjang tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Jayawijaya telah menghasilkan sejumlah dokumen yang mencerminkan fungsi strategis dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Pada aspek kebijakan, tercatat 1 dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN, yang menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebutuhan formasi pegawai sesuai prioritas pembangunan daerah.



**Gambar 21. Capaian Pengelolaan Kebijakan dan Administrasi Kepegawaian Tahun 2024**

Selain itu, terdapat 1 dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK, serta 1 dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian. Kedua capaian ini menunjukkan bahwa BKPSDM tidak hanya berfokus pada rekrutmen, tetapi juga memastikan proses pemberhentian ASN berjalan sesuai ketentuan hukum dan administrasi.

Dalam bidang sistem informasi dan data, BKPSDM menghasilkan 1 dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian serta 1 dokumen pengelolaan data kepegawaian. Hal ini menegaskan



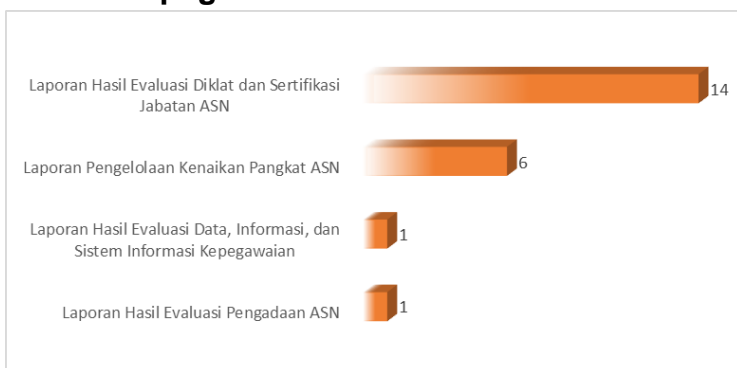
komitmen terhadap digitalisasi dan akurasi data sebagai fondasi manajemen ASN yang modern.

Pada aspek mobilitas jabatan, terdapat 4 dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, pelaksana, dan mutasi ASN antar daerah. Angka ini relatif tinggi dibanding capaian lainnya, menandakan dinamika yang cukup besar dalam penataan jabatan untuk mendukung efektivitas birokrasi.

Selain itu, BKPSDM juga menghasilkan 2 dokumen pengelolaan promosi ASN, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap pengembangan karier aparatur. Promosi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan motivasi dan kinerja ASN sesuai prinsip meritokrasi.

Secara keseluruhan, capaian BKPSDM Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan keseimbangan antara perumusan kebijakan, pengelolaan administrasi, digitalisasi data, serta mobilitas dan pengembangan karier ASN. Namun, jumlah dokumen yang masih terbatas pada beberapa aspek menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan ASN lebih komprehensif dan berkelanjutan.

### 3.6.2. Laporan Evaluasi dan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024



**Gambar 22. Capaian Evaluasi dan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Jayawijaya telah menghasilkan sejumlah laporan yang mencerminkan fungsi strategis dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Pada aspek rekrutmen, terdapat 1 laporan hasil evaluasi pengadaan ASN, yang menjadi dasar penting untuk menilai kesesuaian proses pengadaan dengan kebutuhan formasi dan ketentuan regulasi.

Selain itu, BKPSDM menyusun 1 laporan hasil evaluasi data, informasi, dan sistem informasi kepegawaian. Laporan ini menegaskan komitmen terhadap akurasi data dan penguatan sistem informasi sebagai fondasi manajemen ASN yang modern dan berbasis digital.

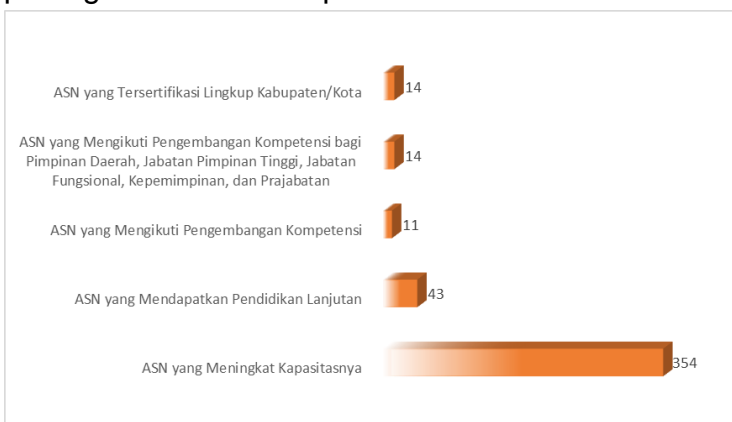
Dalam bidang pengembangan karier, tercatat 6 laporan pengelolaan kenaikan pangkat ASN. Angka ini menunjukkan adanya perhatian terhadap dinamika karier aparatur, sekaligus memastikan bahwa proses kenaikan pangkat berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan aturan yang berlaku.

Capaian terbesar terlihat pada aspek pengembangan kompetensi, dengan 14 laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN. Jumlah ini menegaskan bahwa pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi prioritas utama, sehingga ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan dan kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, capaian BKPSDM Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan keseimbangan antara evaluasi pengadaan, pengelolaan data, pengembangan karier, dan peningkatan kompetensi. Dominasi laporan evaluasi diklat dan sertifikasi menunjukkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, sebagai modal utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif.


### 3.6.3. Penguatan Kapasitas ASN melalui Sertifikasi dan Fasilitas Lembaga Profesi Tahun 2024

Pada tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Jayawijaya mencatat adanya 1 lembaga profesi ASN yang difasilitasi. Fasilitas ini berfungsi sebagai wadah pengembangan kompetensi dan penguatan standar profesi, sehingga proses sertifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas aparatur.



**Gambar 23. Capaian Penguatan Kapasitas ASN**

Output dari fasilitas tersebut terlihat nyata dalam capaian ASN sepanjang tahun 2024. Tercatat 354 ASN meningkat kapasitasnya melalui berbagai program pembinaan, 43 ASN mendapatkan pendidikan lanjutan, serta 11 ASN mengikuti



pengembangan kompetensi umum. Selain itu, terdapat 14 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi khusus bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan, serta 14 ASN yang tersertifikasi di lingkup kabupaten/kota.

Integrasi antara fasilitasi lembaga profesi dan capaian ASN ini memperlihatkan arah kebijakan BKPSDM Jayawijaya yang berfokus pada profesionalisme aparatur. Dengan adanya sertifikasi individu yang diakui dan dukungan kelembagaan profesi, penguatan kapasitas ASN menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa fasilitasi lembaga profesi ASN tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan kapasitas, pendidikan lanjutan, pengembangan kompetensi, dan sertifikasi aparatur. Hal ini menjadi modal penting dalam mewujudkan birokrasi daerah yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

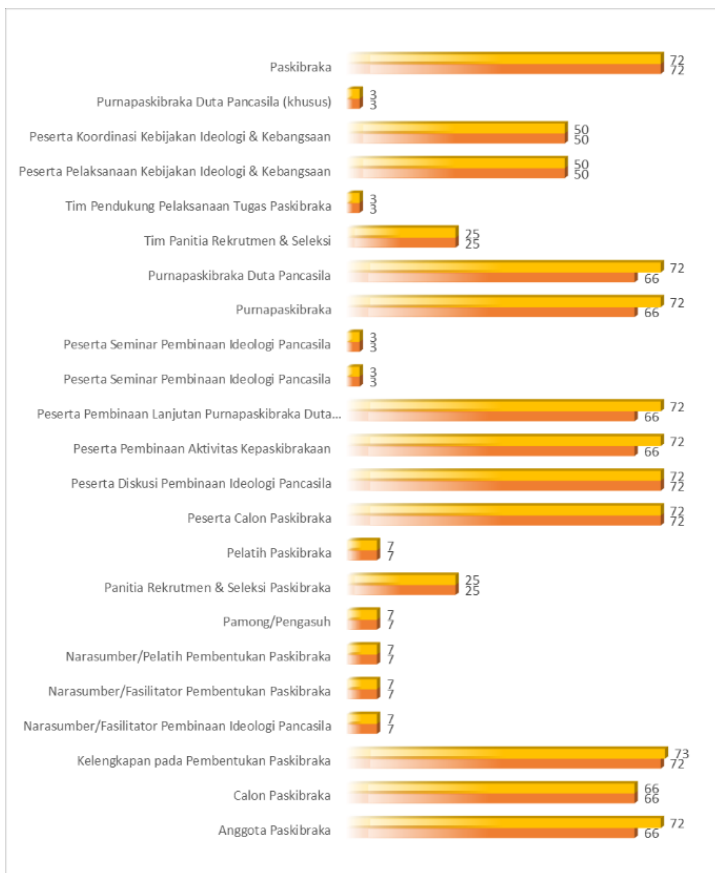
### **3.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **3.7.1. Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024–2025**

Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan konsistensi dalam pembinaan ideologi Pancasila dan kepaskibrakaan. Data memperlihatkan adanya peningkatan jumlah anggota Paskibraka dari 66 orang pada tahun 2024 menjadi 72 orang pada tahun 2025, yang menandakan bertambahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan kebangsaan. Jumlah calon Paskibraka tetap stabil di angka 66, sementara kelengkapan pembentukan Paskibraka meningkat dari 72 menjadi 73, menunjukkan adanya penguatan dukungan teknis dalam proses rekrutmen.

Peran narasumber, fasilitator, pelatih, pamong, dan panitia seleksi tetap terjaga dengan jumlah yang konsisten. Hal ini menegaskan bahwa Kesbangpol menjaga kualitas pembinaan melalui tenaga pendukung yang berpengalaman. Panitia rekrutmen dan seleksi tercatat sebanyak 25 orang, sedangkan tim pendukung pelaksanaan tugas Paskibraka berjumlah 3 orang, memperlihatkan struktur organisasi yang teratur.





**Gambar 24. Capaian Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024–2025**

Pada aspek pembinaan ideologi, tercatat 72 peserta diskusi pembinaan Pancasila serta jumlah yang sama untuk peserta seminar dan peserta koordinasi kebijakan ideologi dan kebangsaan. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat

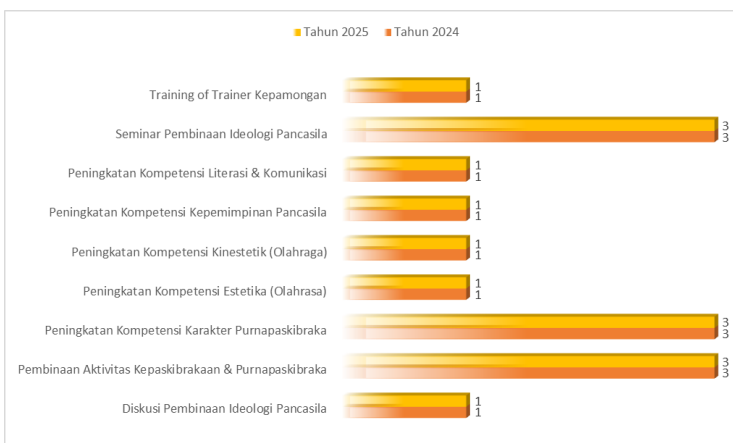
dalam mengikuti kegiatan yang memperkuat wawasan kebangsaan. Selain itu, terdapat 66 peserta pembinaan aktivitas kepaskibrakaan pada tahun 2024 yang meningkat menjadi 72 pada tahun 2025, serta jumlah yang sama untuk pembinaan lanjutan purnapaskibraka duta Pancasila.

Capaian lain yang penting adalah keberadaan purnapaskibraka duta Pancasila khusus sebanyak 3 orang, yang menjadi simbol kaderisasi ideologi di tingkat lokal. Konsistensi jumlah peserta pada kegiatan kebijakan ideologi dan kebangsaan (50 orang) memperlihatkan kesinambungan program yang diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai persatuan.

Secara keseluruhan, data tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa Kesbangpol Jayawijaya berhasil menjaga kesinambungan pembinaan ideologi Pancasila dan kepaskibrakaan. Peningkatan jumlah anggota Paskibraka dan peserta pembinaan menjadi indikator bahwa program ini semakin diterima oleh masyarakat, sementara konsistensi tenaga pendukung memperlihatkan stabilitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas.


### 3.7.2. Program Strategis Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi dan Kepemudaan Tahun 2024–2025

Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2024 hingga 2025 melaksanakan serangkaian program strategis yang berorientasi pada pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan kapasitas kepemudaan. Data menunjukkan konsistensi pelaksanaan kegiatan, dengan jumlah yang relatif stabil dari tahun ke tahun, menandakan adanya kesinambungan kebijakan kelembagaan.



**Gambar 25. Capaian Program Strategis Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi dan Kepemudaan Tahun 2024–2025**

Pada aspek ideologi, tercatat 1 kegiatan diskusi pembinaan Pancasila setiap tahun, serta 3



kegiatan seminar pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan secara rutin. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan menanamkan kesadaran kolektif di kalangan generasi muda.

Dalam bidang kepaskibrakaan, terdapat 3 kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka yang berlangsung secara berkesinambungan. Program ini diperkuat dengan 3 kegiatan peningkatan kompetensi karakter purnapaskibraka, yang diarahkan untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan.

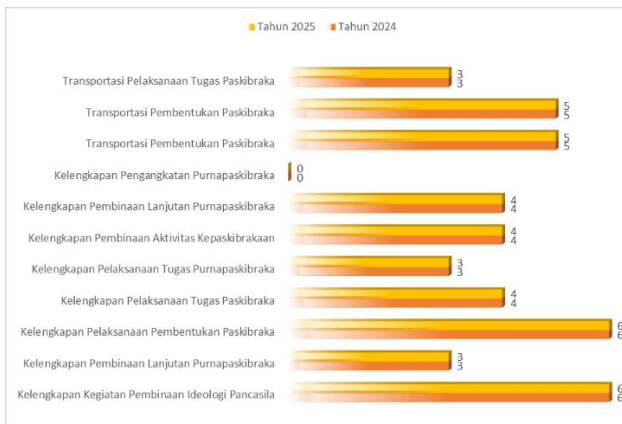
Kesbangpol juga menekankan keseimbangan pengembangan keterampilan melalui 1 kegiatan peningkatan kompetensi estetika (olahraga), 1 kegiatan peningkatan kompetensi kinestetik (olahraga), serta 1 kegiatan peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila. Ketiga kegiatan ini menjadi instrumen pembinaan yang menyeimbangkan dimensi mental, fisik, dan kepemimpinan.

Selain itu, terdapat 1 kegiatan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi, yang berfungsi memperkuat kemampuan generasi muda dalam menyampaikan gagasan dan berinteraksi secara efektif. Capaian ini dilengkapi dengan 1 kegiatan Training of Trainer kepamongan, yang menyiapkan

tenaga pendamping berkualitas untuk mendukung keberhasilan program kepaskibrakaan.

Secara keseluruhan, program strategis Kesbangpol Jayawijaya tahun 2024–2025 memperlihatkan konsistensi dalam menjaga kesinambungan pembinaan ideologi dan kepemudaan. Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin menegaskan komitmen kelembagaan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan siap menjadi teladan di masyarakat.

### 3.7.3. Sarana dan Kelengkapan Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024–2025



**Gambar 26. Jumlah Sarana dan Kelengkapan Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024-2025**

Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2024 hingga 2025 mencatat ketersediaan sarana dan kelengkapan yang mendukung pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila serta aktivitas kepaskibrakaan. Data menunjukkan konsistensi jumlah sarana, menandakan adanya stabilitas dukungan kelembagaan terhadap kegiatan kepemudaan dan kebangsaan.

Pada aspek ideologi, tercatat 6 kelengkapan kegiatan pembinaan Pancasila yang tersedia setiap tahun. Jumlah ini menjadi indikator kesiapan fasilitas untuk mendukung diskusi, seminar, dan aktivitas pembinaan ideologi.

Dalam bidang kepaskibrakaan, terdapat 6 kelengkapan pelaksanaan pembentukan Paskibraka, 4 kelengkapan pelaksanaan tugas Paskibraka, serta 3 kelengkapan pelaksanaan tugas Purnapaskibraka. Angka ini menunjukkan adanya dukungan sarana yang memadai untuk memastikan proses rekrutmen, pembentukan, dan pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar.

Pembinaan lanjutan purnapaskibraka tercatat memiliki 3 hingga 4 kelengkapan, yang memperlihatkan adanya perhatian terhadap kesinambungan pembinaan alumni Paskibraka sebagai duta ideologi Pancasila. Namun, pada aspek pengangkatan purnapaskibraka, data

menunjukkan angka 0, yang menandakan belum adanya dukungan sarana khusus untuk proses tersebut.

Transportasi menjadi salah satu komponen penting, dengan 5 unit transportasi untuk pembentukan Paskibraka dan 3 unit transportasi untuk pelaksanaan tugas Paskibraka. Ketersediaan ini memperlihatkan adanya dukungan mobilitas yang memungkinkan kelancaran kegiatan, baik pada tahap rekrutmen maupun pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, data tahun 2024–2025 memperlihatkan bahwa Kesbangpol Jayawijaya telah menyiapkan sarana dan kelengkapan yang relatif stabil untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila dan kepaskibrakaan. Konsistensi jumlah sarana menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga kualitas pelaksanaan program, meskipun masih terdapat ruang penguatan pada aspek pengangkatan purnapaskibraka.

#### **3.7.4. Dokumen dan Laporan Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024–2025**

Kesbangpol Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2024 hingga 2025 menghasilkan sejumlah dokumen dan laporan yang mencerminkan fungsi kelembagaan dalam pembinaan ideologi Pancasila serta aktivitas kepaskibrakaan. Data

menunjukkan konsistensi capaian, dengan jumlah dokumen dan laporan yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Pada aspek kebijakan, tercatat 1 dokumen kebijakan teknis ideologi dan kebangsaan setiap tahun. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam mengarahkan program pembinaan ideologi di tingkat daerah.



**Gambar 27. Jumlah Dokumen dan Laporan Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi dan Kepaskibrakaan Tahun 2024–2025**

Dalam bidang evaluasi, terdapat 2 laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disusun secara rutin. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan program.




Kesbangpol juga menghasilkan 2 dokumen pembentukan karakter keluarga (kesadaran Pancasila). Dokumen ini menegaskan perhatian terhadap pembinaan ideologi yang berbasis keluarga, sebagai unit sosial terkecil yang berperan dalam menanamkan nilai kebangsaan.

Pada ranah kepaskibrakaan, terdapat 1 laporan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan, 2 dokumen pelaksanaan tugas Paskibraka, serta 1 laporan pelaksanaan tugas Purnapaskibraka. Capaian ini menunjukkan adanya dokumentasi yang sistematis terhadap kegiatan rekrutmen, pembentukan, dan pelaksanaan tugas generasi muda sebagai simbol kebangsaan.

Selain itu, Kesbangpol menyusun 1 laporan pembinaan lanjutan purnapaskibraka setiap tahun. Laporan ini menjadi bukti kesinambungan pembinaan alumni Paskibraka agar tetap berperan sebagai duta ideologi Pancasila di masyarakat.

Secara keseluruhan, dokumen dan laporan yang dihasilkan Kesbangpol Jayawijaya tahun 2024–2025 memperlihatkan keseimbangan antara kebijakan, evaluasi, pembinaan keluarga, serta aktivitas kepaskibrakaan. Konsistensi jumlah dokumen menegaskan komitmen kelembagaan dalam menjaga kualitas program ideologi dan kepemudaan, sekaligus memastikan bahwa setiap



kegiatan tercatat secara formal dan dapat  
dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil di wilayah pegunungan Papua. Lembaga ini berperan sebagai penjamin identitas hukum setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

Selain memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Disdukcapil Jayawijaya bertanggung jawab atas pengelolaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur terbatas. Keakuratan data kependudukan juga mendukung kebijakan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemilu.

Dalam menjalankan tugasnya, Disdukcapil Jayawijaya melaksanakan pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa penting, penatausahaan

dokumen, serta pengelolaan arsip kependudukan. Lembaga ini juga menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan di daerah.

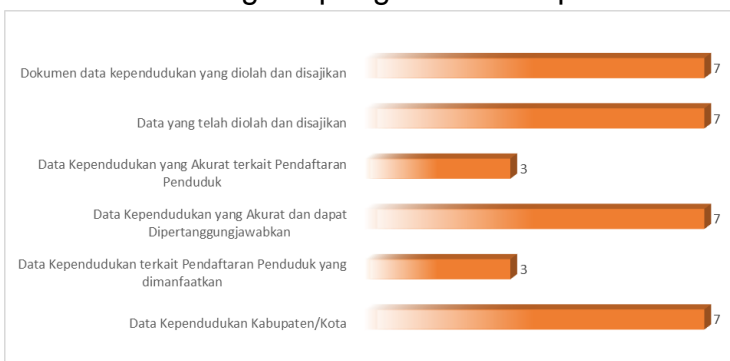
Transformasi layanan menuju digital menjadi salah satu komitmen utama Disdukcapil Jayawijaya. Melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, Disdukcapil berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap warga Jayawijaya memperoleh identitas hukum yang sah sebagai dasar perlindungan dan akses terhadap berbagai layanan publik.

#### **4.1. Dokumen Data Kependudukan**

Pengelolaan administrasi kependudukan di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan komitmen Disdukcapil dalam menyediakan data yang akurat, layanan yang baik, dan dokumentasi yang tertata. Berbagai dokumen, laporan, layanan, dan kegiatan lapangan disiapkan untuk memastikan setiap penduduk memiliki identitas resmi serta mendukung pembangunan daerah. Dokumen menjadi dasar keakuratan data, laporan dipakai untuk evaluasi, layanan ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas, sementara kegiatan

sosialisasi dan pendataan membantu melibatkan masyarakat serta memperbarui data.

Tabel berikut menampilkan capaian administrasi kependudukan Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 sebagai acuan menilai program dan merumuskan langkah penguatan ke depan.



**Gambar 28. Capaian Administrasi Kependudukan**

Dokumen kependudukan Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan konsistensi dalam penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tercatat 7 dokumen data kependudukan kabupaten/kota yang menjadi dasar utama perencanaan, serta 3 dokumen terkait pendaftaran penduduk yang dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan administrasi.

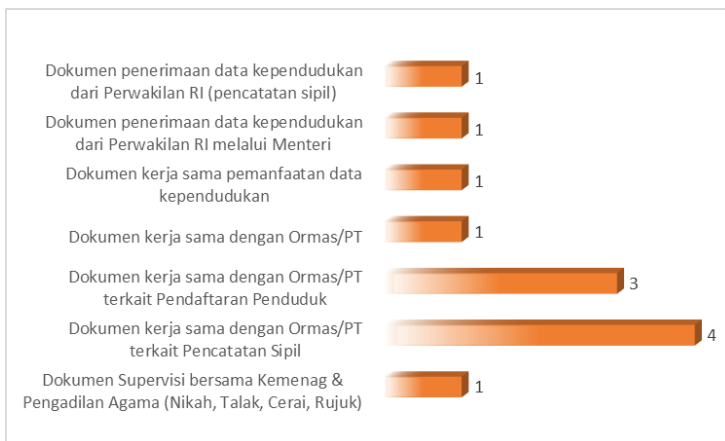
Keakuratan data diperkuat dengan adanya 7 dokumen kependudukan yang akurat dan 3 dokumen akurat terkait pendaftaran penduduk, yang menegaskan komitmen Disdukcapil dalam menjaga

validitas informasi. Selain itu, terdapat 7 dokumen hasil olahan dan penyajian data, serta 7 dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan, yang memperlihatkan upaya sistematis dalam mengolah informasi menjadi bahan analisis dan laporan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Jayawijaya telah menyiapkan landasan administrasi kependudukan yang kuat, dengan fokus pada keakuratan, pemanfaatan, dan penyajian data. Dokumen-dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang berbasis data.

#### **4.2. Kerja Sama dan Supervisi Administrasi Kependudukan**

Kerja sama dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan adanya koordinasi lintas lembaga serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Tercatat 1 dokumen supervisi bersama Kementerian Agama dan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai, dan rujuk. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi data kependudukan dengan lembaga keagamaan untuk menjaga validitas pencatatan sipil.



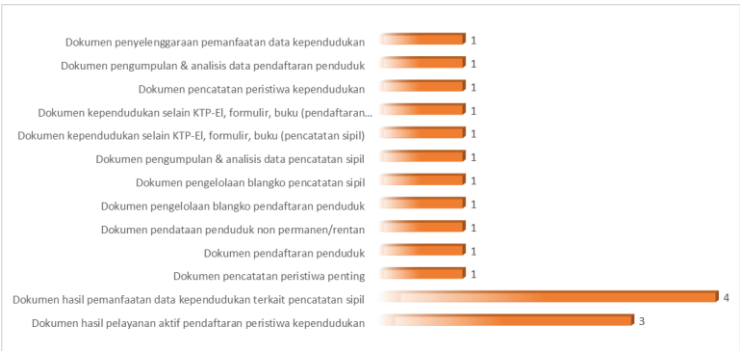
**Gambar 29. Capaian Kerjasama dan Supervisi**

Selain itu, terdapat 4 dokumen kerja sama dengan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil serta 3 dokumen kerja sama terkait pendaftaran penduduk. Kolaborasi ini memperlihatkan upaya Disdukcapil dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan.

Kerja sama juga tercermin dalam 1 dokumen pemanfaatan data kependudukan, yang menunjukkan adanya sinergi dalam penggunaan data untuk kepentingan pembangunan. Dukungan dari tingkat pusat ditunjukkan melalui dokumen penerimaan data kependudukan dari Perwakilan RI melalui Menteri, baik untuk pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, masing-masing sebanyak 1 dokumen.

Secara keseluruhan, dokumen kerja sama dan supervisi ini menjadi bukti bahwa Disdukcapil Jayawijaya tidak hanya berfokus pada pelayanan administratif, tetapi juga membangun jaringan koordinasi yang luas. Hal ini memperkuat legitimasi data kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

### 4.3. Pengelolaan Dokumen dan Blangko



**Gambar 30. Capaian Pengelolaan Dokumen dan Blangko**

Pengelolaan dokumen dan blangko administrasi kependudukan Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dalam mendukung pelayanan publik. Tercatat 3 dokumen hasil pelayanan aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan 4 dokumen pemanfaatan data kependudukan terkait



pencatatan sipil, yang menegaskan peran Disdukcapil dalam memastikan setiap peristiwa kependudukan tercatat dengan baik.

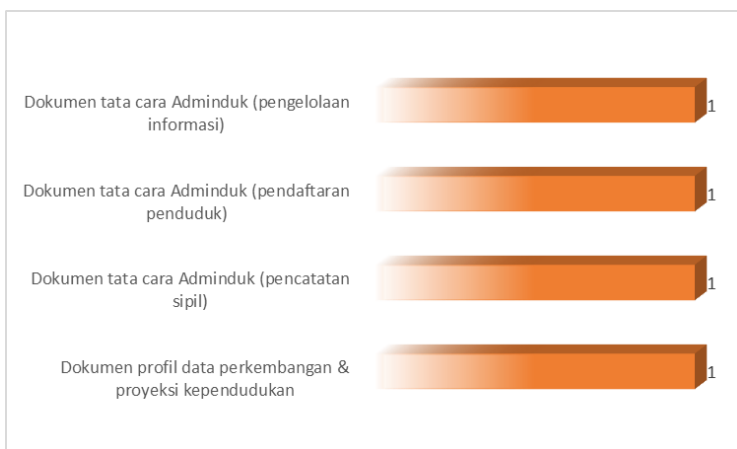
Selain itu, terdapat dokumen khusus terkait pencatatan peristiwa penting, pendaftaran penduduk, serta pendataan penduduk non permanen dan rentan, masing-masing sebanyak 1 dokumen, yang memperlihatkan perhatian terhadap kelompok masyarakat dengan kebutuhan administrasi khusus.

Pengelolaan teknis juga tercermin dalam dokumen pengelolaan blangko pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta dokumen analisis data baik untuk pencatatan sipil maupun pendaftaran penduduk. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol terhadap penggunaan formulir dan blangko, sekaligus pemanfaatan data untuk analisis kebijakan.

Keberadaan dokumen kependudukan selain KTP-el, formulir, dan buku baik untuk pencatatan sipil maupun pendaftaran penduduk, serta dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, menegaskan bahwa Disdukcapil Jayawijaya tidak hanya berfokus pada dokumen utama, tetapi juga pada instrumen pendukung yang diperlukan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, dokumen-dokumen ini menjadi bukti bahwa pengelolaan administrasi kependudukan di Jayawijaya telah berjalan dengan prinsip akurasi, keteraturan, dan akuntabilitas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik.

#### 4.4. Dokumen Tata Cara Adminduk



**Gambar 31. Jumlah Dokumen Tata Cara Adminduk**

Dokumen tata cara dan profil administrasi kependudukan Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan layanan kependudukan. Keberadaan dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan memberikan gambaran menyeluruh mengenai

dinamika jumlah penduduk serta kebutuhan administrasi di masa mendatang.

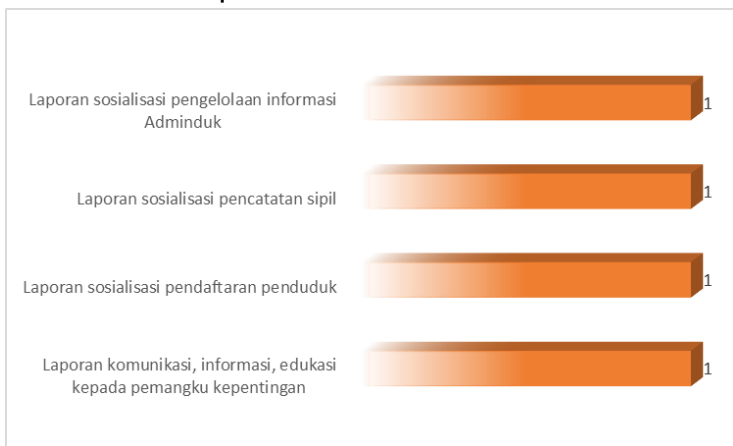
Selain itu, terdapat dokumen tata cara yang disusun untuk tiga aspek utama, yaitu pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Ketiga dokumen ini berfungsi sebagai acuan teknis bagi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan administrasi kependudukan di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, dokumen tata cara dan profil ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Jayawijaya tidak hanya berfokus pada pelayanan langsung, tetapi juga pada penyusunan pedoman yang sistematis. Hal ini memperkuat konsistensi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan memiliki dasar aturan yang jelas dan terarah.

#### **4.5. Laporan Komunikasi, Sosialisasi dan Edukasi**

Laporan komunikasi, sosialisasi, dan edukasi yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan adanya perhatian serius terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dan

pemangku kepentingan mengenai pentingnya administrasi kependudukan.



**Gambar 32. Jumlah Laporan Komunikasi, Sosialisasi dan Edukasi**

Tercatat 1 laporan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan, yang berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan strategis agar kebijakan kependudukan dapat dipahami dan diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, terdapat laporan sosialisasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi Adminduk, masing-masing sebanyak 1 dokumen, yang memperlihatkan upaya langsung menjangkau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan prosedur dan manfaat dokumen kependudukan.

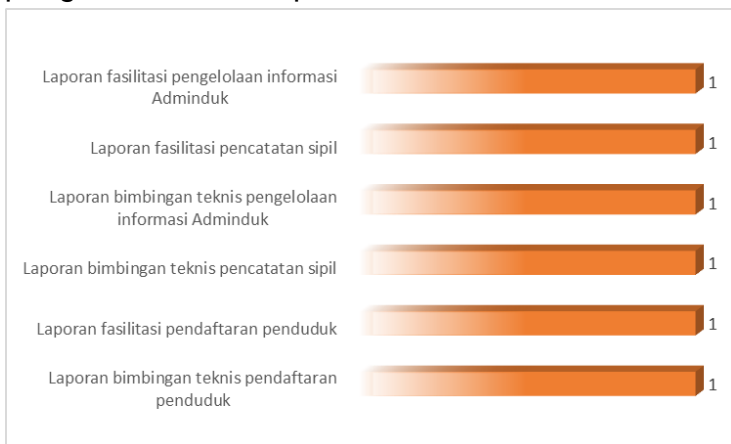
Secara keseluruhan, laporan pada bagian ini menegaskan bahwa komunikasi dan sosialisasi bukan sekadar kegiatan informatif, tetapi juga instrumen edukatif yang memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, Disdukcapil Jayawijaya berupaya memastikan setiap warga memahami hak dan kewajiban dalam administrasi kependudukan, sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih efektif dan berbasis data akurat.

#### **4.6. Laporan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi**

Laporan bimbingan teknis dan fasilitasi yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kapasitas aparatur serta kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.

Tercatat 1 laporan bimbingan teknis pendaftaran penduduk dan 1 laporan fasilitasi pendaftaran penduduk, yang menegaskan komitmen dalam memperkuat kompetensi petugas sekaligus memberikan dukungan operasional agar pelayanan berjalan sesuai prosedur. Selain itu, terdapat 1 laporan bimbingan teknis pencatatan sipil dan 1 laporan bimbingan teknis pengelolaan informasi Adminduk, yang memperlihatkan upaya

sistematis dalam memastikan aparaturnya memahami tata cara pencatatan peristiwa penting serta pengelolaan data kependudukan.

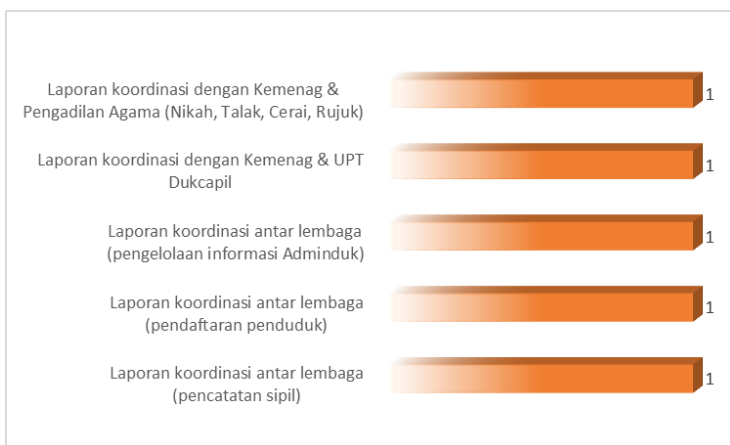


**Gambar 33. Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi**

Dukungan fasilitasi juga diberikan melalui 1 laporan fasilitasi pencatatan sipil dan 1 laporan fasilitasi pengelolaan informasi Adminduk, yang berfungsi sebagai instrumen pendampingan teknis untuk menjaga kualitas pelayanan di lapangan.

Secara keseluruhan, laporan pada bagian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitasi menjadi strategi utama Disdukcapil Jayawijaya dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

## 4.7. Laporan Koordinasi Antar Lembaga



**Gambar 34. Jumlah Laporan Koordinasi Antar Lembaga**

Laporan koordinasi antar lembaga yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tercatat 1 laporan koordinasi antar lembaga untuk pencatatan sipil, 1 laporan untuk pendaftaran penduduk, dan 1 laporan untuk pengelolaan informasi Adminduk. Hal ini menegaskan bahwa koordinasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek utama administrasi kependudukan.

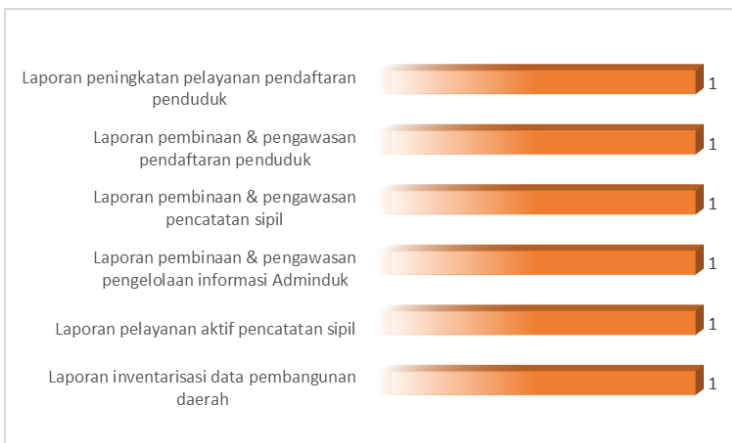
Selain itu, terdapat 1 laporan koordinasi dengan Kementerian Agama dan UPT Dukcapil, serta 1 laporan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama terkait peristiwa nikah, talak, cerai, dan rujuk. Kedua laporan ini memperlihatkan pentingnya integrasi data kependudukan dengan lembaga keagamaan dan unit teknis, sehingga pencatatan peristiwa penting dapat dilakukan secara sah dan akurat.

Secara keseluruhan, laporan koordinasi antar lembaga ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Jayawijaya tidak bekerja secara terpisah, melainkan membangun jaringan kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak. Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga keakuratan data, memperkuat legitimasi dokumen kependudukan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

#### **4.8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelayanan**

Laporan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan adanya mekanisme kontrol yang teratur dalam mendukung mutu layanan administrasi kependudukan.





**Gambar 35. Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawan, dan Pelayanan**

Terdapat 1 laporan inventarisasi data pembangunan daerah yang menjadi dasar perencanaan berbasis data kependudukan. Selain itu, 1 laporan pelayanan aktif pencatatan sipil menunjukkan komitmen lembaga dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat secara proaktif.

Pengawasan dilaksanakan melalui laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Adminduk, pencatatan sipil, serta pendaftaran penduduk, masing-masing sebanyak 1 dokumen. Laporan ini menegaskan adanya sistem monitoring yang memastikan setiap aspek administrasi berjalan sesuai prosedur.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tercermin dalam 1 laporan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, yang menjadi bukti adanya langkah perbaikan berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

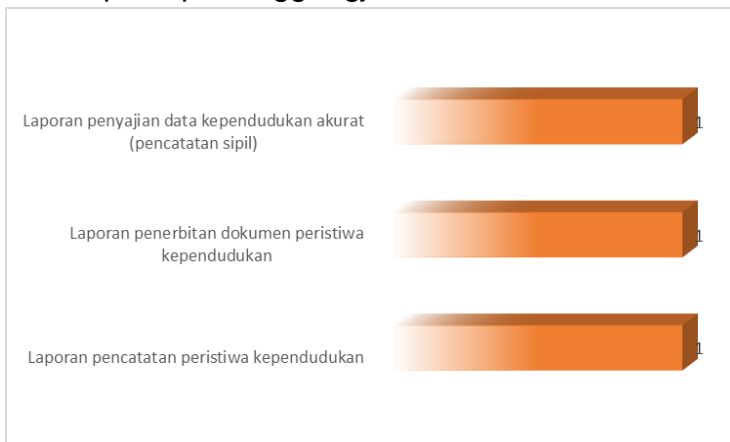
Secara keseluruhan, laporan pada bagian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Jayawijaya menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan secara terpadu. Hasilnya adalah administrasi kependudukan yang lebih akuntabel, transparan, dan relevan dengan arah pembangunan daerah.

#### **4.9. Laporan Pencatatan dan Penyajian Data**

Laporan pencatatan dan penyajian data yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan hasil nyata dari proses administrasi kependudukan.

Terdapat 1 laporan pencatatan peristiwa kependudukan yang menjadi bukti bahwa setiap peristiwa penting telah tercatat secara resmi sesuai prosedur. Selain itu, 1 laporan penerbitan dokumen peristiwa kependudukan menunjukkan tindak lanjut administratif berupa penerbitan dokumen sah yang dapat digunakan masyarakat dalam berbagai keperluan. Keakuratan data diperkuat melalui 1

laporan penyajian data kependudukan akurat untuk pencatatan sipil, yang menegaskan komitmen lembaga dalam menyediakan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.



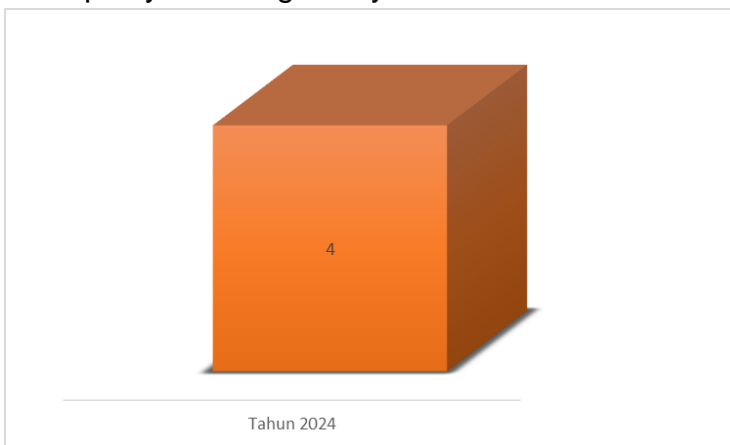
**Gambar 36. Jumlah laporan Pencatatan dan Penyajian Data**

Secara keseluruhan, laporan pada bagian ini menunjukkan bahwa pencatatan, penerbitan dokumen, dan penyajian data berjalan secara terpadu. Hasilnya adalah administrasi kependudukan yang lebih tertib, akurat, dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

#### **4.10. Layanan Pencatatan Sipil**

Laporan layanan pencatatan sipil Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan

adanya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan secara terukur. Tercatat 4 layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan, yang mencerminkan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperbaiki akses dan mutu pelayanan bagi masyarakat.

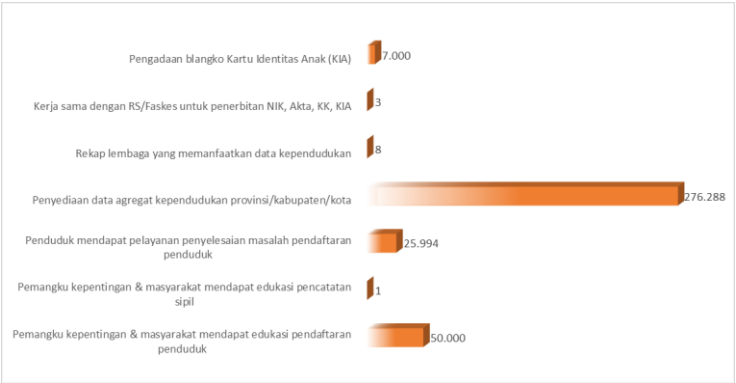


Peningkatan layanan ini tidak hanya berupa penambahan jumlah kegiatan, tetapi juga perbaikan mekanisme pelayanan agar lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya penguatan layanan, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga hak-hak administratif mereka dapat terpenuhi secara sah.

Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan bahwa Disdukcapil Jayawijaya berorientasi pada pelayanan publik yang lebih

responsif. Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan menjadi indikator keberhasilan dalam membangun sistem administrasi kependudukan yang akuntabel dan mendukung pembangunan daerah.


#### 4.11. Data Pemangku Kepentingan dan Fasilitas



**Gambar 37. Data Pemangku Kepentingan dan Fasilitas**

Laporan data, pemangku kepentingan, dan fasilitas tahun 2024 memperlihatkan capaian yang signifikan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Jayawijaya.

Tercatat 50.000 pemangku kepentingan dan masyarakat mendapat edukasi pendaftaran penduduk, yang menunjukkan jangkauan luas kegiatan sosialisasi dan edukasi. Sementara itu, 1 laporan edukasi pencatatan sipil menjadi bukti




adanya perhatian terhadap aspek legalitas peristiwa penting dalam kehidupan warga.

Pelayanan langsung kepada masyarakat tercermin dalam 25.994 penduduk yang mendapat penyelesaian masalah pendaftaran penduduk, menandakan adanya respons cepat terhadap kebutuhan administratif warga. Dukungan data juga terlihat melalui penyediaan 276.288 data agregat kependudukan provinsi, kabupaten, dan kota, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan berbasis data.

Pemanfaatan data kependudukan semakin nyata dengan adanya 8 lembaga yang tercatat memanfaatkan data kependudukan. Selain itu, kerja sama dengan sektor kesehatan diperkuat melalui 3 kerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk penerbitan NIK, Akta, KK, dan KIA, yang memudahkan integrasi layanan kependudukan dengan layanan kesehatan.

Fasilitas pendukung juga diperhatikan melalui pengadaan 7.000 blangko Kartu Identitas Anak (KIA), yang memastikan ketersediaan dokumen bagi anak-anak sebagai bagian dari perlindungan hak identitas sejak dini. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Jayawijaya menjalankan fungsi edukasi, pelayanan, penyediaan data, kerja sama lintas sektor, dan pengadaan fasilitas secara terpadu.



Hasilnya adalah sistem administrasi kependudukan yang lebih inklusif, responsif, dan mendukung pembangunan daerah.

#### **4.12. Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan**

Kegiatan sosialisasi dan pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek edukasi masyarakat sekaligus pemetaan kondisi kependudukan yang lebih spesifik.

Tercatat 1 kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait dokumen kependudukan, yang menjadi sarana penting dalam meningkatkan pemahaman warga mengenai prosedur dan manfaat dokumen resmi. Sosialisasi ini berfungsi sebagai media edukasi publik agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk sebagai dasar akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.




**Gambar 38. Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan**

Selain itu, terdapat 1 kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan Adminduk, yang menegaskan komitmen lembaga dalam memperhatikan kelompok masyarakat dengan kondisi administrasi khusus. Pendataan ini berperan penting untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk yang berpindah-pindah atau berada dalam situasi rentan, tetap tercatat dalam sistem kependudukan sehingga hak-hak administratif mereka dapat terlindungi.

Secara keseluruhan, laporan pada bagian ini memperlihatkan keseimbangan antara edukasi masyarakat dan pendataan kelompok rentan. Hasilnya adalah administrasi kependudukan yang





lebih inklusif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan sosial di daerah.

## BAB V

### PENDIDIKAN

#### 5.1. Jumlah sekolah, Guru, dan Murid (SD, SMP, SMA/SMK)




Kabupaten Jayawijaya memiliki struktur pendidikan yang mencerminkan tantangan geografis dan sosial khas wilayah pegunungan tengah Papua. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dasar (SD/MI sederajat) memiliki cakupan paling luas,

dengan 139 sekolah, 1.045 guru, dan 20.546 murid. Jumlah ini menandakan bahwa pendidikan dasar menjadi titik awal utama bagi anak-anak Jayawijaya untuk mengakses pendidikan formal. Namun, rasio murid terhadap guru yang mencapai sekitar 20:1 menunjukkan bahwa beban pengajaran masih tinggi, terutama di kampung-kampung terpencil.

Pada jenjang menengah pertama (SMP/MTs sederajat), jumlah sekolah menurun menjadi 48, dengan 476 guru dan 5.596 murid. Penurunan ini cukup tajam dibandingkan jenjang sebelumnya, dan dapat menjadi sinyal awal adanya hambatan transisi pendidikan. Faktor seperti jarak tempuh, keterbatasan fasilitas, dan kondisi sosial ekonomi keluarga berperan dalam menurunnya partisipasi siswa. Rasio murid terhadap guru di jenjang ini lebih rendah, sekitar 12:1, yang secara teoritis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jika didukung oleh sarana dan pelatihan guru yang memadai.

Jenjang menengah atas (SMA/MA sederajat) mencatat 22 sekolah, 267 guru, dan 1.560 murid. Sementara itu, jenjang kejuruan (SMK sederajat) memiliki 12 sekolah, 113 guru, dan 2.400 murid. Menariknya, jumlah murid SMK lebih tinggi dibandingkan SMA, meskipun jumlah fasilitas dan tenaga pengajar lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jayawijaya mulai melihat pendidikan vokasional sebagai jalur yang lebih relevan dan aplikatif, terutama untuk mendukung keterampilan kerja dan ekonomi lokal.

Data ini memberikan gambaran penting untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Penurunan jumlah murid dari jenjang



dasar ke menengah atas perlu ditindaklanjuti dengan strategi peningkatan akses, seperti pembangunan sekolah baru di distrik yang belum terjangkau, penyediaan transportasi pendidikan, dan program beasiswa transisi. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas guru melalui pelatihan berbasis konteks lokal, serta mendorong kurikulum yang relevan dengan budaya dan potensi wilayah.

Selain itu, data ini menunjukkan bahwa pendidikan di Jayawijaya masih menghadapi tantangan besar, tetapi juga memiliki peluang besar untuk tumbuh. Pendidikan vokasional seperti SMK menjadi harapan baru bagi anak-anak muda yang ingin langsung terjun ke dunia kerja atau membangun usaha sendiri. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, pendidikan di Jayawijaya dapat menjadi fondasi pembangunan manusia yang tangguh dan berdaya saing.

Integrasi data ini ke dalam sistem informasi pembangunan daerah akan memperkuat tata kelola pendidikan yang adaptif dan berkeadilan. Pemerintah daerah dapat menggunakan data ini untuk menetapkan prioritas anggaran, merancang intervensi lintas sektor, dan memastikan bahwa setiap anak Jayawijaya memiliki kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang.

**Tabel 12. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid 2025**

<b>Satuan Pendidikan</b>	<b>Jumlah Fasilitas</b>	<b>Guru</b>	<b>Murid</b>
<b>SD/MI Sederajat</b>	139	1045	20546
<b>SMP/MTs Sederajat</b>	48	476	5596
<b>SMA/MA Sederajat</b>	22	267	1560
<b>SMK Sederajat</b>	12	113	2400

Sumber: Jayawijaya dalam Angka (BPS,2025)

## **5.2. Capaian Program Pendidikan dan Pelestarian Bahasa Daerah**

Upaya pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Jayawijaya tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan formal, tetapi juga pada pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Program-program yang dijalankan mencakup konservasi, revitalisasi, serta kajian vitalitas bahasa daerah, yang menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya di tengah arus modernisasi.

Selain itu, capaian pendidikan juga ditunjukkan melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang guru, ruang perpustakaan, serta

pengembangan silabus muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar. Dukungan terhadap peserta didik, khususnya siswa PAUD, melalui pemberian biaya personil, menjadi bagian penting dalam memastikan akses pendidikan sejak usia dini.

Data capaian berikut memberikan gambaran kuantitatif mengenai hasil program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pendidikan serta kebudayaan di masa mendatang.


**Tabel 13. Capaian Program Pendidikan dan Pelestarian Bahasa Daerah**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TAHUN 2024</b>
1	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	Bahasa	1
2	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	Bahasa	1
3	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya	Bahasa	1
4	Ruang Guru	Ruang	5
5	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang	1

6	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	3
7	Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	3762

Data capaian program tahun 2025 menunjukkan adanya langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan bahasa dan sastra daerah sekaligus memperkuat layanan pendidikan dasar di Kabupaten Jayawijaya. Tercatat satu bahasa daerah telah berhasil dikonservasi, satu bahasa direvitalisasi, dan satu bahasa lainnya dikaji vitalitasnya. Hal ini menandakan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi identitas budaya lokal melalui konservasi, revitalisasi, dan kajian ilmiah yang berkesinambungan.

Pada aspek fasilitas pendidikan, terdapat lima ruang guru yang telah disediakan serta satu ruang perpustakaan sekolah yang berfungsi sebagai pusat literasi. Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar mengajar, sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan yang berbasis pengetahuan. Selain itu, tiga dokumen silabus muatan lokal pendidikan dasar telah disusun, yang menunjukkan adanya upaya integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum formal sehingga



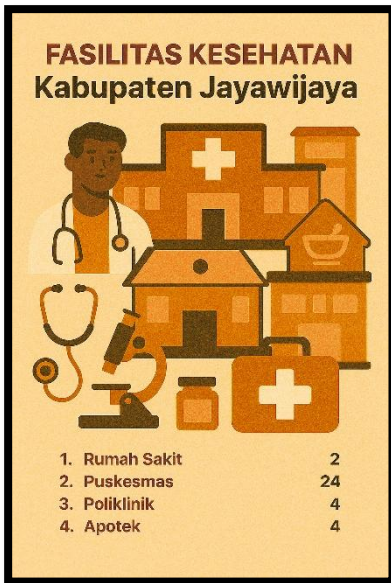
pembelajaran lebih kontekstual dengan budaya dan lingkungan Jayawijaya.

Dukungan terhadap peserta didik usia dini juga terlihat melalui pemberian biaya personil kepada 3.762 siswa PAUD. Intervensi ini menjadi strategi penting dalam memastikan akses pendidikan sejak usia dini, sekaligus mendorong pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak di wilayah pegunungan. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan sinergi antara pelestarian budaya dan penguatan pendidikan dasar. Program yang berjalan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga pada perlindungan bahasa daerah sebagai aset identitas masyarakat Jayawijaya. Data ini dapat dijadikan dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan ke depan, agar pendidikan dan kebudayaan berkembang secara seimbang dan berkelanjutan.




## BAB VI KESEHATAN

### 6.1. Fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, posyandu)



Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2025 memiliki total 34 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 2 rumah sakit, 24 puskesmas, 4 poliklinik, dan 4 apotek. Sebaran ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan primer seperti puskesmas menjadi tulang punggung sistem pelayanan

kesehatan di wilayah ini, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah pegunungan dan lembah yang sulit diakses. Rumah sakit berfungsi sebagai pusat rujukan, sementara poliklinik dan apotek mendukung layanan harian dan distribusi obat-obatan.



Jika dilihat dari proporsinya, puskesmas mendominasi jumlah fasilitas karena perannya yang strategis dalam pelayanan kesehatan dasar, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan penanganan penyakit umum. Jumlah rumah sakit yang hanya dua unit menunjukkan keterbatasan layanan rujukan dan perawatan intensif, yang bisa menjadi tantangan jika terjadi lonjakan kasus penyakit menular atau kebutuhan bedah. Poliklinik dan apotek yang berjumlah empat masing-masing berfungsi sebagai pelengkap layanan, namun jumlahnya masih terbatas untuk menjangkau seluruh distrik.

Tren ke depan kemungkinan akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan kesadaran kesehatan, dan tuntutan layanan yang lebih kompleks. Jika tidak ada penambahan fasilitas, maka beban layanan di puskesmas dan rumah sakit akan meningkat. Di sisi lain, jika pemerintah daerah mulai memperluas layanan berbasis komunitas dan mendukung klinik swasta atau apotek lokal, maka distribusi layanan bisa menjadi lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implikasinya, keterbatasan jumlah rumah sakit dan poliklinik dapat memperlambat penanganan kasus-kasus yang membutuhkan diagnosis lanjutan atau perawatan spesialis. Hal ini

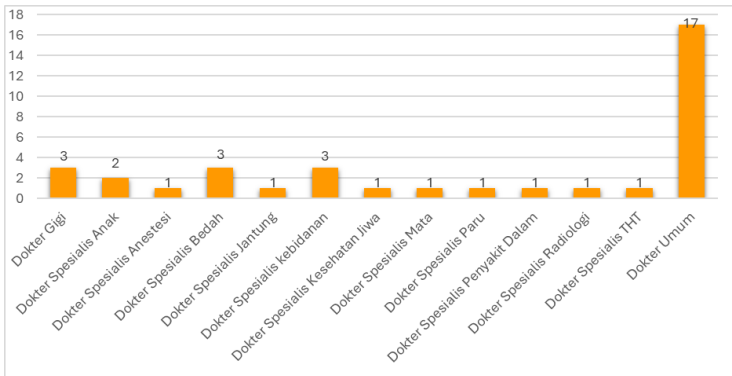
juga dapat memengaruhi efektivitas program kesehatan seperti penanggulangan stunting, pengendalian penyakit menular, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Strategi yang dapat diambil antara lain: memperkuat kapasitas puskesmas dengan tenaga medis dan alat diagnostik, membangun poliklinik di distrik strategis, serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk pengadaan apotek dan layanan farmasi.

Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan sistem rujukan digital dan layanan kesehatan bergerak (mobile clinic) untuk menjangkau wilayah terpencil. Dengan pendekatan ini, layanan kesehatan dapat menjadi lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan kondisi geografis Jayawijaya yang menantang. Data ini menjadi dasar penting untuk menyusun perencanaan kesehatan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

**Tabel 14. Jumlah Fasilitas Kesehatan**


<b>No.</b>	<b>Fasilitas Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Rumah Sakit	2
2	Puskesmas	24
3	Poliklinik	4
4	Apotek	4

## 6.2. Tenaga medis dan paramedis



**Gambar 39. Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis**

Distribusi tenaga medis di Kabupaten Jayawijaya tahun 2025 menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok antara jumlah dokter umum dan dokter spesialis. Dari total data yang tersedia, terdapat 17 dokter umum yang aktif melayani masyarakat, sementara jumlah dokter spesialis di masing-masing bidang hanya berkisar antara 1 hingga 3 orang. Dokter gigi, spesialis bedah, dan spesialis kebidanan menempati jumlah tertinggi di antara kelompok spesialis, masing-masing sebanyak 3 orang. Sisanya, seperti spesialis anak, anestesi, jantung, paru, mata, radiologi, THT, kesehatan jiwa, dan penyakit dalam, hanya tersedia satu orang per bidang.



Secara deskriptif, kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Jayawijaya masih sangat bergantung pada tenaga medis umum. Dokter umum menjadi ujung tombak dalam menangani berbagai keluhan kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga kasus yang seharusnya ditangani oleh spesialis. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi dokter umum, sekaligus memperlambat penanganan kasus-kasus yang membutuhkan keahlian khusus. Di sisi lain, keberadaan dokter spesialis yang sangat terbatas dapat menyebabkan antrean panjang, rujukan keluar daerah, dan keterlambatan diagnosis yang berdampak pada kualitas hidup pasien.

Jika ditarik tren dari data ini, terlihat bahwa penempatan dokter spesialis belum mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan fasilitas penunjang spesialisasi, minimnya insentif daerah, serta tantangan geografis dan logistik yang membuat Jayawijaya kurang menarik sebagai lokasi praktik bagi tenaga medis spesialis. Ke depan, jika tidak ada intervensi strategis, kesenjangan ini dapat semakin melebar, terutama dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan akibat pertumbuhan penduduk,

perubahan pola penyakit, dan tuntutan layanan yang lebih kompleks.

Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang antara lain:

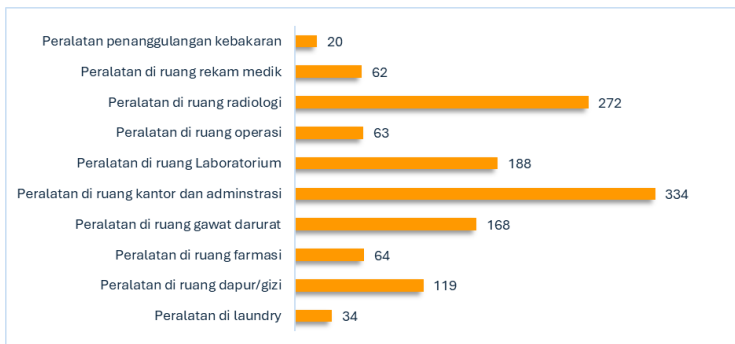
- Meningkatnya kebutuhan spesialis penyakit dalam dan jantung seiring bertambahnya kasus penyakit tidak menular.
- Meningkatnya permintaan layanan kesehatan jiwa dan anak akibat perubahan sosial dan tekanan lingkungan.
- Ketergantungan yang lebih tinggi terhadap rujukan ke luar daerah jika distribusi spesialis tidak segera diperbaiki.
- Potensi munculnya layanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedisin untuk menjembatani keterbatasan tenaga spesialis.

Implikasinya, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat layanan spesialis. Strategi tersebut dapat mencakup:

- Menyediakan insentif khusus bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di Jayawijaya, baik berupa tunjangan, fasilitas tempat tinggal, maupun jaminan karier.

- Meningkatkan kapasitas rumah sakit dan puskesmas dengan alat diagnostik dan ruang praktik yang sesuai standar spesialisasi.
- Menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan kedokteran untuk program penempatan dokter magang, residensi terpadu, atau pengabdian profesi.
- Mengembangkan sistem layanan kesehatan digital seperti telemedisin dan konsultasi jarak jauh untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan spesialis.
- Melakukan pemetaan kebutuhan spesialis berdasarkan tren penyakit dan distribusi penduduk agar penempatan tenaga medis lebih tepat sasaran.

### 6.3. Peralatan Kesehatan



**Gambar 40. Data Jumlah Peralatan Kesehatan**

Distribusi peralatan fasilitas kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2025 menunjukkan pola alokasi yang mencerminkan prioritas operasional dan fungsi pelayanan. Dari total data, ruang kantor dan administrasi memiliki jumlah peralatan terbanyak, yaitu 334 unit. Ini menunjukkan bahwa aspek manajemen, dokumentasi, dan koordinasi internal menjadi komponen penting dalam operasional fasilitas kesehatan. Diikuti oleh ruang radiologi dengan 272 unit dan laboratorium dengan 188 unit, keduanya merupakan ruang diagnostik yang berperan krusial dalam mendeteksi dan menegakkan diagnosis penyakit secara akurat dan cepat.

Ruang gawat darurat memiliki 168 unit peralatan, menandakan kesiapan fasilitas dalam menangani kasus-kasus kritis dan darurat. Ruang dapur/gizi (119 unit) dan ruang farmasi (64 unit) juga menunjukkan peran penting dalam mendukung pemulihan pasien melalui nutrisi dan pengelolaan obat. Ruang operasi memiliki 63 unit peralatan, yang meskipun jumlahnya tidak dominan, tetap menjadi indikator penting dalam kapasitas layanan bedah. Sementara itu, ruang rekam medik (62 unit) dan laundry (34 unit) mendukung aspek dokumentasi dan kebersihan, yang esensial dalam menjaga mutu layanan dan keselamatan pasien. Peralatan



penanggulangan kebakaran hanya berjumlah 20 unit, yang perlu menjadi perhatian khusus dalam konteks manajemen risiko dan keselamatan fasilitas.

Jika dilihat dari pola ini, dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan di Jayawijaya telah berupaya memperkuat aspek administratif dan diagnostik. Namun, jumlah peralatan di ruang operasi dan kebakaran masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan potensial, terutama jika terjadi peningkatan volume pasien atau situasi darurat. Ke depan, tren kebutuhan peralatan kemungkinan akan meningkat di ruang operasi, gawat darurat, dan farmasi, seiring dengan bertambahnya kasus penyakit tidak menular, kebutuhan tindakan bedah, dan kompleksitas terapi obat.

Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang antara lain:

- Peningkatan kebutuhan alat diagnostik digital dan otomatis di laboratorium dan radiologi.
- Penambahan peralatan bedah dan sterilisasi untuk mendukung layanan operasi yang lebih kompleks.


- Perluasan kapasitas dapur/gizi dan farmasi untuk mendukung layanan rawat inap dan terapi nutrisi.
- Penguatan sistem keamanan dan keselamatan melalui penambahan alat pemadam kebakaran dan sistem deteksi dini.

Implikasinya, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi pengadaan dan pemeliharaan peralatan yang berbasis analisis kebutuhan dan risiko. Strategi tersebut dapat mencakup:

- Audit teknis berkala terhadap kondisi dan fungsi peralatan di setiap ruang.
- Pengembangan sistem inventaris digital untuk memantau distribusi dan usia pakai alat.
- Prioritisasi anggaran untuk ruang-rung kritis seperti operasi, gawat darurat, dan kebakaran.
- Kemitraan dengan penyedia alat kesehatan untuk skema pengadaan bertahap dan pelatihan penggunaan alat.
- Integrasi data peralatan ke dalam sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) agar pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis bukti.

#### **6.4. Ruang Kesehatan**

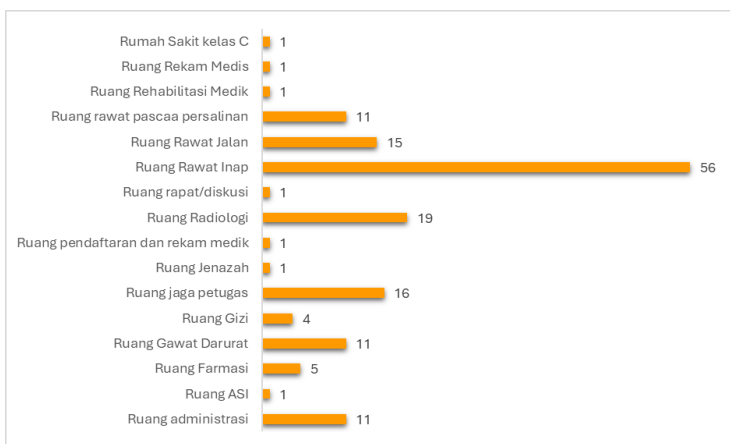
Fasilitas kesehatan di Kabupaten Jayawijaya tahun 2025 menunjukkan arah



pembangunan yang semakin terstruktur untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Komposisi ruang pelayanan yang tersedia mencerminkan fokus pada perawatan intensif, layanan rawat jalan, serta dukungan administratif yang solid. Ruang rawat inap yang mendominasi kapasitas menjadi indikator bahwa sistem kesehatan di wilayah ini menekankan pada penanganan pasien dengan kebutuhan perawatan jangka panjang, baik akibat penyakit kronis maupun kondisi pasca operasi. Sementara itu, keberadaan ruang gawat darurat, ruang jaga petugas, dan ruang rawat pasca persalinan memperlihatkan kesiapan fasilitas dalam menghadapi kasus-kasus kritis, pelayanan ibu dan anak, serta menjaga kesinambungan operasional sehari-hari.

Selain itu, ruang radiologi, farmasi, gizi, dan ruang ASI menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek diagnostik, terapi, nutrisi, dan kesehatan ibu-anak, meskipun jumlahnya masih terbatas. Ruang administrasi, rekam medik, dan pendaftaran menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data pasien dan koordinasi layanan, sedangkan ruang rehabilitasi medik, ruang jenazah, dan ruang rapat yang hanya tersedia satu unit menandakan bahwa layanan pemulihan, penanganan akhir kehidupan, dan koordinasi internal masih bersifat minimal. Secara

keseluruhan, komposisi ruang ini mencerminkan sistem pelayanan kesehatan yang berupaya menjangkau seluruh tahapan kebutuhan pasien, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, perawatan intensif, hingga pemulihan, sekaligus menjadi dasar strategis untuk pengembangan fasilitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.



**Gambar 41. Jumlah Ruang Kesehatan**

Distribusi ruang fasilitas kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan telah dirancang untuk menjangkau berbagai kebutuhan medis, administratif, dan sosial. Ruang rawat inap mendominasi dengan 56 unit, menandakan bahwa layanan perawatan jangka panjang menjadi prioritas utama. Ini sejalan dengan karakteristik geografis

Jayawijaya yang menuntut pasien untuk tinggal lebih lama di fasilitas kesehatan karena keterbatasan akses dan transportasi.

Ruang rawat jalan sebanyak 15 unit berfungsi sebagai pintu masuk layanan harian, pemeriksaan umum, dan tindak lanjut pasien. Ruang jaga petugas (16 unit) dan ruang gawat darurat (11 unit) memperkuat kesiapsiagaan fasilitas dalam menangani kasus mendesak dan menjaga ritme operasional. Ruang administrasi (11 unit) dan ruang pendaftaran serta rekam medik (masing-masing 1 unit) menunjukkan bahwa sistem manajemen pasien masih terpusat dan belum sepenuhnya terdesentralisasi.

Ruang radiologi (19 unit) dan ruang farmasi (5 unit) mencerminkan kapasitas diagnostik dan distribusi obat yang mulai berkembang, namun belum merata. Ruang gizi (4 unit) dan ruang ASI (1 unit) menunjukkan bahwa layanan nutrisi dan dukungan ibu menyusui masih terbatas, padahal keduanya sangat penting dalam penanganan stunting dan pemulihan pasca persalinan. Ruang jenazah, ruang rehabilitasi medik, dan ruang rapat yang masing-masing hanya tersedia satu unit menandakan bahwa aspek pemulihan, koordinasi, dan penanganan akhir kehidupan belum menjadi fokus utama dalam desain fasilitas.

Jika ditinjau dari perspektif tren kebutuhan, beberapa ruang akan mengalami tekanan permintaan yang meningkat:

- Ruang rehabilitasi medik akan dibutuhkan lebih banyak seiring dengan meningkatnya kasus penyakit kronis dan kebutuhan terapi pasca stroke, trauma, atau bedah.
- Ruang gizi dan ruang ASI akan menjadi krusial dalam mendukung program nasional penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu-anak.
- Ruang rekam medik dan ruang rapat perlu diperluas dan didigitalisasi untuk mendukung sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data.

Implikasi dari distribusi ini adalah perlunya penataan ulang dan penguatan fungsi ruang berdasarkan beban layanan dan prioritas kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengambil strategi berikut:


- Menyusun masterplan pengembangan fasilitas kesehatan berbasis zonasi dan proyeksi demografi.
- Menambah ruang spesifik seperti rehabilitasi medik, gizi, dan ASI di rumah sakit kelas C dan puskesmas strategis.

- Mengintegrasikan sistem informasi rekam medik digital untuk mempercepat layanan dan meningkatkan akurasi data pasien.
- Meningkatkan kapasitas ruang farmasi dan radiologi dengan peralatan modern dan tenaga terlatih.
- Menyediakan ruang rapat dan diskusi yang memadai untuk mendukung koordinasi lintas unit dan evaluasi layanan.

Dengan pendekatan ini, fasilitas kesehatan di Jayawijaya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga siap menghadapi tantangan kesehatan masa depan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Distribusi ruang yang adaptif dan terencana akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh di wilayah pegunungan Papua.

## **6.5. Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan merupakan komponen vital dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama di wilayah seperti Kabupaten Jayawijaya yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa komposisi tenaga kesehatan telah mulai mengarah pada penguatan layanan dasar, dengan dominasi tenaga keperawatan dan kebidanan sebagai garda



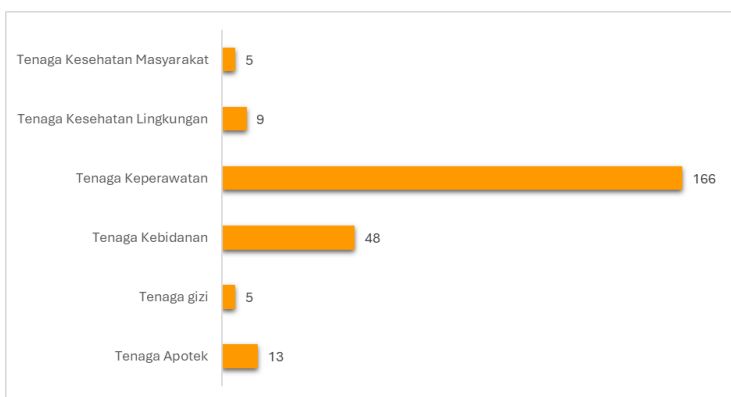
terdepan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Keberadaan tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan juga menunjukkan bahwa pendekatan promotif dan preventif mulai mendapat perhatian, meskipun jumlahnya masih terbatas.

Distribusi tenaga kesehatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup. Tenaga gizi dan tenaga apotek, meskipun jumlahnya relatif kecil, berperan penting dalam mendukung pemulihan pasien dan pengelolaan terapi. Komposisi ini menjadi cerminan awal dari arah kebijakan kesehatan yang lebih menyeluruh, namun juga mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas dan pemerataan tenaga di berbagai bidang spesialisasi.

Distribusi tenaga kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2025 menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada tenaga keperawatan, dengan jumlah mencapai 166 orang. Ini menandakan bahwa layanan langsung kepada pasien, terutama di puskesmas dan klinik yang tersebar di wilayah pegunungan, sangat bergantung pada perawat sebagai ujung tombak pelayanan. Tenaga kebidanan menempati posisi kedua dengan 48




orang, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak yang menjadi prioritas di banyak wilayah terpencil. Sementara itu, tenaga kesehatan lingkungan berjumlah 9 orang, tenaga apotek 13 orang, tenaga gizi 5 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat juga 5 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa tenaga pendukung seperti gizi, farmasi, dan promosi kesehatan masih terbatas dan belum tersebar secara merata di seluruh distrik, sehingga fungsi preventif dan rehabilitatif belum optimal.




**Gambar 42. Data Jumlah Tenaga Kesehatan**

Secara deskriptif, struktur tenaga kesehatan ini mencerminkan fokus yang kuat pada layanan kuratif dan maternal, namun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan promotif dan preventif yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem kesehatan daerah. Ketimpangan antara jumlah



tenaga keperawatan dan tenaga gizi atau kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, dan pemulihan nutrisi belum mendapatkan porsi yang memadai. Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi, maka beban kerja tenaga keperawatan akan terus meningkat, dan potensi untuk mencegah penyakit serta membangun gaya hidup sehat di masyarakat akan terhambat. Hal ini juga dapat berdampak pada efektivitas program nasional seperti penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan kualitas hidup ibu dan anak.

Ke depan, kebutuhan tenaga gizi diperkirakan akan meningkat seiring dengan intensifikasi program pemulihan nutrisi anak dan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional. Tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan akan menjadi kunci dalam pengendalian penyakit berbasis komunitas, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta penanganan dampak lingkungan terhadap kesehatan. Tenaga apotek juga perlu ditambah untuk memastikan distribusi obat yang aman, rasional, dan tepat sasaran, terutama di daerah yang sulit dijangkau dan minim akses farmasi. Tanpa penguatan di bidang-bidang ini, sistem kesehatan akan tetap bertumpu pada pengobatan, bukan pencegahan dan pemulihan.



Implikasi dari distribusi ini adalah perlunya strategi penataan dan penambahan tenaga kesehatan yang berbasis kebutuhan lokal, beban layanan, dan karakteristik geografis. Pemerintah daerah dapat menyusun peta kebutuhan tenaga kesehatan per distrik dengan mempertimbangkan data demografi, epidemiologi, dan aksesibilitas wilayah. Kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan perlu diperluas untuk mendukung penempatan tenaga magang, program pengabdian profesi, dan rekrutmen tenaga baru. Insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di wilayah sulit akses menjadi langkah penting untuk pemerataan layanan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas tenaga yang ada melalui pelatihan lintas kompetensi, terutama bagi tenaga keperawatan dan kebidanan, akan memperluas cakupan layanan mereka agar mampu menjalankan fungsi promotif dan preventif secara efektif.

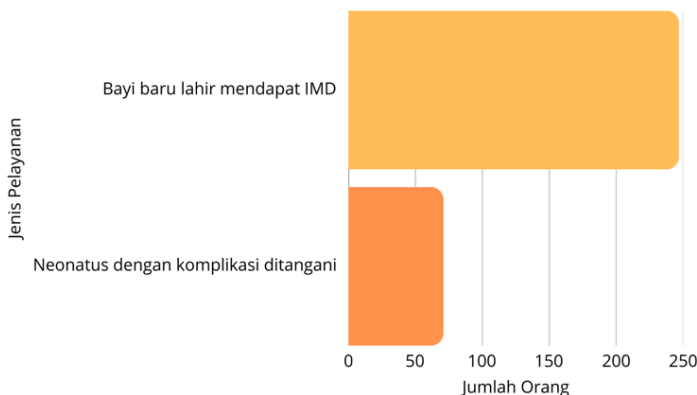
Dengan strategi yang terarah dan berbasis data, sistem kesehatan di Jayawijaya dapat bergerak menuju layanan yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan lokal. Distribusi tenaga yang adil dan fungsional akan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan, dan

mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah secara menyeluruh.

## **6.6. Kesehatan Masyarakat**

### **6.6.1. Pelayanan dan Perawatan Bayi**

RSUD Wamena pada tahun 2025 mencatat dua indikator utama dalam pelayanan neonatal yang mencerminkan mutu dan kesiapan layanan kesehatan ibu dan anak. Sebanyak 247 bayi baru lahir berhasil mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), sebuah intervensi awal yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperkuat ikatan antara ibu dan bayi. Di sisi lain, sebanyak 71 neonatus dengan komplikasi medis telah ditangani secara intensif, menunjukkan kapasitas klinis RSUD dalam merespons kelahiran berisiko. Proporsi antara bayi yang mendapat IMD dan neonatus yang ditangani divisualisasikan dalam grafik donat, di mana IMD mendominasi sebagai porsi terbesar. Hal ini menandakan keberhasilan penerapan protokol pelayanan neonatal yang promotif dan preventif, sekaligus menunjukkan bahwa aspek kuratif juga berjalan dengan baik. Kedua indikator ini menjadi cerminan bahwa pelayanan neonatal di RSUD Wamena telah terintegrasi secara sistemik dan responsif terhadap kebutuhan klinis masyarakat.

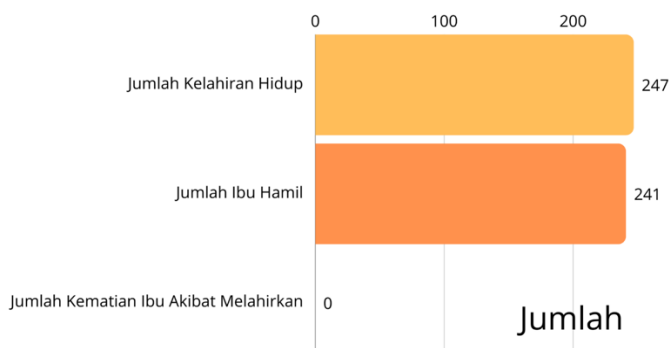


**Gambar 43. Pelayanan dan Perawatan Bayi**

### **6.6.2. Angka Kematian Ibu**

RSUD Wamena pada tahun 2025 mencatat capaian penting dalam indikator kesehatan ibu dan anak. Sebanyak 241 ibu hamil tercatat menjalani proses kehamilan, yang kemudian menghasilkan 247 kelahiran hidup. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian ibu hamil berasal dari rujukan luar atau terjadi kelahiran ganda dalam satu tahun. Yang paling menonjol adalah nihilnya angka kematian ibu akibat melahirkan, yaitu 0 kasus, yang menjadi indikator keberhasilan pelayanan obstetri dan tata kelola risiko persalinan di fasilitas tersebut. Grafik batang horizontal menggambarkan perbandingan antara jumlah ibu hamil, jumlah kelahiran hidup, dan jumlah kematian ibu, dengan dominasi kelahiran

hidup sebagai puncak capaian. Ketidakhadiran kematian ibu dalam grafik memperkuat narasi bahwa RSUD Wamena telah menjalankan protokol keselamatan ibu secara optimal. Data ini bersumber dari RSUD Wamena tahun 2025.



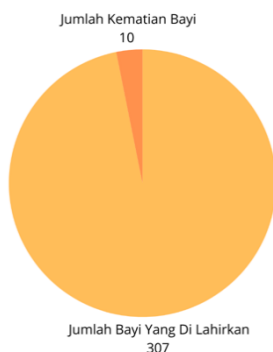
**Gambar 44. Jumlah Angka Kematian Ibu**

### 6.6.3. Angka Kematian Anak

RSUD Wamena pada tahun 2025 mencatat total 307 kelahiran bayi, dengan 10 di antaranya mengalami kematian. Grafik lingkaran menggambarkan proporsi antara jumlah bayi yang lahir dan jumlah kematian bayi, di mana segmen kelahiran mendominasi secara visual. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses

kelahiran berlangsung aman dan berhasil, meskipun masih terdapat kasus kematian bayi yang perlu menjadi perhatian. Rasio kematian bayi terhadap kelahiran mencapai sekitar 32,6 per 1000 kelahiran hidup, yang menjadi indikator penting dalam evaluasi mutu layanan kesehatan neonatal.

Angka ini masih berada di atas ambang ideal nasional, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penguatan intervensi preventif dan peningkatan kualitas perawatan pasca persalinan. Keberadaan 10 kasus kematian bayi menandakan bahwa meskipun sistem pelayanan sudah berjalan, masih terdapat celah dalam deteksi dini, penanganan komplikasi, atau akses terhadap fasilitas neonatal lanjutan. Oleh karena itu, data ini tidak hanya menjadi refleksi capaian, tetapi juga menjadi dasar perencanaan strategis untuk menurunkan angka kematian bayi di tahun-tahun berikutnya. Data ini bersumber dari RSUD Wamena tahun 2025.



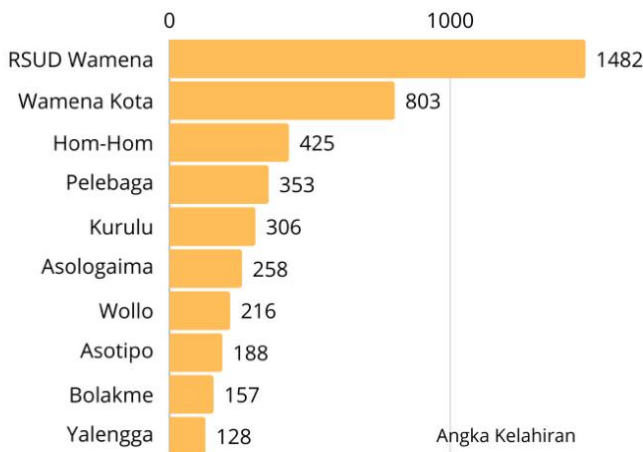


## **Gambar 45. Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB)**

### **6.6.4. Angka Kelahiran Bayi Menurut Puskesmas**

Angka kelahiran bayi di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan distribusi yang sangat timpang antar wilayah, dengan dominasi besar oleh RSUD Wamena sebagai pusat layanan rujukan. RSUD Wamena mencatat sebanyak 1.482 kelahiran, menjadikannya fasilitas dengan angka kelahiran tertinggi di seluruh kabupaten. Angka ini jauh melampaui puskesmas lainnya, seperti Wamena Kota (803), Hom-Hom (425), Pelebaga (353), dan Kurulu (306), yang berada di lima besar. Dominasi RSUD Wamena ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil memilih atau dirujuk ke fasilitas rumah sakit untuk proses persalinan, baik karena faktor risiko medis, ketersediaan tenaga spesialis, maupun preferensi layanan.





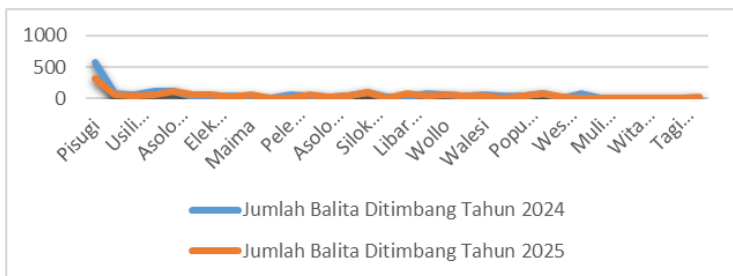
**Gambar 46. Angka Kelahiran Bayi Menurut Puskesmas**

Di sisi lain, terdapat sejumlah puskesmas dengan angka kelahiran yang relatif rendah, seperti Popukoba (33), Libarek (40), Usilimo (60), dan Siepkosi (57). Rendahnya angka kelahiran di fasilitas-fasilitas ini dapat mencerminkan keterbatasan kapasitas layanan, akses geografis yang sulit, atau pola rujukan yang langsung mengarah ke RSUD. Hal ini menjadi sinyal penting bagi perencanaan kebijakan kesehatan daerah untuk memperkuat kapasitas layanan persalinan di tingkat puskesmas, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Secara total, Kabupaten Jayawijaya mencatat 5.427 kelahiran bayi sepanjang tahun 2024. Distribusi ini menunjukkan bahwa meskipun layanan kelahiran tersedia di berbagai titik, konsentrasi terbesar tetap berada di fasilitas rujukan utama. Untuk meningkatkan pemerataan layanan dan menurunkan beban RSUD, diperlukan strategi penguatan layanan kebidanan dan neonatal di tingkat puskesmas, termasuk pelatihan tenaga kesehatan, penyediaan alat medis dasar, dan sistem rujukan yang efisien. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan spasial dan operasional layanan kesehatan ibu dan anak di Jayawijaya.

#### **6.6.5. Jumlah Balita Ditimbang Menurut Puskesmas**

Pemantauan tumbuh kembang balita melalui kegiatan penimbangan di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan dinamika yang cukup signifikan antara tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 1.730 balita ditimbang di seluruh puskesmas, sementara pada tahun 2025 jumlah tersebut menurun menjadi 1.388 balita. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam menjaga cakupan layanan kesehatan dasar anak, terutama dalam konteks geografis dan aksesibilitas wilayah.



**Gambar 47. Jumlah Balita Ditimbang Menurut Puskesmas**

Puskesmas Pisugi menjadi kontributor terbesar dalam kegiatan penimbangan balita, dengan 569 balita ditimbang pada tahun 2024 dan 321 balita pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap menempatkan Pisugi sebagai pusat layanan dengan cakupan tertinggi. Beberapa puskesmas lain seperti Asolokobal, Silokarnodoga, dan Bugi menunjukkan tren positif atau stabil, dengan peningkatan jumlah balita ditimbang pada tahun 2025. Asolokobal mencatat kenaikan dari 107 menjadi 115 balita, sementara Bugi meningkat dari 76 menjadi 82 balita.

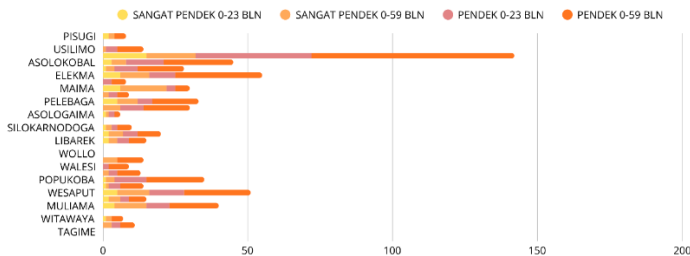
Sebaliknya, terdapat puskesmas yang mengalami penurunan drastis atau bahkan tidak mencatat penimbangan sama sekali. Contohnya adalah Wamena Kota yang turun dari 109 menjadi 55 balita, serta Hubikosi dan Pelebaga yang mencatat nol balita ditimbang pada tahun 2025.

Beberapa wilayah seperti Muliama, Pyramid, Wouma, dan Tagime tidak mencatat aktivitas penimbangan balita di kedua tahun, yang mengindikasikan adanya hambatan struktural atau operasional yang perlu ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian wilayah berhasil mempertahankan atau meningkatkan cakupan layanan, masih terdapat ketimpangan antar puskesmas yang perlu diatasi. Strategi penguatan layanan kesehatan anak, peningkatan mobilisasi kader, dan dukungan logistik ke wilayah sulit akses menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh balita di Jayawijaya mendapatkan pemantauan tumbuh kembang yang memadai dan berkelanjutan.

#### **6.6.6. Pelajanan Bayi/Balita dan Penanganan Stunting Menurut Puskesmas**

Prevalensi stunting balita di Kabupaten Jayawijaya tahun 2025 menunjukkan variasi yang cukup mencolok antar wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan data yang dikategorikan dalam empat kelompok sangat pendek usia 0–23 bulan, sangat pendek usia 0–59 bulan, pendek usia 0–23 bulan, dan pendek usia 0–59 bulan terlihat bahwa beberapa wilayah mengalami beban gizi buruk yang cukup tinggi, sementara sebagian lainnya mencatat nol kasus.



**Gambar 48. Jumlah Pelayanan Bayi/Balita dan Penanganan Stunting**

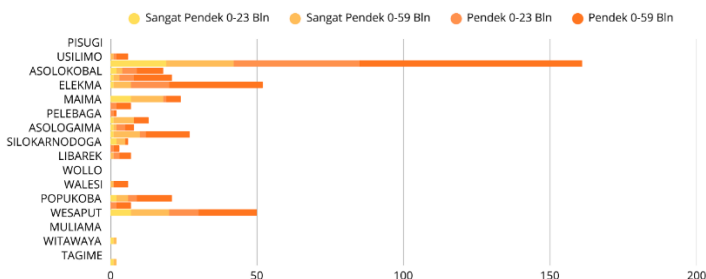
Puskesmas Wamena Kota menempati posisi tertinggi dalam jumlah kasus stunting, dengan 15 balita sangat pendek usia 0–23 bulan dan 17 balita sangat pendek usia 0–59 bulan, serta 40 balita pendek usia 0–23 bulan dan 70 balita pendek usia 0–59 bulan. Ini menjadikan Wamena Kota sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi secara absolut. Disusul oleh Elekma, Asolokobal, Wesaput, dan Muliama yang masing-masing mencatat angka signifikan pada semua kategori. Elekma, misalnya, mencatat 10 balita sangat pendek usia 0–59 bulan dan 30 balita pendek usia 0–59 bulan, menunjukkan konsistensi masalah gizi kronis di wilayah tersebut.

Sebaliknya, terdapat sejumlah puskesmas yang tidak mencatat kasus stunting sama sekali, seperti Siepkosi, Musatfak, Bolakme, Wollo, Pyramid, Tagime, dan Bipiri. Meskipun hal ini dapat

diartikan sebagai capaian positif, perlu dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa data tersebut mencerminkan kondisi riil dan bukan akibat dari keterbatasan pelaporan atau cakupan layanan.

Distribusi kasus stunting yang tidak merata ini mengindikasikan perlunya pendekatan intervensi yang lebih terfokus dan berbasis wilayah. Wilayah dengan angka tinggi perlu mendapatkan prioritas dalam program perbaikan gizi, edukasi ibu balita, dan penguatan layanan posyandu. Sementara wilayah dengan nol kasus perlu dijaga agar tetap bebas stunting melalui monitoring berkala dan penguatan sistem deteksi dini. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan program penurunan stunting yang terintegrasi di Kabupaten Jayawijaya.

### 6.6.7. Pelajanan Bayi/Balita dan Penanganan Stunting Menurut Puskesmas



#### **Gambar 49. Jumlah Pelayanan Bayi/Balita dan Penanganan Stunting Menurut Puskesmas**

Prevalensi stunting balita di Kabupaten Jayawijaya tahun 2025 menunjukkan pola yang sangat beragam antar wilayah kerja puskesmas. Dari total 30 puskesmas yang dilaporkan, sebagian besar mencatat kasus stunting dalam berbagai kategori, sementara sejumlah wilayah lainnya menunjukkan nol kasus. Kategori yang digunakan mencakup balita sangat pendek dan pendek pada rentang usia 0–23 bulan dan 0–59 bulan, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang status gizi anak di masa awal kehidupan.


Puskesmas Wamena Kota mencatat angka tertinggi untuk semua kategori, dengan 19 balita sangat pendek usia 0–23 bulan dan 23 balita sangat pendek usia 0–59 bulan, serta 43 balita pendek usia 0–23 bulan dan 76 balita pendek usia 0–59 bulan. Ini menjadikan Wamena Kota sebagai wilayah dengan beban stunting tertinggi secara absolut, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam intervensi gizi dan pelayanan kesehatan anak. Disusul oleh Elekma dan Wesaput yang juga mencatat angka signifikan, masing-masing dengan total 52 dan 50 kasus stunting pada kategori usia 0–59 bulan.

Beberapa wilayah seperti Maima, Musatfak, Popukoba, dan Welelagama menunjukkan kombinasi kasus sangat pendek dan pendek yang cukup tinggi, meskipun secara jumlah tidak sebesar Wamena Kota. Sebaliknya, terdapat puskesmas seperti Pisugi, Siepkosi, Asotipo, Bolakme, Wollo, Yalengga, Itlay Hisage, Wadangku, Muliama, Pyramid, Wouma, dan Tagime yang tidak mencatat kasus stunting sama sekali. Meskipun hal ini dapat diartikan sebagai capaian positif, perlu dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa data tersebut mencerminkan kondisi riil dan bukan akibat dari keterbatasan pelaporan atau cakupan layanan.

Distribusi kasus stunting yang tidak merata ini mengindikasikan perlunya pendekatan intervensi yang berbasis wilayah dan berbasis risiko. Wilayah dengan angka tinggi perlu mendapatkan prioritas dalam program perbaikan gizi, edukasi ibu balita, dan penguatan layanan posyandu. Sementara wilayah dengan nol kasus perlu dijaga agar tetap bebas stunting melalui monitoring berkala dan penguatan sistem deteksi dini. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan program penurunan stunting yang terintegrasi dan berkeadilan di Kabupaten Jayawijaya.

## **6.7. Rumah Sakit Umum Daerah**






RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Pegunungan Papua memiliki komposisi sumber daya manusia yang beragam. Tenaga administrasi berperan dalam memastikan kelancaran tata kelola rumah sakit, mulai dari pengelolaan dokumen, pelayanan administrasi pasien, hingga koordinasi antar unit. Peran ini menjadi penting karena kompleksitas pelayanan kesehatan di daerah pegunungan menuntut ketelitian dan kecepatan dalam proses administrasi.

Tenaga IT mendukung sistem informasi rumah sakit dengan memastikan kelancaran pencatatan elektronik, pengelolaan data pasien, dan integrasi layanan berbasis digital. Kehadiran mereka menjadi krusial dalam mendukung transformasi digital kesehatan, sehingga efisiensi dan akurasi data dapat terjaga. Dalam konteks pelayanan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, tenaga IT berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan teknis dan pelayanan medis.

Tenaga kebidanan menjadi garda terdepan dalam pelayanan maternal dan neonatal. Mereka menangani pemeriksaan kehamilan, proses persalinan, serta pendampingan pasca melahirkan. Kebutuhan layanan kebidanan di RSUD Wamena sangat tinggi karena kondisi geografis membuat



akses terhadap fasilitas kesehatan terbatas. Dengan kompetensi yang dimiliki, tenaga kebidanan berperan penting dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah pegunungan.

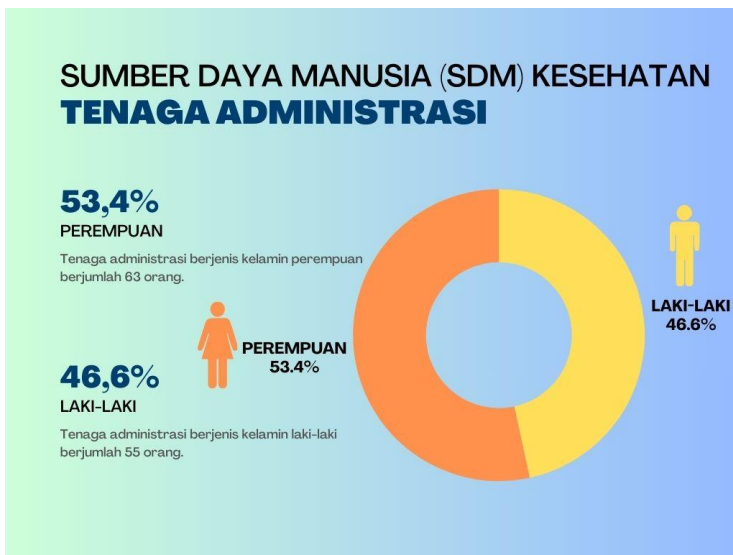
Tenaga medis dokter melengkapi struktur SDM RSUD Wamena sebagai ujung tombak pelayanan klinis. Dokter menangani berbagai kasus, mulai dari penyakit umum hingga kasus rujukan yang membutuhkan penanganan spesialis. Dalam kondisi geografis yang menantang, keberadaan dokter tidak hanya berfungsi sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. RSUD Wamena sering kali menjadi satu-satunya harapan masyarakat pedalaman untuk memperoleh layanan medis yang memadai.

Secara keseluruhan, komposisi SDM RSUD Wamena mencerminkan upaya kelembagaan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Tenaga administrasi, IT, kebidanan, dan dokter bekerja secara terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun masih menghadapi keterbatasan jumlah dan fasilitas. Evaluasi terhadap distribusi dan kapasitas SDM ini menjadi penting agar rumah sakit dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus

memperkuat perannya sebagai pusat kesehatan rujukan di wilayah Pegunungan Papua.

#### **6.7.1. SDM KESEHATAN TENAGA ADMINISTRASI**

Komposisi tenaga administrasi di sektor kesehatan menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang. Dari total 118 orang, sebanyak 63 tenaga administrasi berjenis kelamin perempuan atau setara dengan 53,4%, sementara 55 orang berjenis kelamin laki-laki, mencakup 46,6% dari keseluruhan. Proporsi ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki peran dominan dalam fungsi administratif pelayanan kesehatan, baik dalam pengelolaan data, pelayanan pasien, maupun koordinasi internal antar unit.



**Gambar 50. SDM Kesehatan Tenaga Administrasi**

Keterlibatan perempuan dalam posisi administrasi mencerminkan dinamika kerja yang inklusif, sekaligus menunjukkan bahwa sektor kesehatan di wilayah ini telah membuka ruang partisipasi yang luas bagi tenaga kerja perempuan. Di sisi lain, keberadaan tenaga laki-laki tetap memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung stabilitas operasional dan teknis di lingkungan kerja.

Distribusi ini menjadi indikator awal dalam menilai kesetaraan dan efektivitas kerja di sektor administrasi kesehatan. Evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja, beban kerja, dan kapasitas

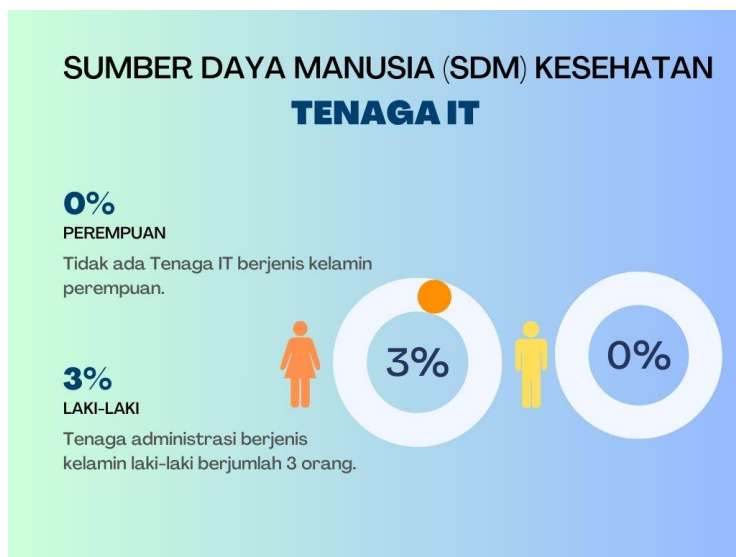
masing-masing kelompok diperlukan agar pengelolaan SDM dapat berjalan optimal. Dengan komposisi yang relatif proporsional, penguatan kapasitas dan pembagian tugas berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di fasilitas kesehatan.

#### **6.7.2. SDM TENAGA IT**

Komposisi tenaga IT di sektor kesehatan menunjukkan ketimpangan yang sangat tajam dalam hal representasi gender. Dari keseluruhan tenaga yang tercatat, hanya terdapat 3 orang tenaga IT, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, sementara tenaga IT perempuan tidak tercatat sama sekali. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bidang teknologi informasi dalam layanan kesehatan belum menjadi ruang kerja yang terbuka secara proporsional bagi perempuan.

Minimnya jumlah tenaga IT secara keseluruhan juga menjadi indikator terbatasnya kapasitas digital di lingkungan fasilitas kesehatan. Dalam konteks transformasi layanan berbasis elektronik, keberadaan tenaga IT seharusnya menjadi komponen strategis untuk mendukung sistem informasi kesehatan, pengelolaan data pasien, dan integrasi layanan digital. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek kesetaraan,

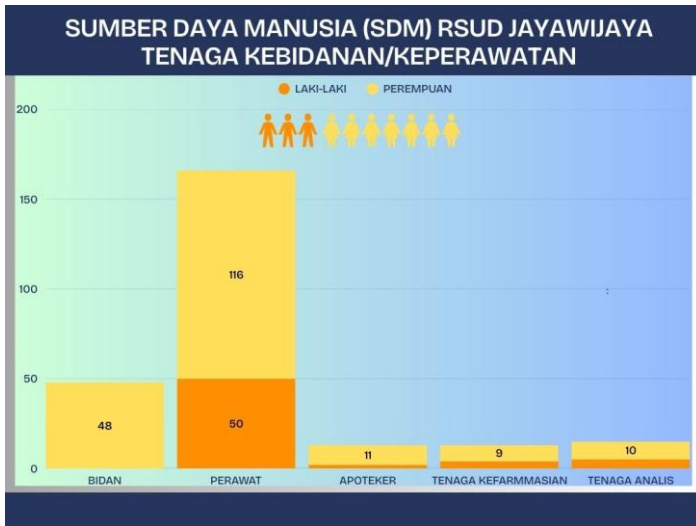
tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas operasional rumah sakit dan puskesmas yang mulai bergantung pada sistem digital.



**Gambar 51. SDM Tenaga IT**


Evaluasi terhadap distribusi dan jumlah tenaga IT perlu menjadi perhatian dalam perencanaan SDM kesehatan ke depan. Penguatan kapasitas digital tidak dapat dilakukan tanpa dukungan tenaga teknis yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Selain itu, perlu dibuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan untuk masuk dalam bidang teknologi kesehatan, agar transformasi digital dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan.

### 6.7.3. SDM TENAGA KEBIDANAN/KEPERAWATAN



**Gambar 52. SDM Tenaga Kebidanan/Perawat**

Komposisi tenaga kesehatan di RSUD Jayawijaya memperlihatkan dominasi perempuan dalam hampir seluruh kategori profesi. Tenaga kebidanan seluruhnya diisi oleh 48 perempuan, tanpa keterwakilan laki-laki. Kondisi ini mencerminkan bahwa layanan maternal dan neonatal di rumah sakit ini sepenuhnya dijalankan oleh tenaga perempuan, yang secara kultural dan fungsional dianggap lebih sesuai dalam mendampingi proses kehamilan dan persalinan.



Pada kategori perawat, terdapat 116 perempuan dan 50 laki-laki, menunjukkan bahwa profesi ini lebih terbuka secara gender dibandingkan kategori lainnya. Keterlibatan laki-laki dalam profesi keperawatan memberikan dinamika kerja yang lebih beragam, sekaligus memperkuat kapasitas layanan klinis yang membutuhkan tenaga dengan latar belakang dan pendekatan berbeda.

Tenaga kefarmasian dan analis laboratorium juga didominasi oleh perempuan. Tercatat 11 apoteker perempuan, 9 tenaga kefarmasian perempuan, dan 10 tenaga analis perempuan, tanpa keterwakilan laki-laki di ketiga kategori tersebut. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa bidang farmasi dan laboratorium belum menjadi ruang kerja yang menarik atau terbuka bagi tenaga laki-laki, meskipun kebutuhan akan diversifikasi kompetensi tetap relevan.

Secara keseluruhan, distribusi SDM kesehatan di RSUD Jayawijaya menunjukkan bahwa perempuan menjadi aktor utama dalam pelayanan kebidanan, keperawatan, farmasi, dan laboratorium. Dominasi ini mencerminkan keberhasilan dalam membuka akses kerja bagi tenaga perempuan, namun sekaligus menandakan perlunya strategi rekrutmen yang lebih inklusif untuk memperkuat keberagaman tenaga kesehatan.



Evaluasi terhadap distribusi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

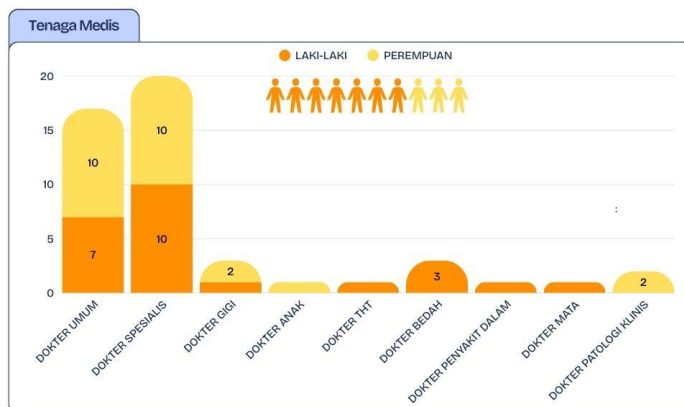
#### **6.7.4. SDM TENAGA MEDIS**

Komposisi tenaga medis dokter di RSUD Jayawijaya menunjukkan keberagaman spesialisasi yang cukup luas, meskipun jumlahnya masih terbatas. Pada kategori dokter umum, tercatat 10 orang, terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan. Distribusi ini memperlihatkan bahwa pelayanan dasar kesehatan di rumah sakit ini masih ditopang oleh tenaga laki-laki, dengan keterlibatan perempuan yang mulai berkembang.

Dokter spesialis berjumlah 20 orang, dengan komposisi yang seimbang antara 10 laki-laki dan 10 perempuan. Keseimbangan ini menjadi indikator positif dalam hal representasi gender pada layanan spesialis, sekaligus menunjukkan bahwa RSUD Jayawijaya telah mampu menghadirkan tenaga spesialis dari berbagai latar belakang. Keberadaan dokter spesialis menjadi elemen penting dalam memperkuat fungsi rumah sakit sebagai rujukan regional, terutama di wilayah


pegunungan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan spesialis.

### SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RSUD JAYAWIJAYA TENAGA MEDIS DOKTER



**Gambar 53. SDM Tenaga Medis Dokter**

Pada kategori lain, distribusi tenaga medis masih sangat terbatas. Dokter gigi hanya berjumlah 2 orang, seluruhnya perempuan. Dokter mata tercatat 1 orang perempuan, sementara dokter THT berjumlah 3 orang laki-laki. Kategori dokter bedah, penyakit dalam, anak, dan patologi klinik masing-masing hanya memiliki 1 hingga 2 orang, seluruhnya laki-laki. Jumlah yang minim ini menunjukkan bahwa layanan spesifik seperti bedah, penyakit dalam, dan anak masih bergantung pada tenaga yang sangat



terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan beban kerja tinggi dan keterbatasan jangkauan pelayanan.

Secara keseluruhan, struktur tenaga medis dokter di RSUD Jayawijaya mencerminkan upaya untuk menghadirkan layanan yang beragam, namun masih menghadapi tantangan dari sisi jumlah dan distribusi. Keseimbangan gender pada dokter spesialis menjadi capaian penting, tetapi keterbatasan jumlah pada kategori kritis seperti bedah dan penyakit dalam perlu segera direspons melalui strategi rekrutmen dan penempatan yang lebih adaptif. Evaluasi terhadap kapasitas dan distribusi tenaga medis ini menjadi dasar penting dalam memperkuat peran RSUD Jayawijaya sebagai pusat layanan kesehatan di wilayah Pegunungan Papua.

## **BAB VII**

### **SOSIAL, BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN**

#### **7.1. Dinas Sosial**

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial. Lembaga ini berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan masalah kemiskinan.

Program yang dijalankan mencakup distribusi bantuan sosial hingga ke tingkat kampung, pendataan penduduk berbasis dokumen kependudukan, serta kerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan tokoh masyarakat adat untuk memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, Dinas Sosial Jayawijaya juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM dan kegiatan produktif masyarakat, sehingga intervensi sosial tidak hanya berupa bantuan tetapi juga penguatan kapasitas ekonomi lokal.

Dengan orientasi tersebut, Dinas Sosial Jayawijaya menjadi garda terdepan dalam menjaga


ketahanan sosial masyarakat pegunungan, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program.

### 7.1.1. Kelompok Rentan Kabupaten Jayawijaya



**Gambar 54. Kelompok Rentan**

Data layanan kesejahteraan sosial memperlihatkan variasi jumlah penerima manfaat dari berbagai kelompok rentan. Fakir miskin menjadi kelompok dengan penerima terbesar, mencapai 4.228 orang, sehingga menunjukkan bahwa intervensi sosial paling banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Angka ini jauh melampaui kategori lain dan



menegaskan bahwa penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas utama kebijakan sosial daerah.

Kelompok anak terlantar yang memperoleh permakanan sesuai standar gizi minimal tercatat sebanyak 200 orang, sedangkan anak terlantar yang dijangkau hanya 20 orang. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa cakupan layanan gizi lebih luas dibandingkan jangkauan intervensi lainnya, namun jumlah anak yang masuk dalam sistem layanan masih terbatas.

Untuk kelompok gelandangan dan pengemis, terdapat 200 orang yang menerima layanan permakanan sesuai standar gizi minimal. Angka ini sebanding dengan layanan bagi anak terlantar, sehingga memperlihatkan adanya perhatian terhadap kelompok rentan di luar kategori fakir miskin.

Pada kelompok lanjut usia terlantar, tercatat 40 orang menerima kebutuhan sandang dan 43 orang memperoleh alat bantu serta alat peraga. Walaupun jumlahnya relatif kecil, layanan ini tetap penting karena menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan dukungan fungsional dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Selain itu, terdapat 40 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang berperan sebagai ujung

tombak pelaksanaan program di lapangan. Keberadaan tenaga ini menjadi faktor penting dalam memastikan layanan sosial dapat menjangkau kelompok rentan secara efektif.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa layanan sosial di Kabupaten Jayawijaya masih didominasi oleh kelompok fakir miskin, sementara anak terlantar dan lansia terlantar menerima layanan dalam skala lebih kecil. Ketimpangan distribusi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi kebijakan, karena menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya diarahkan pada satu kelompok rentan, sedangkan kelompok lainnya belum terlayani secara optimal. Pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi pada kategori anak dan lansia agar kesejahteraan sosial dapat tercapai secara lebih merata di seluruh kelompok rentan.

#### **7.1.2. Sebaran Keluarga KAT dan Lokasi Pembinaan Sosial di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**

Program pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan keterlibatan pada dua komponen utama: jumlah keluarga sasaran dan lokasi pembinaan. Tercatat sebanyak 35 keluarga KAT telah masuk dalam cakupan program, sementara jumlah lokasi pembinaan, pemantauan,


dan evaluasi mencapai 50 titik. Perbedaan antara jumlah keluarga dan lokasi menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dilakukan secara menyebar, dengan kemungkinan satu lokasi mencakup lebih dari satu keluarga atau satu keluarga menerima intervensi di beberapa titik layanan.



**Gambar 55. Sebaran Keluarga KAT dan Lokasi Pembinaan Sosial di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**

Distribusi ini memperlihatkan bahwa strategi pemberdayaan sosial tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada perluasan titik intervensi. Dengan cakupan lokasi yang lebih besar dibandingkan jumlah keluarga,





Dinas Sosial berupaya membangun sistem pembinaan yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil secara lebih intensif. Hal ini penting mengingat karakter geografis Jayawijaya yang menantang dan keberadaan komunitas adat yang tersebar di wilayah pegunungan.

Jumlah keluarga yang terlibat masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan potensi komunitas adat yang ada. Kondisi ini menjadi dasar evaluasi untuk memperluas cakupan program, memperkuat pendekatan berbasis kampung, dan meningkatkan efektivitas pemantauan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap lokasi pembinaan memiliki dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi tenaga sosial, materi edukatif, maupun sarana pendukung lainnya.


Dengan memperhatikan rasio antara keluarga dan lokasi, program pemberdayaan sosial KAT dapat diarahkan untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, memperkuat partisipasi komunitas, dan membangun ketahanan sosial berbasis budaya. Pendekatan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa intervensi sosial benar-benar menjangkau kelompok rentan secara bermakna dan berkelanjutan.

### 7.1.3. Capaian Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



**Gambar 56. Capaian Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**


Diagram memperlihatkan capaian program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Kategori Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB menempati posisi paling menonjol dengan jumlah 40 hasil kerja, menunjukkan bahwa fokus kelembagaan diarahkan pada penguatan koordinasi antar sektor di tingkat kampung sebagai pusat pembangunan keluarga.



Kategori lain seperti Materi ibangga yang dikembangkan, Kebijakan pembangunan daerah terhadap program KSPK, serta Penguatan kapasitas lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan masing-masing hanya mencatat 1 hasil kerja. Pemetaan kependudukan juga tercatat 1 hasil kerja, sementara Kajian dampak kependudukan tidak menghasilkan capaian pada periode ini. Perbedaan yang mencolok ini menegaskan adanya ketimpangan capaian antar program, di mana sebagian besar energi kelembagaan terserap pada integrasi lintas sektor, sementara aspek kajian dan penguatan kapasitas belum berkembang optimal.

Ketiadaan capaian pada kajian dampak kependudukan menjadi catatan penting, karena kajian tersebut seharusnya menjadi dasar analisis untuk merumuskan kebijakan keluarga yang berbasis data. Minimnya hasil pada kategori ini berpotensi melemahkan fondasi kebijakan, serta mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons dinamika kependudukan secara tepat.

Secara keseluruhan, capaian program menunjukkan arah kebijakan yang masih terpusat pada integrasi lintas sektor di Kampung KB. Untuk memperkuat kualitas pembangunan keluarga, diperlukan strategi yang lebih seimbang dengan meningkatkan capaian ibangga, memperluas kajian



kependudukan, dan memperkuat kapasitas lembaga layanan. Dengan langkah tersebut, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana dapat berjalan lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

#### **7.1.4. Capaian Kegiatan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tahun 2024**


Capaian kegiatan menunjukkan dominasi pada program Bangga Kencana, dengan jumlah mencapai 80 kegiatan. Angka ini menegaskan bahwa penguatan mekanisme operasional, pendataan keluarga, dan koordinasi lintas mitra menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program. Fokus besar pada Bangga Kencana memperlihatkan komitmen kelembagaan dalam membangun fondasi ketahanan keluarga melalui pendekatan sistematis dan berbasis data.



**Gambar 57. Capaian Kegiatan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tahun 2024**

Kategori Kampung KB yang telah menerima pembinaan mencatat 40 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kampung tetap menjadi strategi penting dalam menjangkau masyarakat, sekaligus memastikan bahwa Kampung KB berfungsi sebagai pusat integrasi pembangunan keluarga dan wadah pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas.

Sementara itu, capaian pada kategori lain masih sangat terbatas. Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (ALOKON) hanya menghasilkan 1 kegiatan, pelaksanaan program yang mendukung ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga) juga tercatat 1 kegiatan,



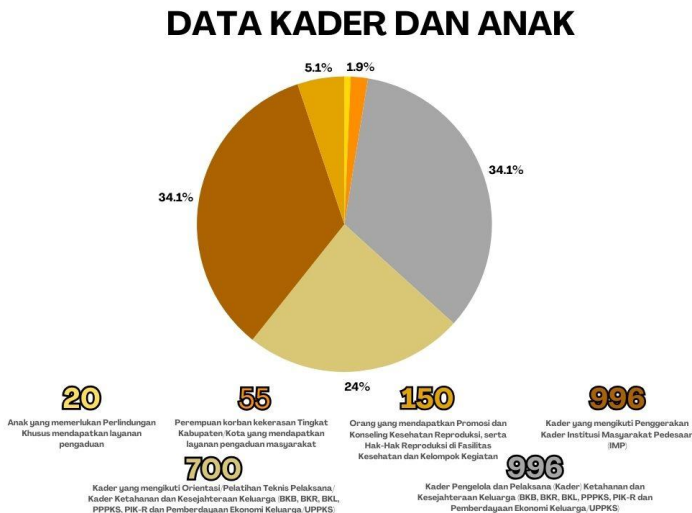
dan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan hanya mencapai 1 kegiatan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa aspek teknis layanan KB, evaluasi kualitas keluarga, dan penguatan jejaring perlindungan perempuan belum menjadi fokus yang seimbang dalam pelaksanaan program.

Keterbatasan capaian pada tiga kategori tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi. Minimnya hasil pada ALOKON berpotensi membatasi efektivitas layanan KB, rendahnya dukungan pada ibangga mengurangi basis evaluasi kualitas keluarga, dan terbatasnya penguatan jejaring lembaga layanan perempuan dapat melemahkan perlindungan kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih seimbang agar pembangunan keluarga tidak hanya terpusat pada Bangga Kencana dan Kampung KB, tetapi juga memperkuat aspek layanan teknis, evaluasi berbasis indeks, dan jejaring perlindungan perempuan.

Secara keseluruhan, capaian program memperlihatkan arah kebijakan yang masih terpusat pada Bangga Kencana dan pembinaan Kampung KB. Untuk memperkuat kualitas pembangunan keluarga, diperlukan peningkatan pada aspek ALOKON, ibangga, dan jejaring perlindungan


perempuan. Dengan langkah tersebut, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana dapat berjalan lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

### 7.1.5. Capaian Program Pengasuhan Anak dan Pelatihan Kader Perlindungan Tahun 2024



**Gambar 58. Capaian Program Pengasuhan Anak dan Pelatihan Kader Perlindungan Tahun 2024**

Capaian program menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara layanan langsung kepada masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas kader. Pada aspek layanan, tercatat 20 anak yang memerlukan perlindungan



husus telah mendapatkan pelayanan pengaduan, sementara 55 perempuan korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota memperoleh layanan pengaduan masyarakat. Selain itu, terdapat 150 orang yang menerima promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak reproduksi melalui fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan. Angka ini memperlihatkan adanya intervensi langsung terhadap kelompok rentan, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.

Di sisi lain, capaian pada kegiatan kader menunjukkan dominasi yang sangat besar. Sebanyak 996 kader mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan, 700 kader mengikuti orientasi teknis pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga, dan 996 kader lainnya berperan sebagai pengelola sekaligus pelaksana program ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Dominasi angka ini menegaskan bahwa arah kebijakan kelembagaan masih terpusat pada penguatan kapasitas kader sebagai tulang punggung pelaksanaan program perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga.

Ketimpangan antara capaian layanan langsung dan kegiatan kader menjadi catatan



penting dalam evaluasi. Penguatan kapasitas kader memang krusial untuk membangun sistem perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan, namun rendahnya capaian layanan langsung terhadap anak dan perempuan korban kekerasan menunjukkan bahwa dampak program di tingkat masyarakat belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan jumlah penerima layanan pengaduan dan konseling memperlihatkan perlunya strategi yang lebih seimbang antara penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian layanan nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, capaian program tahun 2024 menegaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana telah berhasil memperkuat kapasitas kader dalam jumlah besar, namun masih perlu meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan langsung kepada masyarakat. Dengan memperluas akses pengaduan, konseling, dan pendampingan bagi kelompok rentan, serta tetap menjaga konsistensi dalam penguatan kapasitas kader, program pengasuhan anak dan perlindungan keluarga dapat berjalan lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

## **7.2. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pelestarian budaya lokal serta pengembangan sektor pariwisata. Lembaga ini berperan menjaga dan mengembangkan kekayaan tradisi masyarakat pegunungan Papua, termasuk seni, adat, dan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah. Pada saat yang sama, dinas ini juga bertanggung jawab mendorong potensi pariwisata alam Jayawijaya, seperti panorama Pegunungan Jayawijaya, lembah dan kampung adat, serta atraksi budaya yang menjadi daya tarik wisatawan.

Program yang dijalankan mencakup inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan, pembinaan komunitas seni, serta penyelenggaraan festival budaya yang memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap warisan lokal. Di bidang pariwisata, dinas ini mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan aksesibilitas, promosi destinasi, dan penyediaan fasilitas pendukung. Dengan orientasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jayawijaya berupaya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah sekaligus menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.


### 7.2.1. Destinasi dan Kawasan Pariwisata



**Gambar 59. Proporsi Destinasi dan Kawasan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan sebagai dasar pengelolaan destinasi dan kawasan wisata di wilayah pegunungan Papua. Penerapan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal, pemanfaatan potensi alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data Kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa 94% destinasi pariwisata di wilayah ini telah mengintegrasikan prinsip berkelanjutan, sehingga mayoritas titik wisata yang dikelola pemerintah daerah maupun masyarakat adat telah



memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam praktiknya. Sementara itu, 6% kawasan strategis pariwisata di Jayawijaya juga telah menerapkan prinsip berkelanjutan, yang meskipun jumlahnya lebih kecil, memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan pariwisata daerah karena biasanya menjadi ikon wisata unggulan.

Proporsi ini menjadi bukti bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan telah diadopsi secara nyata di Jayawijaya. Dominasi destinasi wisata dalam penerapan prinsip berkelanjutan memperlihatkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berlaku pada kawasan strategis, tetapi juga telah menjangkau unit-unit wisata yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan orientasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya menempatkan pariwisata berkelanjutan sebagai strategi pembangunan daerah, sehingga pengelolaan wisata mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya dan alam sebagai aset jangka panjang.


### 7.2.2. Dokumen dan Laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



**Gambar 60. Capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya menunjukkan produktivitas dokumentasi yang tinggi dalam mendukung pelestarian budaya dan pengembangan sektor pariwisata. Diagram ini memperlihatkan distribusi dokumen dan laporan yang dihasilkan sepanjang tahun, mencerminkan fokus kelembagaan terhadap fasilitasi, pembinaan, publikasi, dan kemitraan strategis.

Kategori dengan jumlah tertinggi adalah dokumen publikasi seni dan budaya daerah



sebanyak 35 dokumen, yang menandakan komitmen kuat dalam mendokumentasikan ekspresi budaya lokal secara sistematis. Diikuti oleh fasilitasi dan pembinaan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 30 kegiatan, yang memperlihatkan keberpihakan terhadap pemberdayaan masyarakat adat sebagai pelaku utama sektor wisata.

Tiga kategori lainnya masing-masing mencatat 15 dokumen, yaitu kemitraan dengan lembaga pelestari budaya, hasil pembinaan dan pengembangan kesejarahan, serta data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat. Ketiganya menunjukkan bahwa aspek kolaboratif dan keterbukaan informasi menjadi bagian integral dari strategi kebudayaan daerah.

Laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi, laporan pemasaran pariwisata, serta majalah dan buku tentang adat istiadat mencatat jumlah yang lebih rendah, namun tetap relevan sebagai bagian dari penguatan narasi budaya dan promosi destinasi.

Secara keseluruhan, distribusi dokumen ini memperlihatkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jayawijaya tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi juga membangun

fondasi kelembagaan dan pengetahuan budaya yang terdokumentasi dengan baik. Pola dokumentasi ini mendukung tata kelola kebudayaan yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

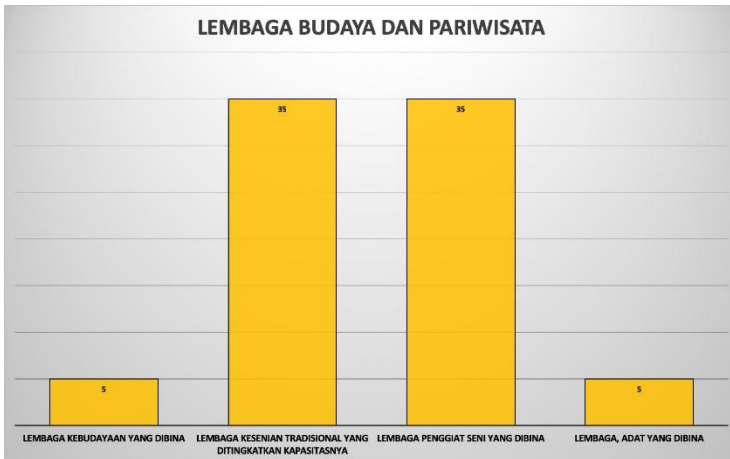
### **7.2.3. Penguatan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya melaksanakan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari strategi pelestarian budaya dan pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas. Diagram ini menunjukkan distribusi lembaga yang telah dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sepanjang tahun 2024, mencerminkan fokus intervensi terhadap pelaku seni dan institusi adat.

Tercatat **35 lembaga kesenian tradisional** dan **35 lembaga penggiat seni** yang telah mengalami peningkatan kapasitas. Jumlah ini menunjukkan bahwa perhatian utama diarahkan pada pelaku seni sebagai penggerak utama ekspresi budaya lokal dan atraksi wisata berbasis tradisi.

Sementara itu, **5 lembaga kebudayaan** dan **5 lembaga adat** tercatat dalam kategori pembinaan kelembagaan. Meskipun jumlahnya lebih kecil,

kedua kategori ini memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai warisan dan struktur sosial masyarakat pegunungan.



**Gambar 61. Jumlah Lembaga Budaya dan Pariwisata yang Dibina dan Ditingkatkan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**

Distribusi ini memperlihatkan bahwa pendekatan Dinas tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakter dan fungsi masing-masing lembaga. Peningkatan kapasitas penggiat seni dan kesenian tradisional diarahkan untuk memperkuat daya saing atraksi budaya, sedangkan pembinaan lembaga adat dan kebudayaan difokuskan pada penguatan identitas dan keberlanjutan nilai-nilai lokal.



Dengan pola tersebut, penguatan kelembagaan budaya dan pariwisata di Jayawijaya tidak hanya mendukung pelestarian, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor wisata yang berbasis kearifan lokal dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

#### **7.2.4. Objek Budaya dan Pariwisata yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan objek budaya dan pariwisata sepanjang tahun 2024. Diagram ini memperlihatkan distribusi berbagai kategori objek yang telah melalui proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan penetapan kelembagaan, mencerminkan pendekatan komprehensif terhadap pelestarian warisan budaya dan penguatan atraksi wisata lokal.

Objek cagar budaya dan warisan budaya mendominasi dengan jumlah **15 unit** pada hampir seluruh subkategori: didaftarkan, ditetapkan, dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola. Konsistensi angka ini menunjukkan bahwa proses pelestarian telah dilakukan secara sistematis dan berlapis, mulai dari identifikasi hingga pengelolaan aktif oleh pemerintah daerah dan komunitas lokal.



**Gambar 62. Distribusi Objek Budaya dan Pariwisata yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**


Objek atraksi wisata budaya yang dikembangkan juga mencatat **15 unit**, menandakan bahwa aspek budaya telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pariwisata Jayawijaya. Di sisi lain, objek pemaluan kebudayaan dan tradisi budaya masing-masing mencatat **10 unit** pada kategori perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi budaya lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis komunitas.

Objek pemauan lembaga adat mencatat **5 unit** pada setiap kategori, menandakan bahwa intervensi terhadap kelembagaan adat dilakukan secara selektif dan bertahap. Sementara itu, objek warisan budaya nasional dan dunia yang masuk nominasi tercatat sebanyak **2 unit**, menjadi indikasi bahwa Jayawijaya memiliki potensi warisan kelas dunia yang sedang dalam proses pengakuan lebih luas.

Secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya telah mengadopsi pendekatan pelestarian budaya yang terstruktur, dengan keseimbangan antara perlindungan nilai-nilai tradisional dan pengembangan atraksi wisata berbasis budaya. Pola ini mendukung visi pariwisata berkelanjutan yang berakar pada identitas lokal dan partisipasi masyarakat adat.

#### **7.2.5. Sumber Daya Budaya dan Kepariwisata**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya mencatat capaian strategis dalam penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan budaya sepanjang tahun 2024. Diagram ini memperlihatkan distribusi lima kategori utama yang mencerminkan arah kebijakan:

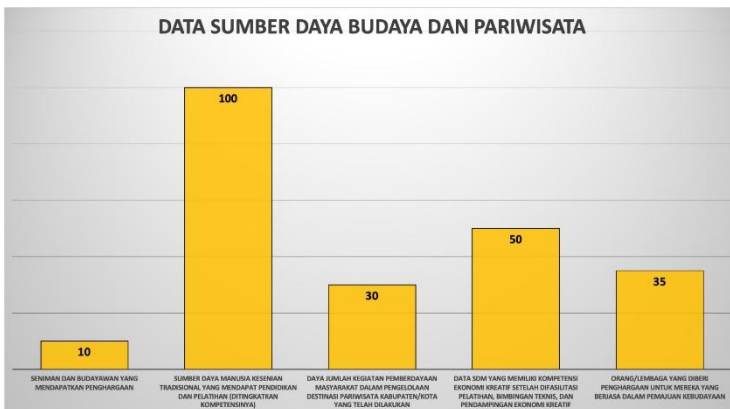


peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata.

Kategori dengan jumlah tertinggi adalah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, yaitu sebanyak 100 orang. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pelaku seni lokal menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya pelestarian budaya yang berbasis komunitas dan regenerasi pelaku tradisi.

Selanjutnya, 50 orang SDM ekonomi kreatif tercatat telah memiliki kompetensi setelah difasilitasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Capaian ini memperlihatkan bahwa sektor ekonomi kreatif mulai diarahkan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis budaya.

Sebanyak 30 kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Intervensi ini memperkuat partisipasi warga dalam tata kelola wisata, sekaligus memperluas dampak ekonomi dari sektor pariwisata ke tingkat kampung.



**Gambar 63. Distribusi Sumber Daya Budaya dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 Berdasarkan Penghargaan, Pelatihan, dan Pemberdayaan**

Dua kategori lainnya mencatat capaian berbasis penghargaan: 35 orang/lembaga yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan dan 10 seniman serta budayawan yang menerima penghargaan. Kedua angka ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kontribusi budaya telah menjadi bagian dari strategi kelembagaan, meskipun masih terbatas secara kuantitatif.

Secara keseluruhan, distribusi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Jayawijaya telah mengarahkan kebijakan budaya dan pariwisata secara progresif, dengan menempatkan pelatihan dan pemberdayaan sebagai fondasi, serta


penghargaan sebagai bentuk legitimasi atas kontribusi individu dan lembaga. Pola ini mendukung pembangunan sektor budaya yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

**7.2.6. Sarana dan Prasarana Pariwisata**



**Gambar 64. Sarana dan Prasarana Pariwisata**


Capaian pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2024 memperlihatkan kesinambungan antara penguatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana pendukung. Data menunjukkan bahwa 15 unit cagar budaya telah dipublikasikan, menandakan fokus kuat pada dokumentasi dan diseminasi informasi. Publikasi ini menjadi sarana penting dalam memperkenalkan warisan budaya lokal kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat identitas daerah.



Selain itu, terdapat 10 unit sarana pembinaan sejarah yang telah dikembangkan. Kehadiran fasilitas ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang edukatif yang mendukung pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya. Sarana tersebut berfungsi sebagai media pembelajaran sekaligus penguatan narasi sejarah lokal bagi generasi muda.

Sementara itu, pengelolaan langsung terhadap sarana pariwisata oleh pemerintah kabupaten/kota masih sangat terbatas, dengan masing-masing hanya 1 unit yang tercatat baik di destinasi provinsi maupun kabupaten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian dokumentasi dan publikasi dengan penguatan infrastruktur fisik.

Keterkaitan dengan narasi sebelumnya tentang sumber daya budaya dan pariwisata terlihat jelas. Peningkatan kompetensi pelaku seni tradisional, fasilitasi SDM ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi telah menghasilkan basis sumber daya yang kuat. Sarana publikasi cagar budaya dan fasilitas pembinaan sejarah menjadi wadah aktualisasi dari sumber daya tersebut, sehingga pelatihan dan penghargaan yang diberikan tidak berhenti pada individu, melainkan terhubung dengan



infrastruktur yang mendukung keberlanjutan aktivitas budaya dan pariwisata.

Distribusi ini memperlihatkan pola pembangunan yang berlapis: dimulai dari penguatan kapasitas manusia, dilanjutkan dengan dokumentasi dan publikasi budaya, kemudian diarahkan pada pengelolaan sarana fisik. Strategi ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata Jayawijaya berakar pada pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat, lalu bergerak menuju penguatan infrastruktur destinasi wisata secara berkelanjutan.




## **BAB VIII**

### **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**



Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Jayawijaya diarahkan pada penguatan kapasitas generasi muda serta penyediaan sarana olahraga yang mendukung partisipasi masyarakat. Fokus kebijakan tahun 2024 menekankan dua aspek utama: pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan sosial dan pengembangan olahraga sebagai wahana pembinaan karakter serta kesehatan masyarakat.

Program kepemudaan mencakup fasilitasi pendidikan non-formal, pelatihan kewirausahaan, dan kegiatan kreatif berbasis komunitas. Upaya ini sejalan dengan narasi sebelumnya tentang penguatan sumber daya manusia di bidang budaya dan ekonomi kreatif. Generasi muda Jayawijaya tidak hanya dilatih untuk memiliki keterampilan teknis, tetapi juga diarahkan agar mampu berkontribusi dalam pengelolaan destinasi wisata dan pelestarian budaya lokal.



Di bidang olahraga, pemerintah daerah telah melaksanakan pembinaan cabang olahraga unggulan, penyelenggaraan kompetisi tingkat lokal, serta dukungan terhadap atlet potensial. Sarana olahraga yang tersedia masih terbatas, namun telah dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Keterbatasan ini menjadi tantangan yang sama dengan sektor pariwisata, di mana penguatan infrastruktur fisik masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan capaian non-fisik berupa pelatihan dan pemberdayaan.

Keterkaitan dengan narasi sebelumnya terlihat jelas: penguatan pemuda dan olahraga menjadi kelanjutan dari strategi pembangunan berbasis sumber daya manusia. Jika sektor budaya dan pariwisata menekankan pelatihan seniman, budayawan, dan pelaku ekonomi kreatif, maka sektor kepemudaan dan olahraga memperluas cakupan dengan melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan sosial. Dengan demikian, arah kebijakan Jayawijaya membentuk pola berlapis yang konsisten: membangun kapasitas manusia terlebih dahulu, kemudian memperkuat sarana pendukung, sehingga tercipta ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.


## 8.1. Organisasi dan Sentra Pemuda Kabupaten Jayawijaya



**Gambar 65. Jumlah Organisasi dan Sentra Pemuda**

Distribusi organisasi dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan dinamika partisipasi yang tersebar dalam enam kategori utama. Grafik ini memperlihatkan bahwa organisasi kepemudaan mencatat jumlah tertinggi, yaitu 7 entitas aktif, menandakan bahwa wadah formal bagi pemuda untuk berjejaring dan berkontribusi telah tersedia dan dimanfaatkan.

Organisasi kepramukaan dan kompetisi single event masing-masing mencatat 5 kegiatan, memperlihatkan bahwa aktivitas berbasis karakter dan kompetisi tetap menjadi bagian dari ekosistem

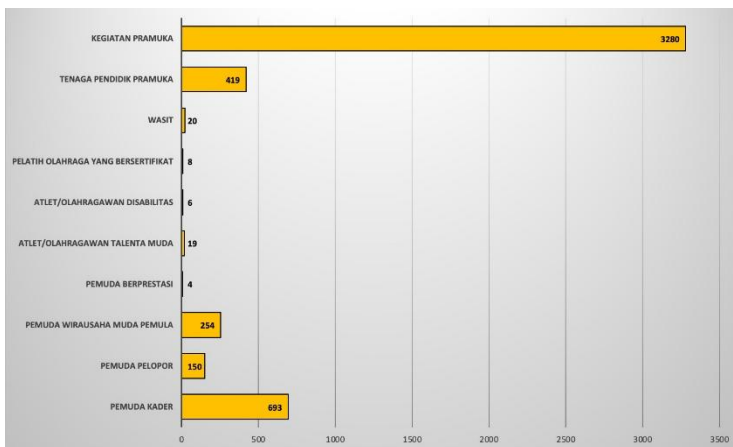


pembinaan generasi muda. Keberadaan organisasi olahraga sebanyak 3 unit menunjukkan bahwa inisiatif berbasis fisik dan prestasi masih berjalan, meskipun belum merata di seluruh wilayah.

Dua kategori lainnya mencatat angka paling rendah, yaitu 1 unit sentra kewirausahaan pemuda dan 1 kompetisi olahraga pelajar tingkat menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fasilitasi kewirausahaan dan kompetisi berbasis pendidikan formal masih terbatas, sehingga perlu diperkuat dalam perencanaan tahun berikutnya.

Distribusi ini memperlihatkan kesinambungan dengan narasi sebelumnya tentang pembangunan kepemudaan dan olahraga. Penguatan kapasitas generasi muda telah dimulai melalui organisasi dan kegiatan komunitas, namun belum sepenuhnya didukung oleh sarana kewirausahaan dan kompetisi pendidikan yang terstruktur. Pola ini menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan di Jayawijaya masih bertumpu pada inisiatif sosial dan karakter, sementara aspek ekonomi dan prestasi formal memerlukan intervensi lanjutan.


## 8.2. Kegiatan Kepramukaan, Pemuda Berprestasi dan Atlit



**Gambar 66. Kepramukaan, Pemuda berprestasi dan Atlit**

Distribusi jumlah pemuda dan atlet di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan dominasi kegiatan kepramukaan sebagai wadah pembinaan karakter dan partisipasi sosial. Grafik ini memperlihatkan bahwa kegiatan pramuka mencatat angka tertinggi, yaitu 3.280 peserta, didukung oleh 419 tenaga pendidik pramuka yang berperan dalam fasilitasi dan pembinaan.

Di luar kepramukaan, pemuda kader tercatat sebanyak 693 orang, menandakan bahwa proses regenerasi dan penguatan kapasitas



kepemimpinan telah berjalan melalui jalur komunitas dan organisasi. Pemuda wirausaha muda pemula sebanyak 254 orang menunjukkan bahwa fasilitasi kewirausahaan mulai menjangkau generasi muda, meskipun belum merata di seluruh wilayah.

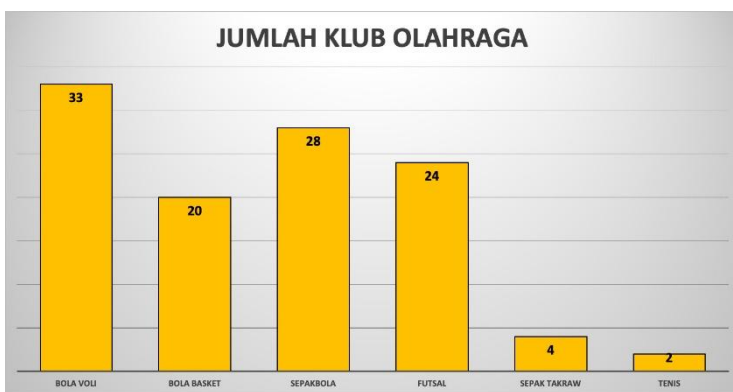
Pemuda pelopor tercatat sebanyak 150 orang, memperlihatkan bahwa inisiatif lokal yang berbasis inovasi dan pengaruh sosial telah mendapatkan ruang dalam kebijakan kepemudaan. Di sisi lain, pemuda berprestasi hanya tercatat 4 orang, menandakan bahwa pengakuan formal terhadap capaian individu masih terbatas dan memerlukan sistem apresiasi yang lebih terstruktur.

Di bidang olahraga, jumlah atlet talenta muda sebanyak 19 orang, atlet disabilitas sebanyak 6 orang, wasit sebanyak 20 orang, dan pelatih bersertifikat sebanyak 8 orang menunjukkan bahwa ekosistem olahraga masih dalam tahap awal pengembangan. Keterbatasan jumlah pelatih dan atlet potensial menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui pembinaan berkelanjutan dan penyediaan sarana yang memadai.

Pola distribusi ini memperlihatkan bahwa pembangunan kepemudaan dan olahraga di Jayawijaya masih bertumpu pada partisipasi sosial dan komunitas. Kegiatan berbasis karakter dan


kewirausahaan telah mendapatkan perhatian, namun aspek kompetitif dan profesional dalam olahraga belum berkembang secara proporsional. Untuk menciptakan ekosistem yang lebih seimbang, diperlukan kebijakan yang mendorong pembinaan atlet muda, pelatih bersertifikat, serta sistem apresiasi terhadap pemuda berprestasi. Dukungan terhadap pemuda disabilitas juga perlu diperluas agar inklusi sosial dalam olahraga dapat terwujud secara nyata.

### 8.3. Klub Olahraga



**Gambar 67. Jumlah Klub Olahraga**

Klub olahraga merupakan wadah strategis dalam membentuk disiplin, solidaritas, dan daya saing generasi muda. Keberadaan klub tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan fisik, tetapi juga memperkuat pembinaan



prestasi, regenerasi atlet, dan penguatan identitas komunitas. Di wilayah seperti Jayawijaya, klub olahraga berperan sebagai ruang sosial yang menjembatani potensi lokal dengan arah pembangunan daerah.

Grafik ini memperlihatkan distribusi jumlah klub olahraga di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024. Bola voli mencatat jumlah tertinggi dengan 33 klub, menunjukkan bahwa cabang ini memiliki daya tarik kuat dan basis komunitas yang luas. Sepakbola berada di posisi kedua dengan 28 klub, menandakan bahwa olahraga ini tetap menjadi pilihan utama dalam aktivitas kompetitif dan rekreatif masyarakat.

Futsal mencatat 24 klub, memperlihatkan bahwa variasi olahraga berbasis bola telah berkembang dan menjangkau ruang-ruang komunitas yang lebih fleksibel. Bola basket memiliki 20 klub, menunjukkan bahwa cabang ini mulai mendapatkan tempat dalam pembinaan generasi muda, terutama di lingkungan pendidikan.

Di sisi lain, senam tarian hanya tercatat 4 klub, dan tenis sebanyak 2 klub, menandakan bahwa cabang-cabang ini masih berada dalam tahap pengenalan dan belum memiliki basis komunitas yang kuat. Kesenjangan ini



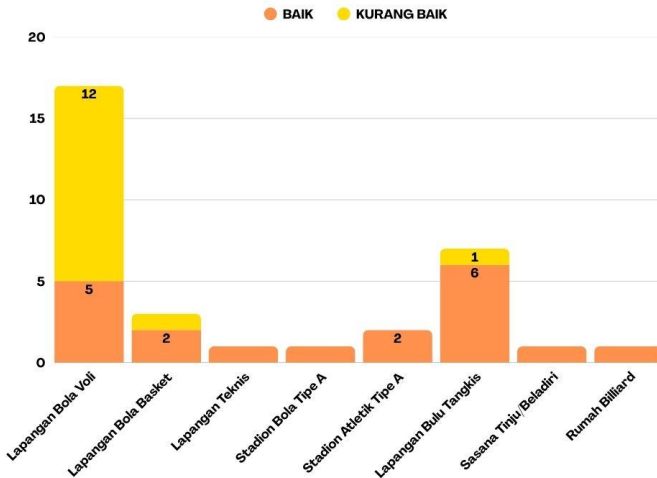
memperlihatkan perlunya strategi diversifikasi cabang olahraga agar partisipasi masyarakat tidak terpusat pada jenis olahraga tertentu.

Distribusi ini menunjukkan bahwa Jayawijaya memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga komunitas. Klub-klub yang telah terbentuk menjadi fondasi awal bagi pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi lokal, dan penguatan karakter generasi muda. Untuk memperluas dampak, diperlukan kebijakan yang mendorong pendirian klub baru, peningkatan kapasitas pelatih, serta penyediaan sarana yang mendukung keberlanjutan aktivitas olahraga di tingkat kampung dan sekolah.

#### **8.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Olah Raga**

Ketersediaan sarana olahraga yang layak menjadi prasyarat penting dalam mendukung pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan fisik. Grafik ini memperlihatkan kondisi aktual berbagai jenis fasilitas olahraga di Kabupaten Jayawijaya, dengan klasifikasi berdasarkan kategori “baik” dan “kurang baik”.

## KONDISI SARANA OLAHRAHA



**Gambar 68. Kondisi Sarana Olahraga**

Lapangan bola voli mencatat jumlah tertinggi dalam kategori “kurang baik”, yaitu 12 unit, sementara hanya 5 unit yang berada dalam kondisi baik. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun olahraga bola voli memiliki basis komunitas yang luas, kualitas fasilitas belum sepenuhnya mendukung intensitas penggunaannya.


Lapangan bola basket seluruhnya berada dalam kondisi kurang baik (2 unit), menandakan bahwa cabang ini belum mendapatkan perhatian dalam hal pemeliharaan sarana. Sebaliknya,

lapangan tenis, stadion bola tipe A, dan sasana tinju/bela diri masing-masing memiliki 1 unit dalam kondisi baik dan tidak tercatat dalam kategori kurang baik, menunjukkan bahwa fasilitas tersebut tersedia secara terbatas namun masih terjaga.

Stadion atletik tipe A memiliki 2 unit dalam kondisi baik, memperlihatkan bahwa fasilitas untuk cabang atletik telah tersedia dan layak digunakan. Lapangan bulu tangkis mencatat 6 unit dalam kondisi baik dan 1 unit kurang baik, menandakan bahwa olahraga ini memiliki dukungan sarana yang relatif memadai dibanding cabang lainnya.

Rumah billiard tercatat 1 unit dalam kondisi baik, menunjukkan bahwa fasilitas rekreasi alternatif juga mulai diperhatikan dalam tata kelola sarana olahraga.

Secara keseluruhan, distribusi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar fasilitas olahraga di Jayawijaya masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas dan pemeliharaan. Ketimpangan antara jumlah dan kondisi sarana mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang tidak hanya menambah jumlah fasilitas, tetapi juga memastikan keberlanjutan fungsi dan kelayakan teknisnya. Prioritas pembenahan perlu diarahkan pada cabang-cabang dengan tingkat partisipasi

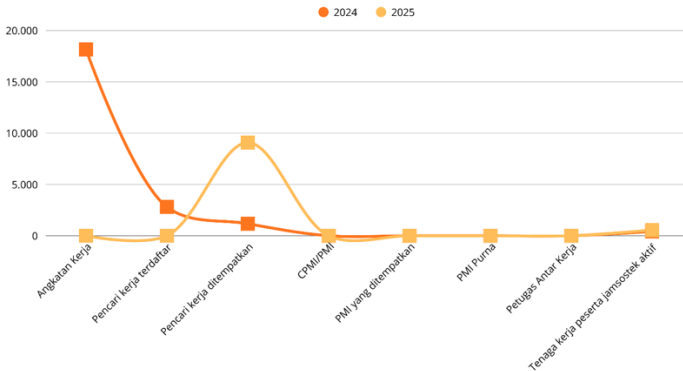


tinggi, seperti bola voli dan bola basket, agar potensi komunitas dapat dioptimalkan melalui dukungan infrastruktur yang memadai.

## BAB IX

### TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

#### 9.1. Profil Tenaga Kerja dan Mobilitas



**Gambar 69. Jumlah Tenaga Kerja dan Mobilitasnya**

Profil tenaga kerja Kabupaten Jayawijaya tahun 2024–2025 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam aspek pencatatan, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan data dan grafik yang tersedia, terlihat bahwa pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja mencapai 18.154 orang, menjadi puncak tertinggi dalam grafik. Namun, pada tahun 2025, data angkatan kerja tidak tercatat sama sekali, menandakan adanya kekosongan pelaporan atau perubahan sistem pencatatan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Ketidakhadiran data ini

berdampak pada analisis tren ketenagakerjaan secara menyeluruh, karena angkatan kerja merupakan fondasi utama dalam pengukuran partisipasi ekonomi.

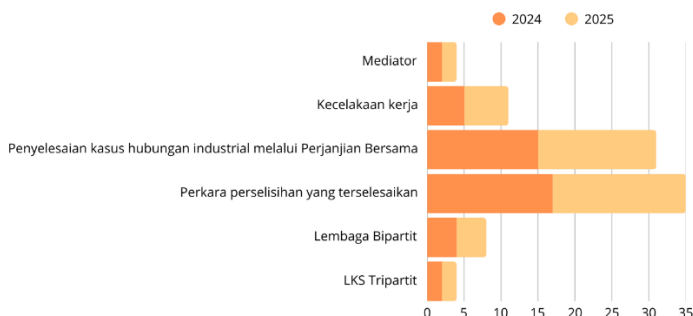
Indikator pencari kerja terdaftar juga mengalami penurunan drastis, dari 2.812 orang di tahun 2024 menjadi nol pada tahun 2025. Penurunan ini dapat mencerminkan dua kemungkinan: perbaikan sistem penempatan kerja yang mengurangi jumlah pencari kerja aktif, atau gangguan dalam proses registrasi dan pelaporan. Sebaliknya, indikator pencari kerja yang berhasil ditempatkan menunjukkan lonjakan tajam. Dari 1.172 orang di tahun 2024, angka ini meningkat drastis menjadi 9.080 orang di tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan efektivitas layanan penempatan kerja, baik melalui sistem antar kerja, pelatihan, maupun perluasan akses terhadap pasar kerja lokal dan regional.

Mobilitas tenaga kerja luar negeri masih terbatas. CPMI/PMI, PMI yang ditempatkan, dan PMI purna masing-masing mencatat angka minimal atau nol, menunjukkan stagnasi dalam migrasi tenaga kerja internasional. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja luar negeri, kendala administratif, atau belum optimalnya sistem fasilitasi penempatan luar negeri.

Jumlah petugas antar kerja tetap stabil di angka 1 orang untuk kedua tahun, menandakan belum adanya ekspansi kapasitas operasional layanan antar kerja. Di sisi lain, partisipasi tenaga kerja dalam program perlindungan sosial menunjukkan tren positif. Jumlah tenaga kerja peserta aktif dalam program jamsostek meningkat dari 419 orang di tahun 2024 menjadi 560 orang di tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, yang menjadi indikator penting dalam penguatan kerja formal dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, grafik dan data tabular menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekosongan data pada beberapa indikator dasar, capaian penempatan kerja dan perlindungan sosial mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi arah kebijakan ketenagakerjaan daerah, sekaligus menegaskan pentingnya konsistensi pelaporan dan penguatan sistem informasi tenaga kerja untuk mendukung perencanaan yang berbasis bukti.

## 9.2. Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan




**Gambar 70. Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan**

Kondisi hubungan industrial di Kabupaten Jayawijaya selama tahun 2024–2025 menunjukkan stabilitas kelembagaan dan peningkatan penyelesaian kasus ketenagakerjaan. Jumlah mediator hubungan industrial tetap konsisten sebanyak 2 orang di kedua tahun, menandakan keberlanjutan fungsi mediasi sebagai instrumen penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Meskipun jumlahnya terbatas, keberadaan mediator ini menjadi elemen penting dalam menjaga iklim kerja yang kondusif.

Kasus kecelakaan kerja mengalami sedikit peningkatan dari 5 kasus pada tahun 2024 menjadi 6 kasus pada tahun 2025. Kenaikan ini perlu





dicermati sebagai sinyal untuk memperkuat pengawasan keselamatan kerja dan penerapan standar K3 di lingkungan perusahaan. Di sisi lain, penyelesaian kasus hubungan industrial melalui mekanisme Perjanjian Bersama menunjukkan tren positif, meningkat dari 15 kasus menjadi 16 kasus. Hal ini mencerminkan efektivitas pendekatan dialogis dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

Jumlah perkara perselisihan yang berhasil diselesaikan juga meningkat dari 17 kasus di tahun 2024 menjadi 18 kasus di tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian perselisihan formal tetap berjalan dan mampu merespons dinamika hubungan kerja secara tepat. Dari sisi kelembagaan, jumlah Lembaga Bipartit dan LKS Tripartit tetap stabil, masing-masing sebanyak 4 dan 2 lembaga. Stabilitas ini menunjukkan bahwa struktur dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah tetap terjaga, meskipun belum mengalami ekspansi kelembagaan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya telah mempertahankan fondasi kelembagaan hubungan industrial yang fungsional, dengan capaian penyelesaian kasus yang meningkat secara

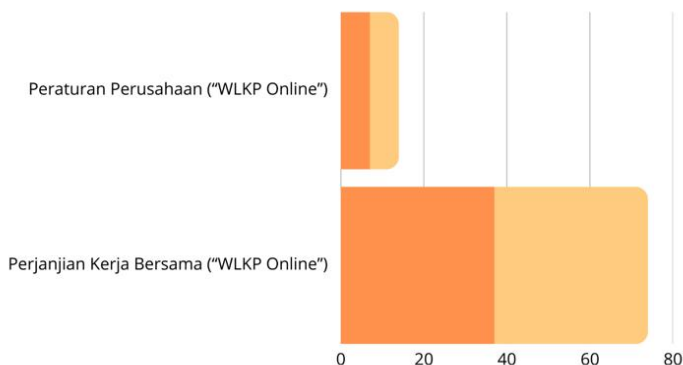
bertahap. Ke depan, penguatan kapasitas mediator, perluasan lembaga tripartit, dan peningkatan sistem pelaporan kecelakaan kerja menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.

### **9.3. Regulasi dan Dokumen Ketenaga Kerjaan**

Regulasi dan dokumen ketenagakerjaan di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 dan 2025 menunjukkan stabilitas dalam pelaporan dan kepatuhan perusahaan terhadap norma hubungan kerja. Berdasarkan data WLKP Online, tercatat sebanyak 7 dokumen Peraturan Perusahaan yang dilaporkan pada masing-masing tahun. Peraturan Perusahaan merupakan instrumen internal yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan hubungan kerja formal.

Sementara itu, jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tercatat jauh lebih tinggi, yaitu 37 dokumen pada tahun 2024 dan tetap 37 dokumen pada tahun 2025. Tingginya angka PKB menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah membangun mekanisme hubungan industrial yang lebih partisipatif dan berbasis kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja. PKB tidak

hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kualitas dialog sosial dan komitmen terhadap penyelesaian internal secara musyawarah.



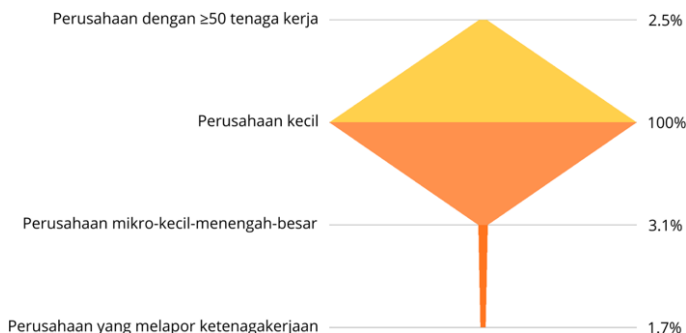
**Gambar 71. Regulasi dan Kepatuhan Perusahaan**

Stabilitas jumlah dokumen pada kedua kategori ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di Jayawijaya telah memiliki fondasi regulatif yang cukup kuat. Namun, stagnasi angka juga menjadi sinyal bahwa belum terjadi ekspansi jumlah perusahaan baru yang menyusun dokumen ketenagakerjaan secara formal. Ke depan, diperlukan strategi pembinaan dan fasilitasi bagi perusahaan kecil dan menengah agar lebih aktif dalam menyusun dan melaporkan dokumen ketenagakerjaan melalui sistem WLKP Online, guna memperkuat tata kelola hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan.

#### **9.4. Profil Perusahaan dan Kepatuhan**

Struktur perusahaan di Kabupaten Jayawijaya selama tahun 2024–2025 menunjukkan dominasi kuat oleh perusahaan kecil, dengan tren kepatuhan pelaporan ketenagakerjaan yang masih perlu diperkuat. Berdasarkan data, jumlah perusahaan kecil meningkat dari 650 unit pada tahun 2024 menjadi 670 unit pada tahun 2025. Kategori ini menempati porsi terbesar dalam struktur usaha daerah, sebagaimana tergambar dalam visualisasi funnel yang menunjukkan bahwa perusahaan kecil mencakup 100% basis usaha aktif. Hal ini mencerminkan karakteristik ekonomi lokal yang bertumpu pada sektor informal dan usaha berskala terbatas.

Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja  $\geq 50$  orang tercatat stabil sebanyak 16 unit di kedua tahun, atau sekitar 2,5% dari total perusahaan kecil. Meskipun jumlahnya kecil, perusahaan-perusahaan ini memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja formal, penerapan standar ketenagakerjaan, dan kontribusi terhadap PDRB. Keberadaan mereka menjadi indikator penting dalam mengukur kapasitas industri dan potensi ekspansi ekonomi daerah.



**Gambar 72. Profil Perusahaan dan Kepatuhan**

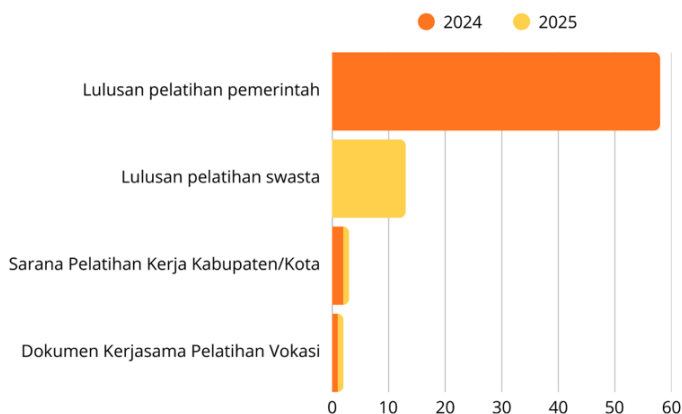
Kategori “Perusahaan mikro-kecil-menengah-besar” tercatat sebanyak 20 unit pada masing-masing tahun, yang merepresentasikan entitas usaha yang telah terdaftar lintas klasifikasi atau memiliki skala operasional yang lebih kompleks. Sementara itu, jumlah perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan melalui sistem WLKP Online meningkat dari 11 unit pada tahun 2024 menjadi 13 unit pada tahun 2025. Meskipun peningkatan ini relatif kecil, hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhan pelaporan dan transparansi ketenagakerjaan. Namun, angka ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan total jumlah perusahaan aktif, menandakan bahwa sebagian besar usaha belum terintegrasi dalam sistem pelaporan formal.

Kesenjangan antara jumlah perusahaan aktif dan perusahaan yang melapor ketenagakerjaan mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih progresif. Strategi pembinaan, digitalisasi pelaporan, dan pemberian insentif bagi perusahaan patuh perlu diperkuat agar tata kelola ketenagakerjaan menjadi lebih akuntabel dan inklusif. Selain itu, perlu ada pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan lembaga pengawas untuk mendorong perusahaan kecil agar naik kelas dan memenuhi standar pelaporan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

### **9.5. Pelatihan dan Vokasi**

Kinerja pelatihan dan vokasi di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024–2025 menunjukkan pergeseran pola partisipasi dan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan data dan visualisasi grafik, jumlah lulusan pelatihan pemerintah pada tahun 2024 tercatat sebanyak 58 orang, namun tidak tercatat sama sekali pada tahun 2025. Ketidakhadiran data ini dapat mengindikasikan terhentinya pelaksanaan pelatihan pemerintah, perubahan sistem pelaporan, atau belum adanya pelatihan yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Hal ini menjadi perhatian penting karena pelatihan pemerintah biasanya menjadi tulang punggung


peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, terutama di wilayah dengan dominasi usaha kecil.



**Gambar 73. Pelatihan dan Vokasi**

Sebaliknya, pelatihan swasta menunjukkan tren positif. Dari nol peserta pada tahun 2024, jumlah lulusan pelatihan swasta meningkat menjadi 13 orang pada tahun 2025. Meskipun jumlahnya masih terbatas, peningkatan ini mencerminkan mulai tumbuhnya peran sektor swasta dalam mendukung pengembangan SDM lokal. Perlu didorong lebih lanjut agar pelatihan swasta dapat menjangkau lebih banyak peserta dan bersinergi dengan kebutuhan pasar kerja daerah.

Jumlah sarana pelatihan kerja di tingkat kabupaten/kota mengalami penurunan dari 2 unit

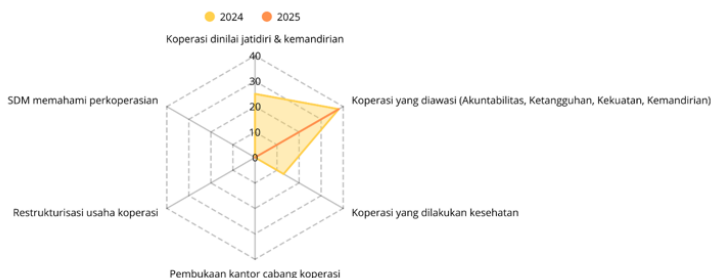


pada tahun 2024 menjadi 1 unit pada tahun 2025. Penurunan ini berimplikasi langsung terhadap kapasitas pelatihan, akses masyarakat terhadap layanan vokasi, dan efektivitas program peningkatan keterampilan. Sementara itu, dokumen kerjasama pelatihan vokasi tercatat tetap sebanyak 1 dokumen di masing-masing tahun, menandakan belum adanya ekspansi atau diversifikasi kemitraan antar lembaga pelatihan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pelatihan vokasi di Jayawijaya masih menghadapi tantangan dari sisi kontinuitas, kapasitas, dan kolaborasi. Diperlukan strategi penguatan kelembagaan pelatihan, revitalisasi sarana pelatihan kerja, serta perluasan kemitraan vokasi lintas sektor agar pelatihan benar-benar menjadi instrumen peningkatan daya saing tenaga kerja lokal.




## 9.6. Perkoperasian



**Gambar 74. Koperasi**

Kinerja sektor perkoperasian di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024–2025 menunjukkan pola yang belum progresif, dengan dominasi aktivitas pada aspek pengawasan dan minimnya penguatan kelembagaan serta kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dan visualisasi radar, tahun 2024 menjadi satu-satunya periode dengan aktivitas yang tercatat pada hampir seluruh indikator, sementara tahun 2025 tidak menunjukkan perkembangan baru, menandakan stagnasi atau belum dilakukannya pelaporan lanjutan.

Sebanyak 25 unit usaha koperasi dinilai dari aspek jatidiri dan kemandirian pada tahun 2024. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, keberpihakan pada anggota,



dan kemandirian kelembagaan. Namun, tidak adanya data pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa proses evaluasi tersebut belum berlanjut, atau belum dilakukan pelaporan ulang, sehingga potensi keberlanjutan dan konsistensi nilai koperasi belum dapat dipastikan.

Indikator yang paling stabil adalah pengawasan koperasi, dengan 38 unit usaha yang diawasi secara konsisten pada kedua tahun. Pengawasan ini mencakup aspek akuntabilitas, ketangguhan, kekuatan, dan kemandirian, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga transparansi dan keberlanjutan koperasi. Meski stabil, tidak adanya peningkatan jumlah koperasi yang diawasi menunjukkan bahwa ekspansi kelembagaan belum terjadi, dan penguatan sistem pengawasan masih terbatas pada entitas yang sama.

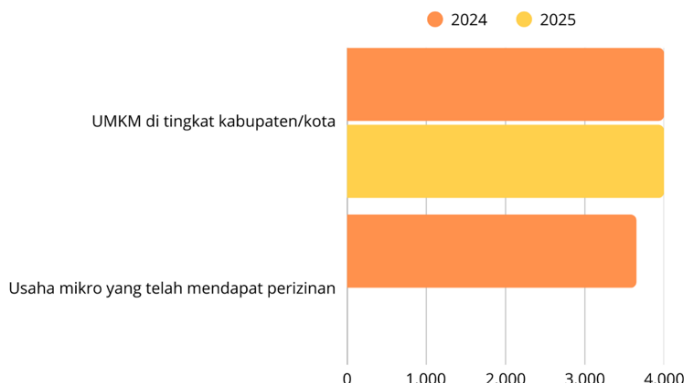
Sementara itu, 13 koperasi tercatat telah dilakukan pemeriksaan kesehatan koperasi pada tahun 2024, namun tidak ada data lanjutan di tahun 2025. Pemeriksaan kesehatan koperasi berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap risiko keuangan dan kelembagaan, serta menjadi dasar untuk intervensi pembinaan. Ketidakhadiran data tahun berikutnya berisiko menimbulkan blind spot terhadap kondisi koperasi yang aktif.

Tiga indikator lainnya pembukaan kantor cabang koperasi, restrukturisasi usaha koperasi, dan SDM yang memahami perkoperasian semuanya tercatat nol pada tahun 2024 dan tidak memiliki data pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan belum adanya penguatan kelembagaan koperasi secara struktural, baik dari sisi ekspansi fisik, perbaikan model usaha, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Padahal, ketiga aspek tersebut merupakan prasyarat penting untuk mendorong koperasi agar naik kelas dan mampu bersaing secara sehat di pasar lokal maupun regional.

Secara keseluruhan, radar kinerja perkoperasian menunjukkan bahwa aktivitas koperasi di Jayawijaya masih terpusat pada pengawasan, dengan minimnya inovasi kelembagaan dan pengembangan SDM. Diperlukan strategi revitalisasi koperasi melalui pelatihan, pendampingan, dan pembukaan akses pasar agar koperasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mendorong sinergi antara Dinas Koperasi, lembaga keuangan mikro, dan asosiasi koperasi untuk memperluas cakupan pembinaan dan memperkuat ekosistem koperasi berbasis komunitas.


## 9.7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

### 9.7.1. Jumlah dan Status Legalitas UMKM



**Gambar 75. Jumlah UMKM dan Legalitasnya**

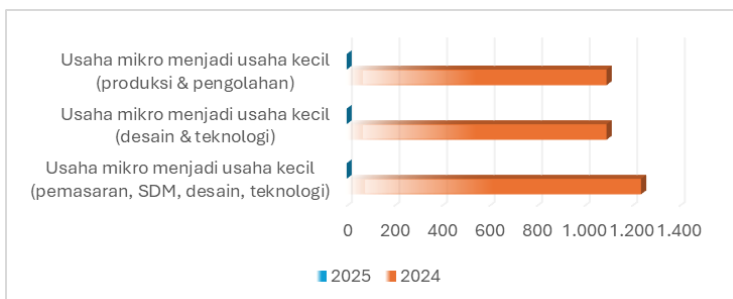
Data dan visualisasi kinerja UMKM Kabupaten Jayawijaya tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tetap stabil, namun aspek legalitas mengalami penurunan drastis. Tercatat sebanyak 4.000 unit UMKM aktif di tingkat kabupaten/kota pada kedua tahun, mencerminkan konsistensi basis ekonomi lokal yang bertumpu pada sektor mikro dan kecil. Namun, dari sisi legalitas, terjadi ketimpangan yang signifikan. Pada tahun 2024, sebanyak 3.651 usaha mikro telah memiliki perizinan, menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang cukup tinggi dan kesiapan untuk



mengakses program pemerintah, pembiayaan, serta pasar formal. Sayangnya, pada tahun 2025, tidak ada usaha mikro yang tercatat memiliki perizinan baru, menandakan stagnasi atau terhentinya proses fasilitasi legalisasi usaha.

Grafik batang mempertegas kesenjangan ini: meskipun jumlah UMKM tetap tinggi, tidak ada peningkatan dalam aspek legalitas. Hal ini dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan, perlindungan hukum, dan peluang ekspansi usaha. Ketidakhadiran data legalitas di tahun 2025 juga dapat mengindikasikan lemahnya sistem pelaporan atau belum optimalnya koordinasi antar lembaga pembina UMKM. Untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing UMKM, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendampingan legalitas, memperluas layanan perizinan berbasis digital, dan memastikan bahwa proses legalisasi menjadi bagian integral dari siklus pertumbuhan usaha mikro. Legalitas bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga pintu masuk menuju ekosistem usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.


### 9.7.2. Transformasi Usaha Mikro ke Usaha Kecil



**Gambar 76. Transformasi Usaha Mikro ke Usaha Kecil**

Transformasi usaha mikro menuju usaha kecil di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup signifikan, namun mengalami stagnasi total pada tahun 2025. Tiga jalur transformasi yang tercatat meliputi aspek pemasaran, sumber daya manusia, desain, teknologi, serta produksi dan pengolahan.

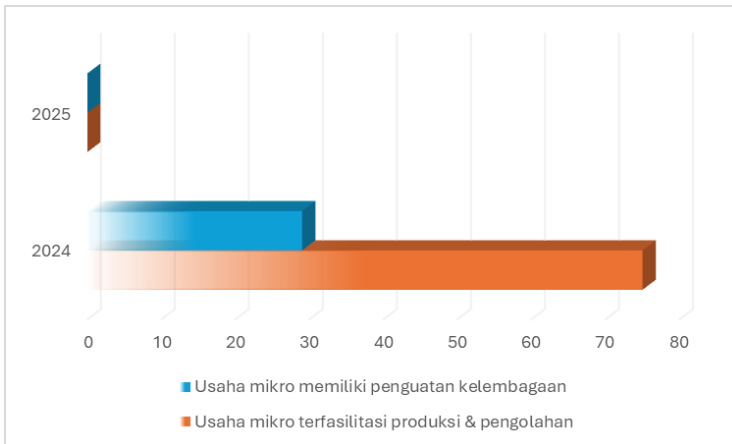
Pada tahun 2024, sebanyak 1.238 unit usaha mikro berhasil naik kelas melalui pendekatan terpadu yang mencakup pemasaran, SDM, desain, dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa intervensi lintas aspek mampu mendorong peningkatan skala usaha secara komprehensif. Di sisi lain, transformasi berbasis desain dan teknologi mencatat 1.093 unit usaha, menandakan bahwa



inovasi produk dan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam mendorong daya saing usaha mikro. Jumlah yang sama juga tercatat untuk transformasi melalui produksi dan pengolahan, menunjukkan bahwa penguatan rantai nilai lokal turut berkontribusi dalam proses peningkatan kelas usaha. Namun, pada tahun 2025, seluruh indikator transformasi tercatat nol, menandakan tidak adanya pelaporan atau pelaksanaan program transformasi usaha mikro ke usaha kecil. Ketidakhadiran data ini dapat mengindikasikan terhentinya program pendampingan, belum optimalnya sistem pelaporan, atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Padahal, keberlanjutan transformasi sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan UMKM dan memperluas basis ekonomi produktif di daerah.

Kondisi ini menegaskan perlunya strategi pemulihan dan reaktivasi program transformasi usaha mikro, termasuk penguatan koordinasi antar OPD, fasilitasi teknologi tepat guna, dan pembukaan akses pasar yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa proses transformasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga didukung oleh kelembagaan, pembiayaan, dan regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.


### 9.7.3. Fasilitas dan Penguatan Kapasitas Usaha Mikro



**Gambar 77. Jumlah Fasilitas dan Penguatan Kapasitas Usaha Mikro**

Kinerja UMKM di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2024 memperlihatkan capaian yang cukup berarti dalam aspek transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil serta fasilitasi produksi dan kelembagaan. Namun, pada tahun 2025 belum terdapat pelaporan lanjutan sehingga data yang tersedia tercatat nol pada seluruh indikator. Pada tahun 2024, sebanyak 1.238 unit usaha mikro berhasil naik kelas menjadi usaha kecil melalui dukungan terpadu di bidang pemasaran, SDM, desain, dan teknologi. Selain itu, terdapat 1.093 unit usaha yang naik kelas melalui jalur desain dan teknologi, serta jumlah yang sama melalui jalur



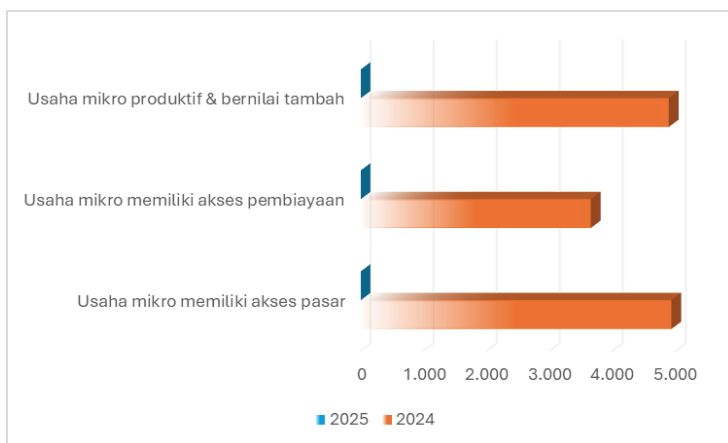


produksi dan pengolahan. Angka ini menunjukkan bahwa intervensi teknis dan inovasi produk menjadi faktor penting dalam mendorong daya saing usaha mikro.

Selain transformasi, fasilitasi usaha mikro juga tercatat. Sebanyak 75 unit usaha mikro difasilitasi dalam aspek produksi dan pengolahan, sementara 29 unit usaha mikro menerima penguatan kelembagaan. Kedua intervensi ini berperan dalam memperkuat kapasitas usaha mikro agar lebih produktif dan terorganisasi. Namun, pada tahun 2025 seluruh indikator tersebut tercatat nol, yang berarti belum ada pelaporan terkait kegiatan transformasi maupun fasilitasi usaha mikro. Kondisi ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai terhentinya program, melainkan menandakan bahwa data pelaksanaan belum tersedia atau belum masuk dalam sistem pelaporan resmi.


Dengan demikian, analisis tahun 2024 menunjukkan adanya capaian yang cukup besar dalam mendorong usaha mikro naik kelas dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Sementara untuk tahun 2025, diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari instansi terkait agar dapat memastikan keberlanjutan program dan efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

#### 9.7.4. Aksesibilitas dan Produktifitas Usaha Mikro



**Gambar 78. Aksesibilitas dan Produktifitas Usaha Mikro**

Data tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup tinggi dalam penguatan usaha mikro di Kabupaten Jayawijaya. Sebanyak 4.931 unit usaha mikro tercatat memiliki akses pasar, yang berarti sebagian besar pelaku usaha telah mampu menjangkau konsumen dan memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, 3.651 unit usaha mikro memiliki akses pembiayaan, menandakan bahwa dukungan finansial melalui lembaga keuangan atau program pemerintah sudah menjangkau sebagian besar pelaku usaha. Dari sisi produktivitas, terdapat 4.889 unit usaha mikro yang tercatat sebagai usaha produktif dan bernilai tambah, menunjukkan bahwa

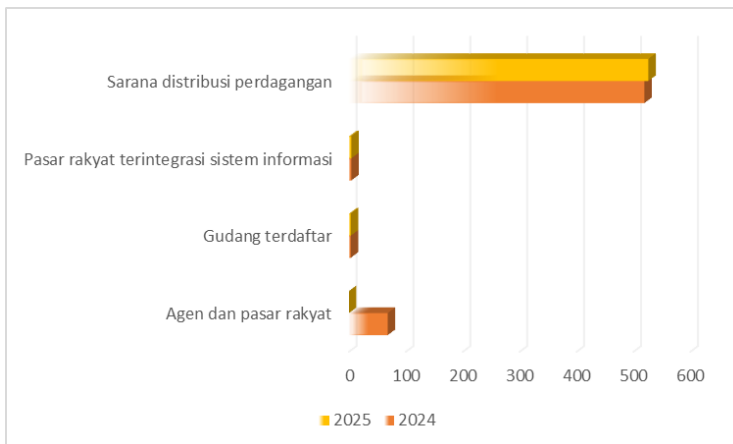


mayoritas usaha mikro tidak hanya beroperasi, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, pada tahun 2025 seluruh indikator tersebut tercatat nol, yang berarti belum ada pelaporan terkait akses pasar, akses pembiayaan, maupun produktivitas usaha mikro. Kondisi ini tidak dapat diartikan sebagai berhentinya kegiatan, melainkan menandakan bahwa data pelaksanaan belum tersedia atau belum masuk dalam sistem pelaporan resmi. Dengan demikian, analisis tahun 2024 memperlihatkan capaian yang kuat dalam mendukung usaha mikro agar lebih terhubung dengan pasar, memiliki dukungan pembiayaan, dan menghasilkan nilai tambah. Sementara untuk tahun 2025, diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari instansi terkait agar dapat memastikan keberlanjutan program dan efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

## 9.8. Perdagangan dan Dsitribusi

### 9.8.1. Infrastruktur dan Sarana Distribusi



**Gambar 79. Infrastruktur dan Sarana Distribusi**

Data infrastruktur dan sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan kondisi yang relatif stabil dengan sedikit dinamika pada beberapa indikator. Pada tahun 2024 tercatat 68 agen dan pasar rakyat yang berfungsi sebagai titik utama distribusi barang kebutuhan masyarakat. Namun, pada tahun 2025 angka ini tercatat nol, yang berarti belum ada pelaporan terkait keberadaan agen maupun pasar rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan data yang perlu diklarifikasi lebih lanjut agar gambaran distribusi tetap utuh.

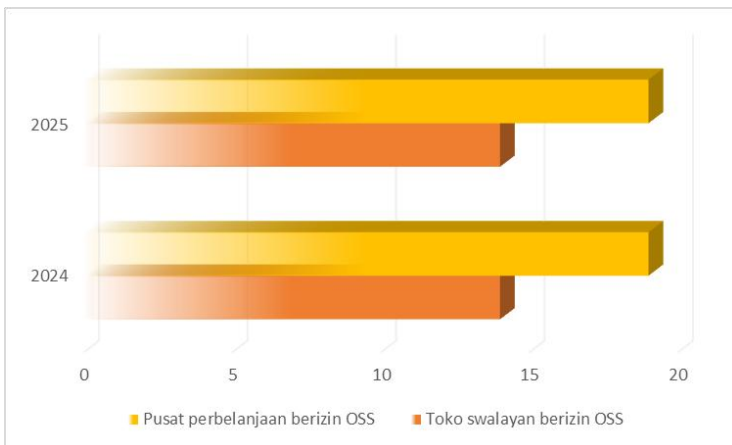
Gudang terdaftar tetap konsisten dengan jumlah 3 unit pada kedua tahun, menandakan kapasitas penyimpanan barang tidak mengalami perubahan. Pasar rakyat yang telah terintegrasi dengan sistem informasi juga stabil, tercatat 4 unit baik pada tahun 2024 maupun 2025. Konsistensi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pasar rakyat sudah berjalan, meskipun belum ada ekspansi baru.

Sarana distribusi perdagangan mengalami sedikit peningkatan dari 519 unit pada tahun 2024 menjadi 526 unit pada tahun 2025. Pertumbuhan ini meskipun kecil tetap menunjukkan adanya penambahan fasilitas fisik yang memperkuat jaringan distribusi barang. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian indikator stagnan, ada upaya untuk memperluas sarana distribusi secara bertahap.

Kondisi keseluruhan memperlihatkan bahwa infrastruktur distribusi perdagangan di Jayawijaya masih terjaga, dengan beberapa indikator menunjukkan konsistensi dan sedikit pertumbuhan. Namun, absennya data agen dan pasar rakyat di tahun 2025 menjadi catatan penting, karena indikator ini berperan besar dalam mengukur akses masyarakat terhadap distribusi barang. Keberlanjutan pendataan dan pelaporan menjadi

kunci agar arah kebijakan distribusi dapat lebih tepat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.

### 9.8.2. Ritel Modern dan Perizinan OSS




**Gambar 80. Ritel Modern dan Perizinan OSS**

Data ritel modern di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan kondisi yang stabil sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Jumlah toko swalayan berizin OSS tercatat sebanyak 14 unit, dan pusat perbelanjaan berizin OSS sebanyak 19 unit, tanpa adanya perubahan pada kedua tahun tersebut. Stabilitas ini memperlihatkan bahwa sektor ritel modern telah memiliki basis kelembagaan yang cukup mapan, dengan kepatuhan terhadap sistem perizinan berbasis OSS yang konsisten.

Kondisi yang tidak mengalami pertumbuhan maupun penurunan dapat diartikan sebagai fase stagnasi dalam ekspansi ritel modern. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pasar ritel modern di Jayawijaya telah mencapai titik keseimbangan antara permintaan dan kapasitas penyediaan, atau bahwa belum ada investasi baru yang masuk dalam periode tersebut. Dari sisi tata kelola, konsistensi jumlah unit berizin OSS menandakan adanya kepastian hukum dan administrasi yang terjaga, sehingga pelaku usaha tetap berada dalam kerangka regulasi yang jelas. Tren stabilitas ini memiliki implikasi penting bagi arah kebijakan perdagangan daerah. Di satu sisi, keberadaan ritel modern yang terdaftar secara resmi memberikan jaminan kepastian usaha dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, stagnasi jumlah unit dapat menjadi sinyal perlunya strategi pengembangan yang lebih proaktif, baik melalui insentif investasi maupun integrasi ritel modern dengan pasar rakyat dan UMKM lokal.

Strategi yang dapat dikembangkan adalah memperkuat kolaborasi antara ritel modern dan pelaku usaha lokal, sehingga keberadaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang konsumsi, tetapi juga sebagai saluran distribusi bagi produk lokal.

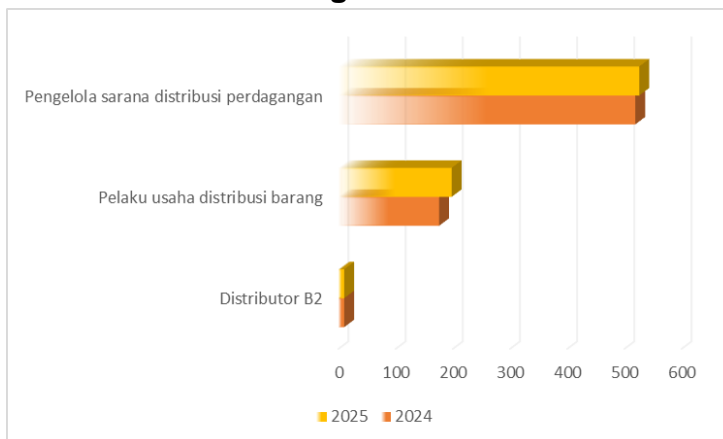


Dengan demikian, ritel modern berizin OSS dapat berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara modernisasi perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro. Selain itu, indikator sistem dan jaringan informasi perdagangan juga menunjukkan konsistensi dengan jumlah 2 unit pada tahun 2024 maupun 2025. Stabilitas ini menandakan bahwa infrastruktur digital perdagangan sudah tersedia, meskipun skalanya masih terbatas. Keberadaan sistem informasi ini penting sebagai fondasi integrasi data dan transparansi distribusi, namun belum mengalami perkembangan signifikan dalam dua tahun terakhir.

Kondisi keseluruhan memperlihatkan bahwa sebagian besar sarana distribusi tetap terjaga, dengan sedikit pertumbuhan pada fasilitas fisik dan konsistensi pada aspek kelembagaan serta digitalisasi. Namun, absennya data agen dan pasar rakyat di tahun 2025 menjadi catatan penting karena indikator ini berperan besar dalam mengukur akses masyarakat terhadap distribusi barang. Keberlanjutan pendataan dan penguatan sistem informasi perdagangan menjadi kunci agar arah kebijakan distribusi lebih tepat, efisien, dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.



### 9.8.3. Pelaku dan Pengelola Distribusi



**Gambar 81. Pelaku dan Pengelola Distribusi**

Data pelaku dan pengelola distribusi perdagangan di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan adanya stabilitas sekaligus pertumbuhan pada beberapa indikator. Jumlah distributor B2 tercatat tetap 10 orang pada tahun 2024 maupun 2025, menandakan tidak ada perubahan signifikan dalam kapasitas distribusi tingkat menengah. Konsistensi ini dapat dipahami sebagai bentuk keberlanjutan peran distributor yang sudah mapan, meskipun belum ada ekspansi baru.

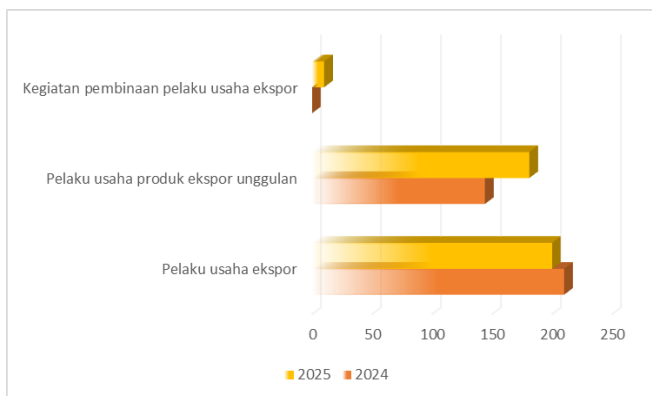
Pelaku usaha distribusi barang mengalami peningkatan dari 176 unit pada tahun 2024 menjadi 198 unit pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya dinamika positif dalam aktivitas perdagangan, dengan semakin banyak

pelaku usaha yang terlibat dalam rantai distribusi. Peningkatan jumlah pelaku usaha juga mencerminkan adanya peluang pasar yang berkembang, serta potensi peningkatan daya saing lokal dalam mendukung pergerakan barang. Pengelola sarana distribusi perdagangan juga mengalami kenaikan dari 519 menjadi 526 pelaku usaha. Pertumbuhan kecil ini sejalan dengan peningkatan sarana distribusi fisik yang sebelumnya tercatat, sehingga memperlihatkan adanya konsistensi antara ketersediaan fasilitas dan jumlah pengelola yang bertanggung jawab atas operasionalnya. Hal ini penting karena keberadaan pengelola yang memadai menjadi faktor penentu dalam efektivitas distribusi barang ke masyarakat.


Secara keseluruhan, data memperlihatkan bahwa meskipun jumlah distributor B2 tetap stagnan, terdapat tren pertumbuhan pada pelaku usaha distribusi barang dan pengelola sarana distribusi. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergerakan positif dalam struktur distribusi perdagangan, dengan semakin banyak aktor yang terlibat dalam mendukung kelancaran arus barang. Keberlanjutan tren ini akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, sistem informasi, serta dukungan kebijakan yang memastikan distribusi berjalan efisien dan merata.

#### 9.8.4. Ekspor dan Pembinaan Pelaku Usaha

Data ekspor Kabupaten Jayawijaya menunjukkan adanya dinamika yang berbeda antara tahun 2024 dan 2025. Jumlah pelaku usaha ekspor mengalami sedikit penurunan dari 210 menjadi 200, yang dapat diartikan sebagai berkurangnya partisipasi pelaku usaha dalam aktivitas ekspor secara umum. Namun, pada saat yang sama, pelaku usaha produk ekspor unggulan justru meningkat cukup signifikan dari 144 menjadi 181. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi ekspor ke arah produk unggulan yang lebih bernilai tambah, sehingga meskipun jumlah pelaku ekspor menurun, kualitas dan fokus produk yang dihasilkan semakin kuat.



**Gambar 82. Ekspor dan Pembinaan Pelaku Usaha**



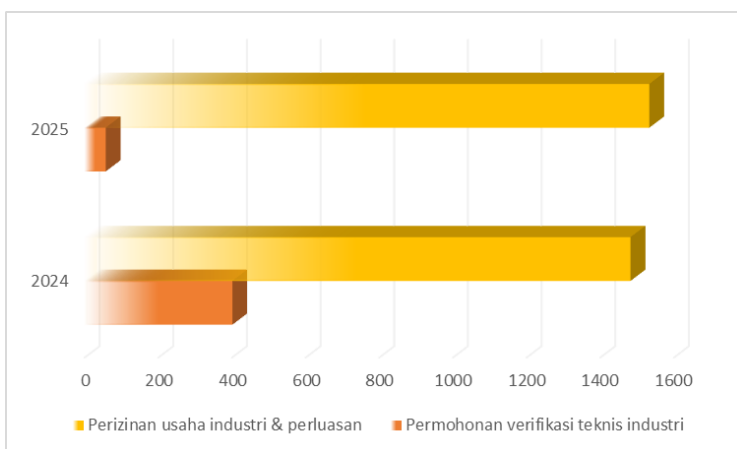
Kegiatan pembinaan pelaku usaha ekspor yang sebelumnya tidak tercatat pada tahun 2024, mulai dilaksanakan pada tahun 2025 dengan jumlah 10 kegiatan. Kehadiran program pembinaan ini menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha, terutama dalam menghadapi tantangan pasar global. Pembinaan yang dilakukan dapat berimplikasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan strategi pemasaran, sehingga pelaku usaha lebih siap bersaing dan mampu mengoptimalkan potensi produk unggulan daerah.

Tren ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah pelaku ekspor secara keseluruhan menurun, arah kebijakan dan intervensi pemerintah mulai fokus pada penguatan kualitas melalui pembinaan dan dukungan terhadap produk unggulan. Dengan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan serta kegiatan pembinaan yang terstruktur, diharapkan daya saing ekspor Jayawijaya semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

#### **9.8.5. Perizinan dan Verifikasi Industri**

Data perizinan dan verifikasi industri di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan dinamika yang cukup kontras antara tahun 2024 dan 2025. Permohonan verifikasi teknis industri pada tahun

2024 tercatat sebanyak 401 laporan, namun pada tahun 2025 turun drastis menjadi hanya 57 laporan. Penurunan tajam ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya perubahan mekanisme verifikasi, efisiensi sistem, atau berkurangnya kebutuhan pelaku usaha untuk melakukan verifikasi teknis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penurunan tersebut mencerminkan perbaikan proses administrasi atau justru adanya hambatan dalam pelaporan.



**Gambar 83. Perizinan dan Verifikasi Industri**

Sebaliknya, perizinan usaha industri dan perluasan menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 1.482 laporan pada tahun 2024 menjadi 1.533 laporan pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menandakan adanya ekspansi

usaha dan minat investasi yang tetap terjaga, meskipun jumlah permohonan verifikasi teknis menurun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih fokus pada legalisasi dan perluasan usaha dibandingkan pada aspek verifikasi teknis.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sektor industri di Jayawijaya tetap mengalami pertumbuhan dari sisi perizinan, namun terdapat ketidakseimbangan dengan aspek verifikasi teknis. Jika tren ini berlanjut, maka diperlukan penguatan sistem monitoring agar verifikasi tetap berjalan seiring dengan peningkatan jumlah izin usaha. Dengan demikian, arah kebijakan industri perlu menekankan keseimbangan antara kemudahan perizinan dan kepastian teknis, sehingga pertumbuhan industri tidak hanya cepat tetapi juga terjamin kualitas dan kepatuhannya.

#### **9.9. Sarana Perdagangan, Industri, Tenaga Kerja, dan Pelatihan**

Data perdagangan, industri, tenaga kerja, dan pelatihan di Kabupaten Jayawijaya tahun 2024–2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah. Informasi ini mencakup sarana perdagangan tradisional dan modern, jenis industri kecil maupun sedang, distribusi tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan, tingkat

pengangguran menurut pendidikan, serta keberadaan lembaga pelatihan kerja. Penyajian data ini penting untuk memahami struktur ekonomi lokal, kapasitas produksi, serta tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi. Dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun, dapat dianalisis tren pertumbuhan, stabilitas, maupun kekosongan pelaporan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

**Tabel 15. Sarana Perdagangan, Industri, Tenaga Kerja, dan Pelatihan**

No	Nama			2024	2025	Satuan
A.	Sarana Perdagangan					
		1. Jumlah Pasar Tradisional				Unit
		1. Jumlah Dikelola Pemerintah				Unit
			1. Jumlah Bangunan Permanen	484		Unit
		2. Dikelolah Swasta				Unit
			1. Jumlah Bangunan Permanen	1		Unit
		3. Dikelola Masyarakat				Unit
			1. Jumlah Bangunan Permanen	28	28	Unit
		2. Jumlah Pasar Modern				Unit
			1. Pasar Swalayan/Supermarket /Toserba	5	5	Unit
		3. Pertokoan		202	202	Unit
B.	Jenis Industri Kecil					

		<b>1. Industri Pengolahan Pangan</b>			
		1. Jumlah Unit Industri	412		Unit
		2. Jumlah Tenaga Kerja	1.410		Orang
		3. Jumlah Produksi	19.538		Ton
		4. Nilai Produksi	20.999.607.000		Rp
		<b>2. Industri Tekstil</b>			
		1. Jumlah Unit Industri	151		Unit
		2. Jumlah Tenaga Kerja	610		Orang
		3. Jumlah Produksi	131		Ton
		4. Nilai Produksi	3746163000		Rp
		<b>3. Industri Barang Kulit</b>			
		1. Jumlah Unit Industri	1		Unit
		2. Jumlah Tenaga Kerja	3		Orang
		3. Jumlah Produksi	5		Ton
		4. Nilai Produksi	43.000.000		Rp
		<b>4. Industri Pengolahan Kayu</b>			
		1. Jumlah Unit Industri	22		Unit
		2. Jumlah Tenaga Kerja	93		Orang
		3. Jumlah Produksi	150		Ton



		4. Nilai Produksi	336.04 2.000		Rp
<b>C.</b>	<b>Jenis Industri Sedang</b>				
		<b>Industri Pengolahan Pangan</b>			
		1. Jumlah Unit Industri	2		Unit
		2. Jumlah Tenaga Kerja	97		Orang
		3. Jumlah Produksi	929.76 0		Ton
		4. Nilai Produksi	3.000.0 00.000		Rp
<b>D.</b>	<b>Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan</b>				
		1. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	684.66 4	0	Orang
		2. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Pertambangan dan Penggalian	77.624	0	Orang
		3. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Industri Pengolahan	101.21 3	0	Orang
		4. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Listrik, Gas dan Air	47.447	0	Orang
		5. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Bangunan	813.31 1,30	0	Orang
		6. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel	1.099.6 33	0	Orang
		7. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	774416 ,6	0	Orang

		8. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	81713,2	0	Orang
		9. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Jasa Kemasyarakatan	117.842	0	Orang
		10. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Lainnya	78752,3	0	
<b>E.</b>	<b>Angkatan Kerja</b>				
		<b>1. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>			
		1. Jumlah Pengangguran Tidak Bersekolah	0	0	Orang
		2. Jumlah Pengangguran Tamatan SD dan Sederajat	1	0	Orang
		3. Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat	3	0	Orang
		4. Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat	221	3	Orang
		5. Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III	84	0	Orang
		6. Jumlah Pengangguran Tamatan S1	209	37	Orang
		<b>2. Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	0,0223	-	Orang
<b>F.</b>	<b>Pelatihan Kerja</b>				

			<b>1. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	2	2	Lemba ga
			1. Jumlah Lembaga Terakreditasi	2	2	Lemba ga
			<b>2. Jumlah Peserta Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah</b>	98	0	Orang

Data ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perdagangan, industri, tenaga kerja, dan pelatihan di Kabupaten Jayawijaya. Pada aspek sarana perdagangan, jumlah pasar tradisional permanen yang dikelola pemerintah tercatat 484 unit, sementara yang dikelola swasta hanya 1 unit, dan masyarakat 28 unit. Pasar modern berupa swalayan atau supermarket tetap stabil dengan 5 unit, serta pertokoan berjumlah 202 unit. Kondisi ini menunjukkan dominasi pasar tradisional dalam struktur perdagangan daerah, dengan kontribusi kecil dari swasta dan masyarakat.

Industri kecil memperlihatkan variasi sektor dengan dominasi pengolahan pangan, yang memiliki 412 unit industri, menyerap 1.410 tenaga kerja, menghasilkan 19.538 ton produksi dengan nilai lebih dari Rp 20,9 miliar. Industri tekstil memiliki 151 unit dengan 610 tenaga kerja, produksi 131 ton, dan nilai Rp 3,7 miliar. Industri barang kulit masih

sangat terbatas dengan hanya 1 unit, 3 tenaga kerja, dan nilai produksi Rp 43 juta. Industri pengolahan kayu memiliki 22 unit, 93 tenaga kerja, produksi 150 ton, dengan nilai Rp 336 juta. Industri sedang pengolahan pangan tercatat 2 unit dengan tenaga kerja 97 orang, namun produksinya sangat besar mencapai 929.760 ton dengan nilai Rp 3 miliar, menandakan adanya kapasitas produksi yang signifikan meski jumlah unit terbatas.

Tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan menunjukkan angka yang besar pada tahun 2024, dengan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan mencapai 684.664 orang, perdagangan besar dan eceran 1.099.633 orang, serta sektor bangunan 813.311 orang. Namun, pada tahun 2025 seluruh data tenaga kerja sektor ini tercatat nol, yang menunjukkan adanya kekosongan pelaporan sehingga tidak dapat dijadikan dasar analisis tren.

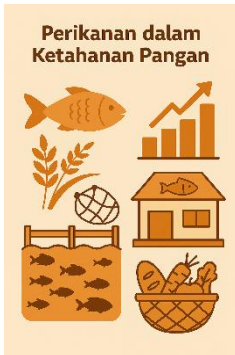
Angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan memperlihatkan variasi pengangguran. Pada tahun 2024, pengangguran terbesar berasal dari tamatan SMA dengan 221 orang, disusul tamatan S1 sebanyak 209 orang. Pada tahun 2025, pengangguran tamatan SMA menurun menjadi 3 orang, sementara tamatan S1 masih tercatat 37 orang. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan

signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun masih ada tantangan pada lulusan perguruan tinggi. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 0,0223, menandakan angka yang relatif rendah.

Pelatihan kerja menunjukkan adanya 2 lembaga pelatihan kerja swasta yang seluruhnya terakreditasi, konsisten pada tahun 2024 dan 2025. Peserta pelatihan kerja pemerintah tercatat 98 orang pada tahun 2024, namun nol pada tahun 2025, yang berarti belum ada pelaporan kegiatan pelatihan di tahun tersebut. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan dominasi pasar tradisional, kapasitas besar industri pangan, serta tantangan dalam pelaporan tenaga kerja tahun 2025. Perbaikan terlihat pada penurunan angka pengangguran, sementara pelatihan kerja masih terbatas. Konsistensi dan kelengkapan data menjadi kunci agar analisis dapat lebih akurat dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan di Jayawijaya.

## BAB X KETAHANAN PANGAN

### 10.1. Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya




Pengelolaan sektor perikanan yang efektif memerlukan dukungan dokumentasi yang terstruktur, akurat, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Di wilayah pegunungan seperti Jayawijaya, di mana akses terhadap sumber daya perairan bersifat terbatas

dan spesifik, data sektoral menjadi instrumen penting dalam merancang kebijakan yang adaptif dan berbasis potensi lokal.




**Gambar 84. Dokumen Dinas Perikanan**



Grafik ini memperlihatkan variasi jumlah dokumen dan unit yang dihimpun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya. Kategori data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan mencatat jumlah tertinggi, yaitu 4.942 dokumen, menandakan bahwa aspek ekologi dan daya dukung perairan menjadi fokus utama dalam dokumentasi sektoral. Volume ini menunjukkan intensitas pemetaan lingkungan sebagai dasar pengembangan usaha budidaya yang berkelanjutan.

Kategori data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan tercatat sebanyak 310,78 dokumen, sedangkan data prasarana dan sarana budidaya mencapai 245,16 dokumen. Kedua kategori ini memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan infrastruktur telah mulai terdokumentasi, meskipun belum setara dengan perhatian terhadap lingkungan.

Beberapa kategori lainnya menunjukkan angka yang seragam, yaitu 59,57 dokumen, meliputi data perikanan tangkap di perairan darat serta data pemasaran berdasarkan risiko dan skala usaha. Angka ini mengindikasikan bahwa dokumentasi pada aspek usaha dan distribusi masih terbatas dan belum terdiferensiasi secara mendalam.



Kategori pengolahan hasil perikanan mencatat angka terendah, yaitu 1 dokumen untuk masing-masing klasifikasi risiko dan skala usaha. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa sektor hilir belum menjadi prioritas pencatatan dan masih memerlukan penguatan dalam sistem informasi dan kebijakan pendukung.

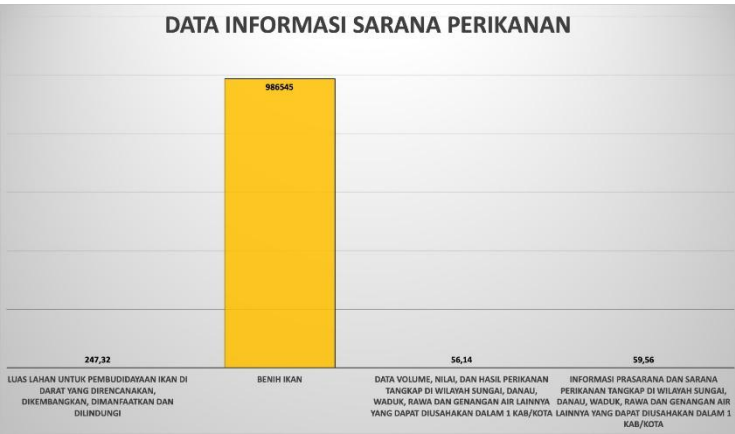
Sementara itu, jenis alat tangkap perikanan di perairan darat tercatat sebanyak 4 unit, muncul dua kali dalam grafik, menandakan bahwa klasifikasi alat tangkap telah dilakukan namun belum berkembang secara variatif.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa dokumentasi perikanan di Jayawijaya masih berpusat pada aspek budidaya dan lingkungan. Sektor tangkap, pengolahan, dan pemasaran belum terdokumentasi secara proporsional. Untuk membangun sistem informasi perikanan yang utuh, diperlukan strategi penguatan dokumentasi lintas subsektor, termasuk pengolahan hasil dan diversifikasi alat tangkap, agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika lokal dan potensi ekonomi daerah.




## 10.2. Informasi Sarana Perikanan

Dokumentasi sarana perikanan di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan ketimpangan yang cukup mencolok antar kategori. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah benih ikan mendominasi data dengan angka mencapai 986.545 unit, menandakan bahwa aspek hulu budidaya telah mendapatkan perhatian besar dalam sistem pencatatan dan pengelolaan. Volume ini menjadi indikator bahwa potensi pembesaran ikan secara teknis telah tersedia, meskipun belum sepenuhnya terhubung dengan data hilir.



**Gambar 85. Informasi Sarana Perikanan**

Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat tercatat sebesar 247,32 hektar, menunjukkan bahwa ruang fisik untuk kegiatan budidaya telah



direncanakan dan dimanfaatkan, namun belum sebanding dengan volume benih yang tersedia. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya penyesuaian antara kapasitas produksi benih dan daya tampung lahan budidaya agar efisiensi sistem dapat tercapai.

Di sisi lain, data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap hanya tercatat 56,14, dan informasi prasarana serta sarana perikanan tangkap sebesar 59,56. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap di perairan darat belum terdokumentasi secara mendalam. Keterbatasan ini dapat berdampak pada akurasi perencanaan dan efektivitas intervensi kebijakan di sektor tangkap.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa sistem informasi perikanan Jayawijaya masih bertumpu pada aspek pembenihan dan lahan budidaya, sementara dokumentasi sektor tangkap dan infrastruktur pendukung belum berkembang secara proporsional. Untuk membangun ekosistem perikanan yang berkelanjutan, diperlukan penguatan pencatatan lintas subsektor, termasuk integrasi antara data produksi, sarana, dan hasil tangkapan, agar kebijakan yang dirancang lebih responsif terhadap potensi lokal dan kebutuhan teknis di lapangan.

### 10.3. Pengeluaran Pembudidayaan



**Gambar 86. Jumlah Pengeluaran Pembudidayaan**

Data pengeluaran pembudidaya di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan keseimbangan yang unik antara dua komponen utama: biaya produksi dan biaya konsumsi, masing-masing tercatat sebesar Rp18.786.530.000. Kesetaraan nominal ini menunjukkan bahwa pembudidaya tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk proses teknis budidaya, tetapi juga untuk kebutuhan konsumtif yang mendukung keberlangsungan usaha secara sosial dan ekonomi.

Biaya produksi mencakup pengadaan benih, pakan, sarana budidaya, serta tenaga kerja teknis. Sementara itu, biaya konsumsi mencerminkan kebutuhan rumah tangga

pembudidaya, termasuk pangan, pendidikan, dan kesehatan. Keseimbangan ini mengindikasikan bahwa kegiatan budidaya ikan di Jayawijaya telah menjadi bagian integral dari ekonomi keluarga, bukan sekadar aktivitas teknis berbasis produksi.

Distribusi ini juga memperlihatkan bahwa pembudidaya di Jayawijaya cenderung mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan, dengan orientasi ganda: pemenuhan kebutuhan hidup dan penguatan kapasitas produksi. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, diperlukan kebijakan yang mendorong optimalisasi biaya produksi melalui teknologi tepat guna, serta perlindungan terhadap daya beli pembudidaya agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga di tengah fluktuasi harga input dan hasil panen.

#### **10.4. Nilai Tukar Pembudidayaan Air Tawar**

Data nilai tukar pembudidayaan air tawar memperlihatkan kontribusi ekonomi yang signifikan dari sektor budidaya terhadap pendapatan masyarakat Jayawijaya. Tercatat sebanyak 4.675 orang pembudidaya aktif, dengan total penerimaan mencapai Rp36.352.030.000. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan budidaya air tawar telah menjadi sumber penghidupan yang produktif dan berkelanjutan bagi ribuan pelaku usaha lokal.

Besaran penerimaan tersebut mencerminkan bahwa sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai subsisten, tetapi telah berkembang menjadi unit ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tukar yang kompetitif. Dengan rata-rata penerimaan per pembudidaya mendekati Rp7,8 juta, potensi peningkatan kesejahteraan melalui budidaya air tawar terbuka lebar, terutama jika didukung oleh sistem produksi yang efisien dan akses pasar yang stabil.

Distribusi ini juga mengindikasikan bahwa budidaya air tawar di Jayawijaya memiliki basis pelaku yang luas, namun masih menghadapi tantangan dalam hal peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk. Untuk memperkuat daya saing, diperlukan kebijakan yang mendorong inovasi teknologi, penguatan kelembagaan pembudidaya, serta integrasi dengan sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.



**Gambar 87. Nilai Tukar Pembudidayaan Air Tawar**

## **10.5. Kelembagaan dan Produksi Perikanan Air Tawar Kabupaten Jayawijaya**

### **10.5.1. Balai Benih Ikan**

Kelembagaan pembenihan ikan di Kabupaten Jayawijaya masih bersifat terbatas secara kuantitatif, namun menunjukkan kapasitas produksi yang signifikan. Tercatat hanya terdapat 1 balai benih ikan yang aktif, namun mampu menghasilkan 160.000 ton benih dengan nilai produksi mencapai Rp160 miliar.

Volume dan nilai produksi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kelembagaan formal

sangat terbatas, efektivitas operasional balai yang ada cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas teknis dan manajerial balai benih telah mampu menjawab sebagian besar kebutuhan pembenihan di wilayah Jayawijaya.



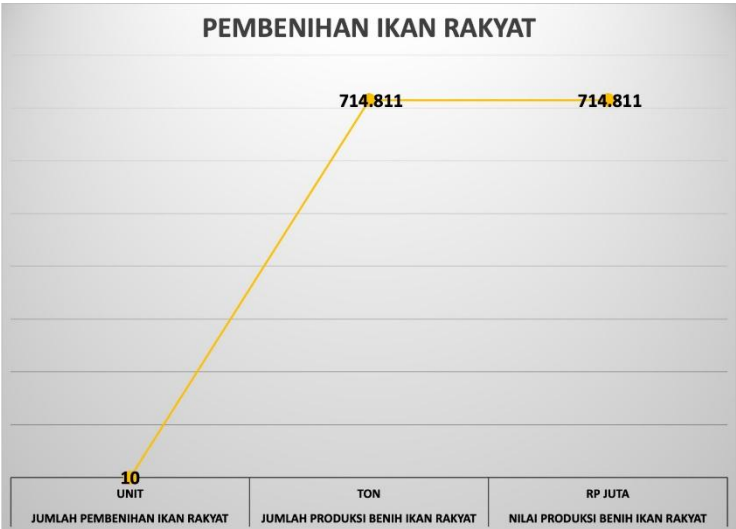
**Gambar 88. Balai Benih Ikan**

Namun, ketimpangan antara jumlah kelembagaan dan volume produksi juga menandakan potensi risiko kelembagaan tunggal. Ketergantungan pada satu unit balai dapat menimbulkan kerentanan sistemik apabila terjadi gangguan operasional, teknis, atau logistik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pembenihan melalui pendirian unit baru, revitalisasi pembenihan rakyat, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi

langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan produksi benih secara merata dan berdaya tahan.

Data ini menjadi fondasi awal dalam memahami struktur kelembagaan dan kapasitas produksi sektor perikanan air tawar Jayawijaya. Subbab ini akan dilanjutkan dengan analisis terhadap pembenihan ikan rakyat, jumlah pembudidaya, serta aktivitas penangkapan di perairan umum sebagai bagian dari sistem produksi yang saling terkait.

10.5.2. Pembenihan Ikan Rakyat



Gambar 89. Pembenihan Ikan Rakyat



Di samping balai benih formal, sistem pembenihan ikan rakyat di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan kontribusi yang cukup berarti dalam mendukung produksi benih secara komunitas. Tercatat terdapat 10 unit pembenihan ikan rakyat yang aktif, dengan total produksi mencapai 714,811 ton dan nilai ekonomi sebesar Rp714,811 juta.

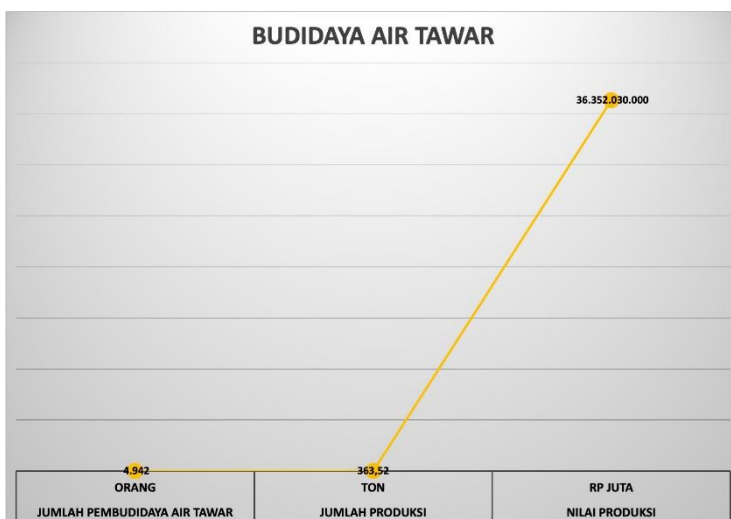
Volume produksi ini memperlihatkan bahwa pembenihan berbasis masyarakat telah berkembang sebagai alternatif kelembagaan yang adaptif, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap fasilitas teknis. Meskipun nilai produksi belum setara dengan balai benih formal, keberadaan unit-unit rakyat ini berperan penting dalam mendistribusikan benih secara lebih merata dan menjangkau wilayah kampung.

Kapasitas produksi yang cukup besar dari unit-unit pembenihan rakyat menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui dukungan teknis, pelatihan, dan integrasi dengan sistem pemasaran. Penguatan kelembagaan lokal ini menjadi strategi penting dalam membangun ekosistem perikanan air tawar yang inklusif dan berkelanjutan.

Data ini melengkapi gambaran awal tentang struktur kelembagaan pembenihan di Jayawijaya,

yang terdiri dari satu balai benih formal dan sepuluh unit pembenihan rakyat. Keduanya berkontribusi dalam membentuk fondasi produksi benih yang menopang aktivitas budidaya air tawar di wilayah pegunungan tengah.

### 10.5.3. Skala Usaha dan Nilai Ekonomi Budidaya Air Tawar



**Gambar 90. Budidaya Air Tawar**

Budidaya air tawar di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan struktur pelaku yang luas dan kontribusi ekonomi yang signifikan. Tercatat sebanyak 4.942 orang pembudidaya aktif menjalankan usaha budidaya ikan air tawar, dengan

total produksi mencapai 363,52 ton dan nilai ekonomi sebesar Rp36.352.030.000.

Jumlah pelaku yang tinggi menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi bagian penting dalam ekonomi lokal, terutama di wilayah-wilayah kampung yang memiliki akses terhadap sumber air tawar. Meskipun volume produksi per pembudidaya relatif kecil, nilai total yang dihasilkan memperlihatkan bahwa budidaya air tawar telah berfungsi sebagai sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

Rasio antara jumlah pembudidaya dan nilai produksi mengindikasikan bahwa sebagian besar usaha masih bersifat mikro dan berbasis rumah tangga. Namun, potensi peningkatan skala usaha terbuka lebar apabila didukung oleh sistem pembenihan yang efisien, akses pasar yang terjamin, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Data ini memperkuat posisi budidaya air tawar sebagai sektor strategis dalam pembangunan ekonomi perdesaan Jayawijaya. Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, diperlukan intervensi kebijakan yang mendorong efisiensi produksi, penguatan kelembagaan

pembudidaya, serta integrasi dengan sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.


#### 10.5.4. Penangkapan Ikan Perairan Umum



**Gambar 91. Penangkapan Ikan Perairan Umum**

Aktivitas penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Jayawijaya mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersebar di danau, rawa, dan sungai. Grafik ini menunjukkan bahwa sungai dan perairan sejenis menjadi lokasi penangkapan tertinggi dengan volume 29,77 ton, disusul oleh rawa sebanyak 21,035 ton, dan danau sebesar 9,52 ton.

Dari sisi nilai produksi, rawa dan sungai masing-masing menghasilkan Rp2.629.462.000, sementara danau menghasilkan Rp1.190.367.000. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun



volume tangkapan dari danau lebih rendah, nilai ekonominya tetap signifikan, kemungkinan karena jenis ikan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa penangkapan ikan di Jayawijaya masih bersifat tradisional dan berbasis komunitas, dengan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Keterbatasan sarana tangkap, akses pasar, dan teknologi pasca-panen menjadi tantangan yang perlu diatasi agar nilai tambah dari hasil tangkapan dapat meningkat.

Untuk memperkuat sektor ini, diperlukan kebijakan yang mendorong pengelolaan perairan umum secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas nelayan darat, serta integrasi dengan sistem pemasaran dan pengolahan hasil tangkapan. Penangkapan ikan di perairan umum dapat menjadi pelengkap strategis bagi budidaya air tawar, membentuk ekosistem perikanan darat yang saling menopang dan berdaya saing.

## **BAB XI**

### **LINGKUNGAN HIDUP**

#### **11.1. Laporan Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Kedudukannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup harus dibentuk di tingkat kabupaten/kota untuk menangani urusan strategis ini.

Di tingkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menegaskan peran dinas ini sebagai pelaksana teknis di bawah koordinasi kepala daerah. Tugas pokoknya meliputi:

- ❖ Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

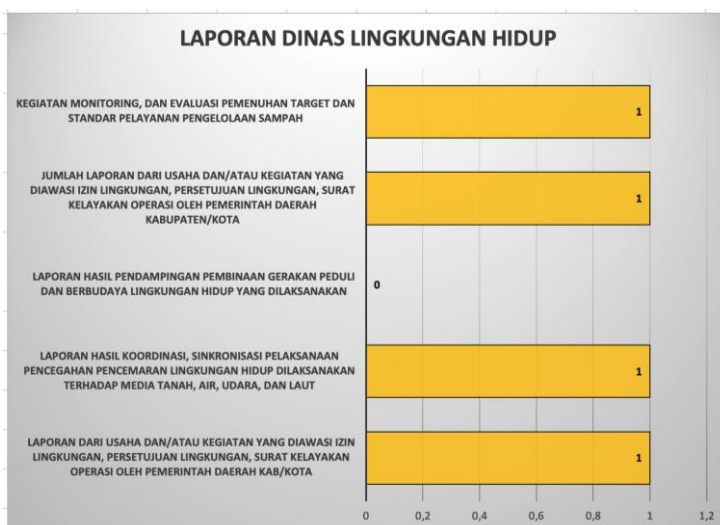
- ❖ Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan.
- ❖ Menyelenggarakan pelayanan publik terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, dan pengaduan masyarakat.
- ❖ Melakukan pembinaan dan edukasi masyarakat serta dunia usaha tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
- ❖ Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan landasan hukum yang jelas, Dinas Lingkungan Hidup Jayawijaya memiliki mandat strategis untuk menjaga kualitas lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan ekologi daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan lima laporan kelembagaan yang mencerminkan pelaksanaan fungsi strategisnya. Laporan tersebut meliputi:

- ❖ Monitoring dan evaluasi pemenuhan target serta standar pelayanan pengelolaan sampah.
- ❖ Pengawasan terhadap usaha/kegiatan terkait persyaratan lingkungan dan kelayakan izin.

- ❖ Pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
- ❖ Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan dari sumber yang tidak patuh.
- ❖ Pengawasan terhadap izin lingkungan dan persetujuan lingkungan oleh pemerintah daerah.



**Gambar 920. Jumlah Laporan Dinas Lingkungan Hidup**

Sepanjang tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya menghasilkan lima laporan kelembagaan. Setiap kategori kegiatan tercatat dengan jumlah satu laporan, sehingga total keseluruhan mencapai 5 dokumen. Laporan



tersebut terdiri atas monitoring dan evaluasi pemenuhan target serta standar pelayanan pengelolaan sampah (1 laporan), pengawasan usaha atau kegiatan terkait persyaratan lingkungan (1 laporan), pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup (1 laporan), koordinasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup lintas sektor (1 laporan), serta pengawasan izin dan persetujuan lingkungan (1 laporan).

Dari sisi kuantitatif, capaian ini menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama dinas telah terdokumentasi dengan rata-rata 1 laporan per kategori. Proporsi ketercapaian berada pada 100 persen, karena setiap bidang kerja menghasilkan dokumen sesuai kategori yang ditetapkan. Namun, intensitas kegiatan masih rendah karena jumlah laporan per kategori tidak lebih dari satu. Hal ini menandakan bahwa sistem dokumentasi kinerja sudah berjalan, tetapi belum mencerminkan volume kegiatan yang lebih luas.

Jika dibandingkan dengan standar kelembagaan yang ideal, jumlah lima laporan dalam satu tahun masih tergolong kecil. Standar kinerja biasanya menuntut adanya laporan berkala per triwulan atau per semester, sehingga dalam satu tahun seharusnya terdapat 2–4 laporan per kategori. Dengan demikian, terdapat gap kuantitatif sebesar

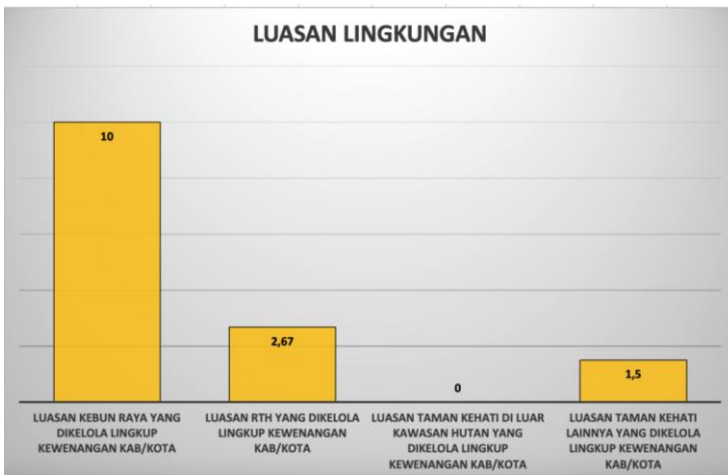
1–3 laporan per kategori yang belum terpenuhi. Gap ini memperlihatkan bahwa meskipun capaian kuantitatif sudah merata, intensitas pelaporan belum memenuhi ekspektasi tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan.

Kondisi ini menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Jayawijaya telah memenuhi kewajiban minimal pelaporan, namun masih perlu penguatan dari segi frekuensi dan kedalaman laporan. Untuk meningkatkan kualitas kinerja, target jumlah laporan per kategori dapat ditingkatkan menjadi 10–20 laporan per tahun secara keseluruhan. Dengan peningkatan tersebut, dokumentasi akan lebih mencerminkan intensitas kegiatan dan komitmen kelembagaan terhadap pengelolaan lingkungan.

### **11.2. Luasan Lingkungan**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mencatat empat kategori luasan lingkungan yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Total keseluruhan luasan yang tercatat mencapai 14,17 hektare, dengan distribusi yang tidak merata antar kategori. Luasan terbesar terdapat pada kebun raya, yaitu 10 hektare, yang menunjukkan bahwa kawasan ini menjadi prioritas

utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis konservasi dan edukasi lingkungan.



**Gambar 931. Luasan Lingkungan**

Kategori kedua adalah ruang terbuka hijau (RTH) dengan luasan 2,67 hektare, yang berfungsi sebagai elemen ekologis dan sosial dalam tata ruang kota. Meskipun keberadaannya penting untuk keseimbangan lingkungan perkotaan, proporsinya masih jauh lebih kecil dibandingkan kebun raya.

Kategori ketiga, yaitu taman keanekaragaman hayati (kehati) di luar kawasan hutan, tercatat dengan luasan 0 hektare, menandakan belum adanya pengelolaan kawasan kehati di luar hutan oleh pemerintah daerah.

Ketiadaan ini menjadi catatan penting dalam penguatan kebijakan konservasi lokal.

Kategori keempat adalah taman kehati lainnya, dengan luasan 1,5 hektare, yang menunjukkan adanya inisiatif pengelolaan kawasan biodiversitas di luar skema formal kehutanan.

Secara kuantitatif, proporsi luasan menunjukkan dominasi kebun raya sebesar 70,5% dari total luasan, diikuti RTH sebesar 18,8%, taman kehati lainnya sebesar 10,6%, dan taman kehati di luar kawasan hutan sebesar 0%. Distribusi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan masih terfokus pada kawasan yang bersifat edukatif dan rekreatif, sementara aspek konservasi biodiversitas belum mendapat alokasi ruang yang memadai.

Data ini menjadi dasar penting dalam evaluasi kebijakan ruang lingkungan hidup daerah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penambahan luasan untuk taman kehati dan RTH agar keseimbangan ekologis dan keberlanjutan ruang terbuka dapat tercapai secara lebih proporsional.

### 11.3. Jumlah Izin Usaha



**Gambar 942. Jumlah dokumen Izin Usaha**

Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 1.424 dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan telah diproses oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya. Jumlah ini berlaku seragam untuk lima kategori perizinan, yang masing-masing menunjukkan angka yang sama, yaitu 1.424 dokumen. Kategori tersebut meliputi: izin lingkungan yang diterbitkan oleh kabupaten/kota, izin lingkungan yang disetujui oleh kabupaten/kota, jumlah izin usaha yang telah diproses, serta dokumen izin/persetujuan yang terintegrasi secara elektronik.

Dari sisi kuantitatif, total dokumen yang diproses mencapai 7.120 dokumen (1.424 dokumen

× 5 kategori), meskipun kemungkinan terdapat tumpang tindih antar kategori karena substansi perizinan yang saling beririsan. Konsistensi angka pada seluruh kategori menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan telah berjalan dengan pola yang seragam, baik dalam penerbitan maupun persetujuan izin lingkungan.

Angka ini mencerminkan tingginya intensitas kegiatan administratif dalam pengelolaan izin lingkungan di tingkat kabupaten. Jika dirata-ratakan, terdapat sekitar 119 dokumen per bulan, atau hampir 4 dokumen per hari kerja, yang diproses oleh dinas terkait. Volume ini menunjukkan bahwa aspek perizinan menjadi salah satu fungsi dominan dalam kerja kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, sekaligus menjadi indikator beban kerja dan kebutuhan sistem pelayanan yang efisien.

Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kapasitas pelayanan, efektivitas sistem perizinan elektronik, serta kebutuhan penguatan SDM dan teknologi informasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses perizinan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku.

#### 11.4. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup



**Gambar 953. Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup**

Sepanjang tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mencatat keberadaan sembilan jenis sarana dan prasarana lingkungan hidup dengan total 75 unit fasilitas. Data ini memperlihatkan dominasi pada sektor pengelolaan sampah, yang mencapai 61 unit atau sekitar 81,3 persen dari keseluruhan. Rinciannya terdiri atas 16 unit sarana pengelolaan sampah regional, 15 unit sarana penanganan sampah yang beroperasi, 15 unit fasilitas penanganan sampah, serta 15 unit sarana pengangkutan sampah. Tingkat operasional

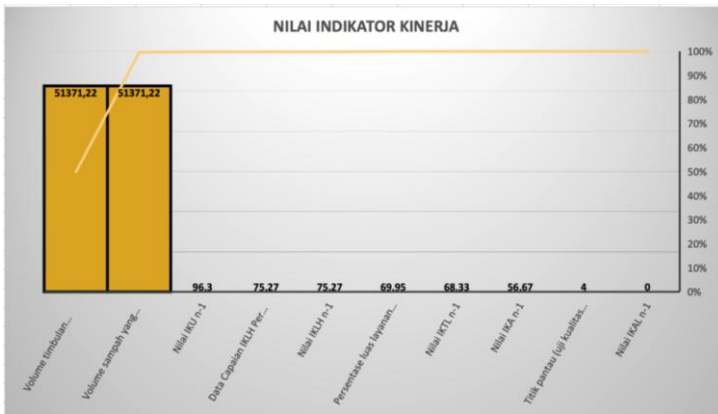
fasilitas pengelolaan sampah regional mencapai 93,75 persen, karena dari 16 unit yang tersedia, 15 unit tercatat aktif berfungsi.

Untuk aspek konservasi dan ruang hijau, tercatat 4 unit taman keanekaragaman hayati (kehati), 4 unit ruang terbuka hijau (RTH), dan 4 unit sarana keanekaragaman hayati lainnya. Sementara itu, kebun raya yang berada dalam kewenangan kabupaten/kota hanya berjumlah 1 unit, sehingga kontribusinya terhadap total fasilitas hanya sekitar 1,3 persen. Proporsi ini menunjukkan ketimpangan antara pengelolaan sampah yang relatif kuat dengan pengembangan sarana konservasi yang masih terbatas.

Secara kuantitatif, distribusi fasilitas memperlihatkan fokus utama pemerintah daerah pada pengelolaan limbah, sementara sektor konservasi dan ruang hijau hanya mencakup 18,7 persen dari total sarana yang tersedia. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam perencanaan lingkungan hidup daerah, karena keseimbangan antara pengelolaan sampah dan pelestarian ekologi belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah daerah perlu menetapkan target penambahan fasilitas konservasi dan penguatan infrastruktur pengolahan akhir agar sistem pengelolaan lingkungan lebih proporsional dan berkelanjutan.



### 11.5. Nilai Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya




**Gambar 964. Nilai Indikator Dinas Lingkungan Hidup**

Sepanjang tahun 2024, volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan tercatat sebesar 51.371,22 ton, angka yang identik dengan volume timbunan sampah yang diangkut. Kesamaan ini menunjukkan bahwa seluruh timbunan sampah yang tercatat telah berhasil dialihkan melalui sistem pengangkutan yang tersedia. Persentase cakupan layanan pengumpulan sampah mencapai 69,95 persen, menandakan bahwa hampir tiga perempat wilayah terlayani oleh sistem pengumpulan formal, sementara sisanya masih berada di luar jangkauan layanan.

Indikator Kinerja Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian sebesar 75,27 poin, baik untuk tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Konsistensi nilai ini memperlihatkan stabilitas kinerja kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nilai Indikator Kinerja Air (IKA) tercatat 56,67 poin, sedangkan Indikator Kinerja Laut (IKAL) berada pada 0 poin, menandakan belum adanya capaian atau belum dilaksanakannya kegiatan yang relevan pada aspek tersebut. Indikator Kinerja Terpadu Lingkungan (IKTL) menunjukkan nilai 68,33 poin, dan Indikator Kinerja Umum (IKU) mencapai 96,3 poin, yang merupakan nilai tertinggi di antara seluruh indikator yang tercatat.

Jumlah titik pantau untuk uji kualitas air, udara, dan laut tercatat sebanyak 4 titik, yang menjadi dasar pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara teknis. Meskipun jumlahnya masih terbatas, keberadaan titik pantau ini menjadi elemen penting dalam sistem pengawasan kualitas lingkungan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah telah berjalan dengan volume penanganan yang tinggi dan cakupan layanan yang cukup luas. Nilai indikator kinerja memperlihatkan variasi antar aspek, dengan capaian tertinggi pada indikator umum dan capaian



terendah pada aspek kelautan. Ketimpangan antar indikator menjadi dasar evaluasi untuk perencanaan program yang lebih seimbang, terutama pada sektor yang belum menunjukkan capaian signifikan. Pemerintah daerah perlu memperluas titik pantau, meningkatkan cakupan layanan, dan memperkuat pelaksanaan kegiatan pada aspek yang belum terkelola agar sistem pengelolaan lingkungan hidup dapat berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **BAB XII**

### **INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI**

#### **12.1. Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Lembaga ini memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan transportasi yang mencakup perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan sarana serta prasarana perhubungan. Dalam konteks geografis Jayawijaya yang didominasi pegunungan dan keterbatasan infrastruktur, peran dinas ini sangat strategis dalam memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi.

Tugas pokok Dinas Perhubungan meliputi penyusunan rencana transportasi daerah, pengaturan lalu lintas, pengelolaan terminal dan angkutan umum, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan jaringan transportasi. Fungsi lainnya adalah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara jasa transportasi, memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas,


serta mendukung integrasi transportasi antarwilayah.

Secara kelembagaan, Dinas Perhubungan Jayawijaya juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik darat, sebagaimana tercatat dalam laporan kinerja tahun 2021. Upaya ini diarahkan untuk memperbaiki sistem angkutan umum, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional transportasi di daerah yang memiliki tantangan geografis cukup berat.



**Gambar 975. Data Sarana Perhubungan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**

Dengan mandat tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaannya tidak hanya berfungsi



sebagai pengatur lalu lintas dan transportasi, tetapi juga sebagai fasilitator mobilitas masyarakat, penghubung antarwilayah, serta pendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas.


Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya memiliki intensitas kerja yang tinggi pada aspek pengujian kendaraan bermotor. Tercatat sebanyak 2.803 kali penyelenggaraan pengujian berkala telah dilaksanakan, sementara jumlah kendaraan yang tercatat melaksanakan wajib uji hanya 269 unit. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengujian dilakukan terhadap kendaraan yang tidak termasuk dalam kategori wajib uji, atau terdapat kendaraan yang diuji lebih dari satu kali dalam satu tahun. Volume pengujian ini menjadi indikator utama aktivitas teknis dinas, sekaligus mencerminkan beban kerja yang cukup besar dalam aspek keselamatan transportasi.

Di sisi infrastruktur lalu lintas, jumlah rambu yang terpasang tercatat sebanyak 19 unit, namun hanya 4 unit yang berada dalam kondisi terpelihara. Rasio pemeliharaan sebesar 21 persen ini menunjukkan keterbatasan dalam aspek perawatan fasilitas, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengaturan lalu lintas di wilayah perkotaan maupun

kampung. Selain itu, terdapat 14 unit alat penerangan jalan, 6 unit alat pemberi isyarat lalu lintas, dan 5 unit alat uji kendaraan yang telah memenuhi standar akreditasi. Jumlah ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan mobilitas masyarakat di daerah pegunungan.

Distribusi data memperlihatkan bahwa pengujian kendaraan menjadi fokus dominan, sementara dukungan infrastruktur jalan dan fasilitas pengaturan lalu lintas masih terbatas. Ketimpangan ini menimbulkan tantangan dalam membangun sistem transportasi yang aman, efisien, dan terstandarisasi. Keterbatasan jumlah alat uji terakreditasi juga berimplikasi pada kualitas hasil pengujian, karena tidak semua kendaraan diuji dengan perangkat yang memenuhi standar nasional.

Untuk memperkuat kinerja kelembagaan, Dinas Perhubungan perlu menetapkan target penambahan alat uji, memperluas cakupan pemeliharaan rambu, dan meningkatkan jumlah fasilitas penerangan jalan. Selain itu, penguatan sistem pencatatan kendaraan wajib uji dan integrasi data pengujian berkala dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sistem transportasi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap



kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan transportasi daerah dapat berkembang menuju sistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.



## BAB XIII

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

#### 13.1. Aparat Pamong Praja dan Pemadam



**Gambar 98. Jumlah Aparat Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretariat Daerah mencatat komposisi personel yang bertugas dalam bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran. Data ini menggambarkan struktur kekuatan aparatur yang tersebar dalam lima kategori utama, masing-masing dengan jumlah personel yang berbeda sesuai dengan fungsi dan urgensi tugasnya.

Kategori dengan jumlah personel terbanyak adalah Pamong Praja, yang mencapai 290 orang. Aparat ini berperan sebagai ujung tombak dalam penegakan peraturan daerah, pengawasan ketertiban umum, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. Hampir setara dengan jumlah tersebut adalah Petugas Patroli Satpol PP dalam 24 Jam, sebanyak 282 orang, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban secara berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Di sisi lain, Aparat Linmas berjumlah 82 orang, berfungsi sebagai pengamanan berbasis komunitas, terutama dalam mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan kenegaraan di tingkat kampung dan kelurahan. Sementara itu, Petugas Pemadam Kebakaran hanya berjumlah 41 orang, yang mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas tanggap darurat, mengingat kondisi geografis Jayawijaya yang rawan terhadap risiko kebakaran hutan dan pemukiman. Adapun Petugas Perlindungan Masyarakat berjumlah 30 orang, berperan dalam membina ketahanan sosial dan keamanan lingkungan, meskipun jumlahnya relatif kecil.

Secara keseluruhan, distribusi personel ini menunjukkan bahwa fokus utama pemerintah

daerah adalah pada pengawasan dan penegakan ketertiban umum, dengan total 572 personel (Pamong Praja dan Patroli Satpol PP) atau sekitar 82% dari total keseluruhan. Sementara itu, fungsi-fungsi lain seperti pemadaman kebakaran dan perlindungan sosial masih berada dalam skala yang lebih terbatas, namun tetap strategis.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menempatkan prioritas tinggi pada aspek ketertiban dan pengawasan lapangan, namun perlu mempertimbangkan penguatan kapasitas pada sektor pemadam kebakaran dan perlindungan sosial. Hal ini penting untuk memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan ketahanan masyarakat, terutama di wilayah pegunungan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik.

Sebagai rekomendasi strategis, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan:

- ❖ Penambahan personel dan pelatihan teknis bagi petugas pemadam kebakaran.
- ❖ Integrasi antara Linmas dan Petugas Perlindungan Masyarakat dalam sistem patroli terpadu.

- ❖ Evaluasi efektivitas patroli 24 jam untuk memastikan efisiensi dan dampak terhadap ketertiban.
- ❖ Pengembangan sistem informasi personel untuk mendukung perencanaan SDM dan penganggaran berbasis data.

Dengan pendekatan ini, distribusi aparatur dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan mendukung visi Jayawijaya sebagai daerah yang aman, tertib, dan tanggap terhadap risiko sosial maupun bencana.

### **13.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam sektor penanggulangan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, melalui data tahun 2024, menunjukkan komitmen awal dalam membangun kapasitas teknis aparatur pemadam kebakaran melalui program sertifikasi keterampilan.



**Gambar 99. Kepemilikan Sertifikat Aparatur Pemadam Kebakaran**

Terdapat dua jenis sertifikasi yang telah dimiliki oleh personel pemadam kebakaran, masing-masing sebanyak dua orang:

- ❖ Sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan kebakaran
- ❖ Sertifikasi keterampilan teknis dalam penanggulangan kebakaran

Jumlah ini memang masih sangat terbatas, namun secara substansi, kehadiran personel bersertifikat menandai langkah awal yang penting dalam membangun profesionalisme dan kesiapsiagaan aparatur. Sertifikasi tersebut tidak hanya menjadi pengakuan formal atas kompetensi teknis, tetapi juga menjadi syarat mutlak dalam menghadapi tantangan kebakaran yang semakin

kompleks, terutama di wilayah pegunungan seperti Jayawijaya yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik.

Dari perspektif kebijakan, data ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah mulai mengintegrasikan pendekatan berbasis kompetensi dalam pengelolaan SDM pemadam kebakaran. Meskipun jumlahnya masih kecil, keberadaan personel bersertifikat dapat menjadi katalisator bagi peningkatan standar operasional, penguatan pelatihan internal, dan pembentukan budaya kerja yang lebih profesional.

Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengembangan SDM di sektor ini masih berada pada tahap embrional. Dengan total personel pemadam kebakaran sebanyak 41 orang, hanya sekitar 4,8% yang telah memiliki sertifikasi teknis. Artinya, terdapat ruang yang sangat besar untuk peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan formal, sertifikasi nasional, maupun kerja sama lintas daerah dan kementerian.

Langkah strategis yang dapat diambil ke depan antara lain:

- ❖ Perluasan program sertifikasi secara bertahap untuk seluruh personel pemadam kebakaran.

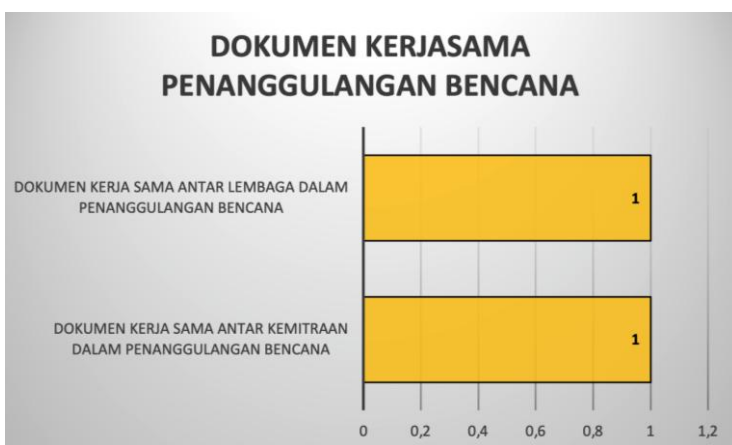
- ❖ Integrasi pelatihan teknis dengan simulasi lapangan, agar keterampilan tidak hanya bersifat teoritis.
- ❖ Pemetaan kompetensi dan kebutuhan pelatihan berbasis risiko lokal, seperti kebakaran hutan, pemukiman padat, dan fasilitas publik.
- ❖ Kolaborasi dengan instansi teknis nasional seperti Kementerian Dalam Negeri dan BNPB untuk mempercepat proses sertifikasi dan peningkatan mutu pelatihan.

Dengan pendekatan ini, pengembangan SDM pemadam kebakaran tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan darurat pemerintah.

### **13.3. Penguatan Kolaborasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jayawijaya**

Penanggulangan bencana di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Jayawijaya menuntut pendekatan yang tidak hanya responsif, tetapi juga kolaboratif. Pemerintah daerah menyadari bahwa kapasitas internal saja tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas risiko

bencana yang bersifat multidimensi—mulai dari kebakaran hutan, banjir lokal, hingga gangguan sosial akibat keterbatasan akses. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mulai membangun fondasi kerja sama kelembagaan melalui penyusunan dokumen formal yang mengatur sinergi antar pihak.




**Gambar 100. Dokumen Kerjasama Penanggulangan Bencana**

Terdapat dua dokumen kerja sama yang telah disusun dan diimplementasikan:

- ❖ Dokumen kerja sama antar lembaga dalam penanggulangan bencana
- ❖ Dokumen kerja sama antar kemitraan dalam penanggulangan bencana





Masing-masing dokumen berjumlah satu, yang menunjukkan bahwa proses kolaborasi masih berada pada tahap awal. Namun, secara substansi, kehadiran dokumen ini merupakan langkah strategis yang penting. Kerja sama antar lembaga mencerminkan koordinasi horizontal di tingkat pemerintahan dan instansi teknis, sedangkan kerja sama antar kemitraan membuka ruang bagi kolaborasi vertikal dengan masyarakat, LSM, dan sektor swasta.

Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mulai menggeser paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sistemik dan partisipatif. Meskipun jumlah dokumen masih terbatas, keberadaannya menjadi indikator bahwa pemerintah daerah telah memahami pentingnya tata kelola risiko berbasis jaringan kelembagaan.

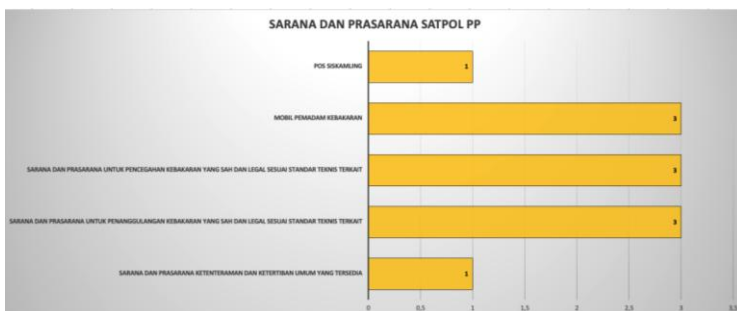
Langkah ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan adanya dokumen kerja sama, setiap pihak yang terlibat memiliki kejelasan peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi saat terjadi bencana. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat respons lapangan.

Ke depan, penguatan kerja sama ini dapat diarahkan pada:

- ❖ Perluasan jumlah dokumen kerja sama, baik dengan instansi vertikal maupun mitra lokal.
- ❖ Integrasi dokumen kerja sama ke dalam sistem perencanaan daerah, agar sinergi penanggulangan bencana menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.
- ❖ Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan lintas sektor, agar kerja sama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional.
- ❖ Pembangunan sistem informasi bersama, yang memungkinkan pertukaran data dan koordinasi real-time antar mitra saat terjadi bencana.

Dengan pendekatan ini, Kabupaten Jayawijaya dapat membangun ekosistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berbasis kolaborasi. Dokumen kerja sama bukan sekadar arsip, tetapi fondasi dari sistem perlindungan masyarakat yang berkelanjutan.

### 13.4. Evaluasi Sarana dan Prasarana Satpol PP



**Gambar 101. Sarana dan Prasarana Satpol-PP**

Evaluasi terhadap sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten Jayawijaya tahun 2024 menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Salah satu komponen yang tercatat adalah keberadaan pos siskamling, yang berjumlah satu unit. Pos ini berfungsi sebagai simpul keamanan berbasis masyarakat, sekaligus menjadi bentuk partisipasi warga dalam menjaga ketertiban lingkungan. Meskipun jumlahnya masih sangat minim, keberadaan pos siskamling menandakan adanya upaya awal untuk membangun sistem keamanan partisipatif yang terintegrasi dengan Satpol PP.

Selain itu, terdapat tiga unit mobil penunjang operasional, yang menjadi sarana utama mobilisasi petugas ke lapangan. Untuk wilayah pegunungan

yang luas dan menantang seperti Jayawijaya, jumlah ini belum mencukupi untuk menjangkau seluruh titik pengawasan secara efisien, terutama dalam mendukung patroli 24 jam.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah temuan bahwa sarana dan prasarana untuk penegakan Perda dan Perkada yang sah dan legal belum ditunjang teknologi tepat guna, dengan nilai tiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum tersedia, pelaksanaannya belum didukung oleh sistem digital, perangkat dokumentasi, maupun teknologi lapangan yang memadai. Ketidadaan dukungan teknologi berpotensi menghambat akurasi pelaporan, memperlambat respons, dan menurunkan transparansi dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa sarana dan prasarana pendukung keberhasilan tugas dan fungsi tidak tersedia, juga dengan nilai tiga. Hal ini mencakup fasilitas seperti ruang kerja yang layak, perangkat komunikasi, alat pelindung diri, serta sistem informasi internal. Ketidakhadiran fasilitas pendukung dapat berdampak langsung pada semangat kerja, keselamatan petugas, dan efektivitas koordinasi antar unit.

Secara keseluruhan, analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Jayawijaya masih berada dalam fase penguatan dasar kelembagaan. Pemerintah daerah perlu segera merumuskan strategi penguatan sarana dan prasarana melalui:

- ❖ Revitalisasi pos siskamling sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu berbasis komunitas.
- ❖ Penambahan kendaraan operasional sesuai cakupan wilayah dan intensitas patroli.
- ❖ Pengadaan teknologi tepat guna untuk mendukung penegakan hukum berbasis digital.
- ❖ Pembangunan fasilitas kerja dan komunikasi internal agar koordinasi dan pelaporan lebih efisien.
- ❖ Integrasi sistem informasi kelembagaan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas tugas.

Dengan langkah-langkah tersebut, Satpol PP Jayawijaya dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih profesional, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan lokal, sekaligus memperkuat perannya sebagai penjaga ketertiban dan pelindung masyarakat.

### 13.5. Kasus dan Korban Bencana



**Gambar 102. Kasus dan Korban Bencana**

Penanganan bencana dan gangguan ketertiban umum merupakan bagian integral dari fungsi perlindungan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya telah melakukan intervensi langsung terhadap tiga kategori kejadian yang berkaitan dengan keselamatan warga dan stabilitas sosial.

Pertama, tercatat adanya korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan, sebanyak satu kasus. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan respons awal terhadap situasi darurat dengan menyalurkan

bantuan logistik yang bersifat penyelamatan, seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan darurat. Intervensi ini penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam situasi krisis, sekaligus sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup korban.

Kedua, terdapat korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik evakuasi, juga sebanyak satu kasus. Bantuan ini mencerminkan bahwa proses evakuasi telah dilakukan secara terorganisir, dengan dukungan logistik yang memungkinkan perpindahan korban ke tempat yang lebih aman. Meskipun jumlah kasusnya kecil, keberadaan data ini menunjukkan bahwa sistem evakuasi darurat telah dijalankan, meski masih dalam skala terbatas.

Ketiga, tercatat satu kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani melalui penindakan terhadap unjuk rasa dan kerusuhan massa, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penanganan ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan fungsi pengamanan sosial secara aktif, dengan pendekatan hukum yang sah dan terukur. Penindakan terhadap gangguan ketertiban bukan hanya soal pengendalian massa, tetapi juga soal menjaga ruang publik tetap aman dan kondusif bagi seluruh warga.

Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus yang tercatat masih rendah, pemerintah daerah telah memiliki mekanisme dasar untuk merespons bencana dan gangguan sosial. Namun, skala intervensi yang terbatas juga mengindikasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas logistik agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh.

Ke depan, strategi penguatan dapat diarahkan pada :

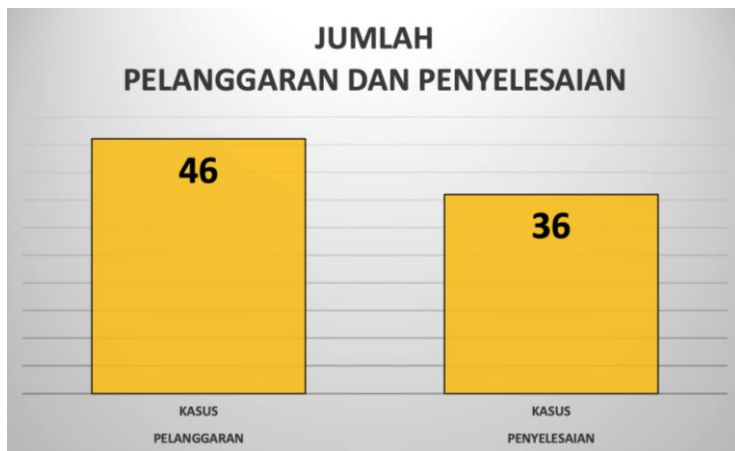
- ❖ Peningkatan kapasitas logistik darurat, baik untuk penyelamatan maupun evakuasi.
- ❖ Pengembangan sistem informasi kebencanaan, agar deteksi dan pelaporan lebih cepat dan akurat.
- ❖ Peningkatan pelatihan penanganan konflik sosial bagi Satpol PP, agar penindakan tetap dalam koridor hukum dan humanis.
- ❖ Integrasi penanganan bencana dan ketertiban dalam perencanaan daerah, agar respons tidak bersifat ad hoc, melainkan sistemik dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, Kabupaten Jayawijaya dapat membangun sistem perlindungan




masyarakat yang lebih tangguh, responsif, dan berbasis tata kelola yang baik.

### 13.6. Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Kasus



**Gambar 103. Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Kasus**

Data tahun 2024 menunjukkan dinamika penegakan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jayawijaya, khususnya dalam hal penanganan pelanggaran dan penyelesaian kasus. Tercatat sebanyak 46 kasus pelanggaran yang berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat Satpol PP. Pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), mulai dari gangguan



ketertiban lingkungan, pelanggaran izin usaha, hingga tindakan yang mengganggu kenyamanan publik.

Dari jumlah tersebut, 36 kasus telah diselesaikan, baik melalui pendekatan persuasif, mediasi, maupun penindakan administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 78% dari total pelanggaran berhasil ditangani secara tuntas, mencerminkan efektivitas kerja Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan hukum daerah.

Namun, terdapat selisih 10 kasus yang belum terselesaikan, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam proses penyelesaian. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hal ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, atau kompleksitas kasus yang membutuhkan penanganan lintas kelembagaan. Ketidakseimbangan antara jumlah pelanggaran dan penyelesaian juga menjadi indikator bahwa sistem penanganan kasus perlu diperkuat, baik dari sisi prosedur, kapasitas teknis, maupun dukungan kelembagaan.

Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa Satpol PP Jayawijaya telah menjalankan

fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara aktif, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek penyelesaian kasus. Keberhasilan dalam menyelesaikan sebagian besar pelanggaran patut diapresiasi, tetapi penyelesaian menyeluruh menjadi target yang harus dicapai agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak ketertiban semakin meningkat.

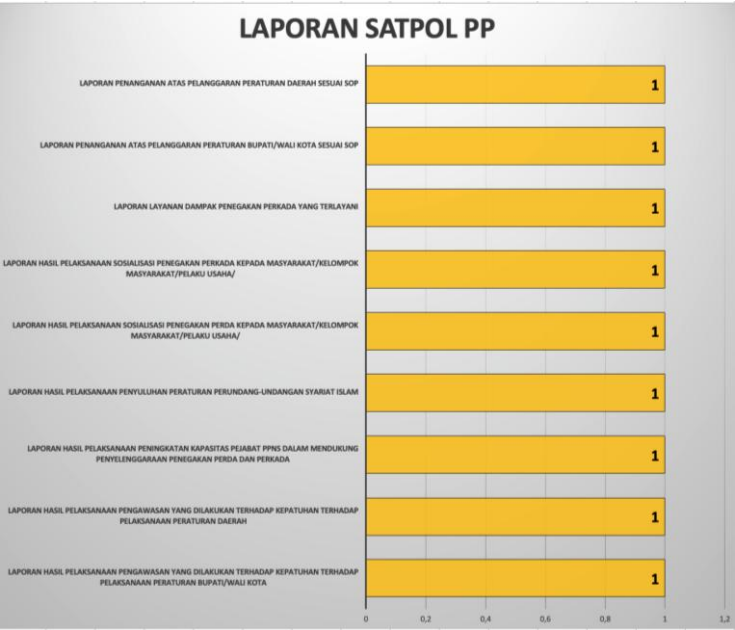
Strategi penguatan ke depan dapat diarahkan pada :

- ❖ Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, khususnya dalam mediasi dan penanganan kasus kompleks.
- ❖ Pengembangan sistem pelaporan dan tindak lanjut berbasis digital, agar proses penyelesaian lebih cepat dan terpantau.
- ❖ Penguatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas perizinan, dan perangkat kampung.
- ❖ Penyusunan SOP penyelesaian kasus yang adaptif terhadap konteks lokal, agar pendekatan hukum tetap relevan dan humanis.

Dengan langkah-langkah tersebut, Satpol PP Kabupaten Jayawijaya dapat memperkuat peran strategisnya sebagai penjaga ketertiban yang tidak

hanya menindak, tetapi juga menyelesaikan persoalan secara adil, efisien, dan bermartabat

13.7. Laporan Satpol PP



Gambar 104. Jumlah Laporan Satpol PP


Dokumentasi laporan merupakan instrumen penting dalam menilai akuntabilitas dan efektivitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sepanjang tahun 2024, Satpol PP Kabupaten Jayawijaya telah menghasilkan sejumlah laporan yang mencerminkan pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum daerah, pelayanan pengaduan,

sosialisasi regulasi, penertiban, peningkatan kapasitas, dan pengawasan kegiatan masyarakat.

Terdapat sepuluh kategori laporan yang masing-masing tercatat sebanyak satu dokumen, menunjukkan bahwa setiap fungsi kelembagaan telah dijalankan dan diarsipkan secara formal. Laporan tersebut meliputi:

- ❖ Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali/Kota (Perwaki) sesuai SOP
- ❖ Layanan terhadap pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti
- ❖ Sosialisasi Perda dan Perwaki kepada masyarakat, lembaga, mahasiswa, dan pelajar
- ❖ Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perwaki
- ❖ Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penegakan regulasi
- ❖ Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi melanggar Perda dan Perwaki

Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa Satpol PP Jayawijaya telah menjalankan fungsi-fungsi strategis secara menyeluruh, meskipun skala pelaporannya masih terbatas pada satu dokumen per kategori. Hal ini dapat dimaknai sebagai indikator awal dari sistem dokumentasi



yang mulai terbangun, namun masih membutuhkan penguatan dari sisi kuantitas, kedalaman analisis, dan kesinambungan pelaporan.

Kehadiran laporan penanganan pelanggaran sesuai SOP menandakan bahwa proses penegakan hukum telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, sehingga menjamin legalitas dan akuntabilitas tindakan. Laporan layanan pengaduan menunjukkan bahwa Satpol PP telah membuka ruang partisipasi publik dan merespons aspirasi masyarakat. Sementara itu, laporan sosialisasi regulasi kepada berbagai kelompok sasaran mencerminkan pendekatan edukatif yang penting dalam membangun kesadaran hukum secara kolektif.

Laporan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat menjadi bukti bahwa Satpol PP tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi pelanggaran. Adapun laporan peningkatan kapasitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai memperkuat kompetensi internal dalam penegakan regulasi.

Untuk memperkuat sistem dokumentasi ini, strategi ke depan dapat diarahkan pada:

- ❖ Peningkatan frekuensi dan kedalaman laporan, agar setiap kegiatan tercatat secara rinci dan berkelanjutan.
- ❖ Pengembangan sistem pelaporan digital, yang memungkinkan pemantauan real-time dan integrasi antar unit.
- ❖ Penyusunan laporan analitis berbasis indikator kinerja, agar dokumen tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif.
- ❖ Pelatihan penyusunan laporan kelembagaan bagi personel Satpol PP, agar kualitas dokumentasi meningkat secara sistemik.

Dengan penguatan ini, dokumentasi Satpol PP tidak hanya menjadi arsip administratif, tetapi juga menjadi alat strategis dalam membangun tata kelola ketertiban yang transparan, partisipatif, dan berbasis data.

## **BAB XIV**

### **PENGELOLAAN ARSIP DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH**



Arsip dan perpustakaan daerah merupakan pilar penting dalam menjaga memori kolektif sekaligus menyediakan

akses pengetahuan bagi masyarakat. Pengelolaan arsip berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, dan pelestarian dokumen pemerintahan maupun sejarah lokal. Sementara itu, layanan perpustakaan menjadi ruang literasi yang mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat budaya baca, dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, keberadaan arsip dan perpustakaan daerah tidak hanya berperan sebagai pusat dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memperkuat identitas lokal dan mendukung proses perencanaan berbasis data. Pengelolaan yang terstruktur, didukung oleh sistem informasi modern dan layanan inklusif, menjadi kunci agar arsip dan perpustakaan



mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


### 14.1. Jumlah Perpustakaan

Struktur kelembagaan perpustakaan di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan dominasi perpustakaan sekolah sebagai simpul utama layanan literasi. Tercatat sebanyak 81 perpustakaan sekolah dasar dan 31 perpustakaan sekolah menengah pertama berada di bawah kewenangan kabupaten/kota, menunjukkan bahwa sektor pendidikan dasar menjadi titik tumpu pengembangan koleksi dan akses informasi.



**Gambar 105. Jumlah Perpustakaan**

Di luar satuan pendidikan, terdapat 12 perpustakaan kelurahan/desa dan 3 perpustakaan kecamatan, yang berfungsi sebagai simpul literasi



masyarakat umum. Jumlah ini masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan sebaran geografis dan kebutuhan literasi di wilayah kampung dan distrik.

Sementara itu, perpustakaan khusus tercatat sebanyak 3 unit, dan perpustakaan umum kabupaten/kota hanya 1 unit, menandakan bahwa layanan perpustakaan yang bersifat tematik maupun terbuka untuk publik masih belum berkembang secara proporsional.

Yang menarik, dari seluruh jumlah perpustakaan yang tercatat, hanya 1 unit yang telah terotomasi, menunjukkan bahwa proses digitalisasi dan integrasi sistem informasi perpustakaan masih berada pada tahap awal. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong transformasi digital dalam layanan literasi daerah.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan perpustakaan di Jayawijaya masih bertumpu pada sektor pendidikan formal, sementara layanan publik dan digitalisasi masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran dan teknologi. Untuk membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan strategi pengembangan perpustakaan kampung, revitalisasi


perpustakaan umum, dan percepatan otomatisasi layanan berbasis digital.

## 14.2. Kapasitas SDM Perpustakaan dan Kelembagaan Literasi Daerah



**Gambar 106. Jumlah Pustakawan**

Distribusi tenaga pustakawan dan perangkat daerah di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan struktur yang kompleks, dengan dominasi pada keanggotaan perpustakaan sekolah dan umum. Tercatat 1.511 anggota perpustakaan umum, 1.146 anggota perpustakaan sekolah dasar, dan 345 anggota perpustakaan sekolah menengah pertama, menunjukkan bahwa layanan



perpustakaan telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama pelajar dan komunitas umum.

Namun, dari sisi tenaga teknis, jumlahnya masih terbatas. Hanya terdapat 81 tenaga teknis perpustakaan sekolah dasar, 31 tenaga teknis SMP, dan 19 tenaga teknis perpustakaan umum. Sementara itu, tenaga teknis desa/kelurahan hanya berjumlah 12 orang, dan tenaga teknis kecamatan sebanyak 3 orang, menandakan bahwa kapasitas operasional di tingkat kampung dan distrik masih perlu diperkuat.

Di bidang kearsipan, tercatat 3 tenaga arsiparis dan 3 tenaga teknis pengelola kearsipan, serta 20 perangkat daerah yang telah mendapatkan bimbingan arsip dinamis. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip masih berada pada tahap penguatan awal, dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan sistem pendukung.

Yang patut dicatat, hanya 7 perpustakaan yang telah melaksanakan layanan berbasis inklusi sosial, dan terdapat 2 penggiat literasi binaan kabupaten/kota, menandakan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas masih terbatas.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa meskipun keanggotaan perpustakaan cukup luas, kapasitas teknis dan kelembagaan masih belum

seimbang. Untuk membangun sistem literasi dan kearsipan yang tangguh, diperlukan strategi peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga pustakawan, penguatan peran penggiat literasi, serta perluasan layanan inklusif yang menjangkau komunitas kampung dan kelompok rentan.

### 14.3. Jumlah Koleksi Arsip Perpustakaan



**Gambar 107. Jumlah Koleksi Arsip Perpustakaan**

Koleksi arsip dan bahan pustaka di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan dominasi pada perpustakaan umum, yang tercatat memiliki 9.918 judul koleksi, jauh melampaui kategori lainnya. Perpustakaan desa/kelurahan memiliki 750 judul, sementara perpustakaan sekolah dasar dan

menengah masing-masing memiliki 456 judul, menandakan bahwa akses terhadap bahan bacaan masih bertumpu pada satuan pendidikan dan layanan umum kabupaten.

Perpustakaan kecamatan dan perpustakaan khusus masing-masing memiliki 150 judul, menunjukkan bahwa simpul literasi di tingkat distrik dan tematik belum berkembang secara optimal.

Di sisi kearsipan, tercatat hanya 1 naskah dinas yang diciptakan dan digunakan, serta 6 arsip statis yang telah melalui proses akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses. Jumlah ini menunjukkan bahwa aktivitas kearsipan masih berada pada tahap awal, dengan kebutuhan penguatan sistem dokumentasi dan pelestarian arsip pemerintahan.

Yang patut dicatat, hanya terdapat 1 kegiatan promosi gemar membaca di tingkat kabupaten/kota, menandakan bahwa kampanye literasi belum menjadi agenda rutin dan terstruktur.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa meskipun koleksi pustaka di perpustakaan umum cukup besar, akses dan aktivitas literasi belum merata di seluruh simpul kelembagaan. Untuk membangun ekosistem literasi dan kearsipan yang inklusif, diperlukan strategi peningkatan koleksi di


tingkat kampung dan sekolah, penguatan sistem kearsipan dinamis dan statis, serta intensifikasi promosi gemar membaca sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan.

#### 14.4. Partisipasi Pemustaka dan Distribusi Koleksi



**Gambar 108. Daftar Kunjungan Perpustakaan**

Aktivitas kunjungan pemustaka di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa perpustakaan satuan pendidikan dasar menjadi simpul literasi paling aktif. Tercatat 1.831 kunjungan pada perpustakaan sekolah dasar dan 981 kunjungan pada perpustakaan sekolah menengah



pertama, menandakan bahwa pelajar merupakan kelompok pengguna utama layanan perpustakaan.


Perpustakaan umum juga mencatat angka yang cukup tinggi dengan 1.210 kunjungan, menunjukkan bahwa masyarakat umum mulai memanfaatkan layanan literasi secara lebih terbuka. Sementara itu, perpustakaan desa/kelurahan mencatat 453 kunjungan, dan perpustakaan khusus sebanyak 405 kunjungan, sedangkan perpustakaan kecamatan hanya 97 kunjungan, menandakan bahwa simpul literasi di tingkat distrik masih belum optimal.

Dari sisi koleksi, perpustakaan umum memiliki 9.918 judul, jauh melampaui kategori lainnya. Perpustakaan desa/kelurahan memiliki 750 judul, dan perpustakaan kecamatan hanya 150 judul, menunjukkan ketimpangan distribusi bahan pustaka antar wilayah.

Yang patut dicatat, hanya terdapat 1 kegiatan promosi gemar membaca di tingkat kabupaten/kota, menandakan bahwa kampanye literasi belum menjadi agenda rutin dan terstruktur.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa meskipun partisipasi pemustaka cukup tinggi di sektor pendidikan dan layanan umum, akses terhadap koleksi dan kegiatan literasi belum merata






di seluruh simpul kelembagaan. Untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, diperlukan strategi peningkatan koleksi di tingkat kampung dan kecamatan, intensifikasi promosi gemar membaca, serta penguatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

## **BAB XV PENUTUP**

Penyusunan Buku Statistik Sektor Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam membangun sistem informasi yang berbasis data sektoral. Publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi statistik tahunan, tetapi juga sebagai instrumen analisis yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Data yang dihimpun dari 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencakup berbagai sektor strategis sebagaimana tercantum dalam daftar isi, mulai dari pemerintahan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketenagakerjaan, perdagangan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, penanggulangan bencana, hingga pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan. Dengan cakupan yang luas, publikasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi objektif Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2024.

Analisis yang disajikan dalam setiap bab tidak hanya menekankan capaian positif, tetapi juga mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan yang



masih dihadapi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa data statistik tidak sekadar menjadi informasi deskriptif, melainkan juga menjadi dasar refleksi kritis bagi perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, publikasi ini berperan sebagai evidence-based policy tool yang dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

Dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, prinsip konfidensialitas, netralitas, dan objektivitas dijunjung tinggi untuk menjaga integritas dan keandalan informasi. Meski demikian, kami menyadari adanya kemungkinan keterbatasan metodologis maupun teknis yang dapat memengaruhi kualitas data. Oleh karena itu, masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk penyempurnaan publikasi di masa mendatang.

Keberadaan buku ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat. Informasi statistik yang valid dan terpercaya akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh OPD, mitra kerja, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat, sehingga Kabupaten Jayawijaya mampu menjadikan data sebagai basis utama dalam setiap kebijakan pembangunan, menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Wamena, 13 Oktober 2025

**Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika  
Kabupaten Jayawijaya,**



**Arklaus Windesi, S.Sos., M. Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 197108061997121001**



# KOMINFO



Kantor Bupati Lt. 3, Jln. Yos Sudarso Wamena  
Papua Pegunungan



<https://diskominfo.jayawijayakab.go.id/>



[diskominfo@jayawijayakab.go.id](mailto:diskominfo@jayawijayakab.go.id)



<https://mail.simanis.jayawijayakab.go.id>